

**PROTEKSI ISI LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN**

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

**LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN MULTI TAHUN**

ID Proposal: 0959265a-126f-44ed-8c17-84578d1beb7a  
Laporan Kemajuan Penelitian: tahun ke-3 dari 3 tahun

**1. IDENTITAS PENELITIAN**

**A. JUDUL PENELITIAN**

MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

**B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU**

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Kebijakan Publik yang Pro-Growth, Pro-Jobs, Pro-Poor, dan Pro-Environment	-	Inovasi Model Kebijakan Publik yang Pro-Growth, Pro-Jobs, Pro-Poor, dan Pro-Environment	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)

**C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN**

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Desentralisasi	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SBK Riset Terapan	SBK Riset Terapan	6	3

**2. IDENTITAS PENGUSUL**

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
NOVERMAN DUADJI Ketua Pengusul	Universitas Lampung	Ilmu Administrasi Negara		5975286	0
Dr INTAN FITRI MEUTIA Anggota Pengusul 1	Universitas Lampung	Ilmu Administrasi Negara		5975146	0

Dra DIAN KAGUNGAN Anggota Pengusul 2	Universitas Lampung	Ilmu Administrasi Negara	6041120	0
---	------------------------	--------------------------------	---------	---

### 3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
Mitra Calon Pengguna	Dinas PMD dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran serta Dinas PMD dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus

### 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

#### Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
3	Dokumentasi hasil uji coba produk	Ada	Buku Referensi Hasil Penelitian

#### Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
3	Prosiding dalam pertemuan ilmiah Nasional	sudah terbit/sudah dilaksanakan	Shield Unila

### 5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

**Total RAB 3 Tahun Rp. 127,950,000**

**Tahun 1 Total Rp. 0**

**Tahun 2 Total Rp. 0**

**Tahun 3 Total Rp. 127,950,000**

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	Biaya analisis sampel	Unit	2	6,122,750	12,245,500
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	3	150,000	450,000
Analisis Data	Penginapan	OH	3	1,140,000	3,420,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	125	35,000	4,375,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	1	9,330,000	9,330,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Bahan	ATK	Paket	5	3,404,000	17,020,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	1	2,000,000	2,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar internasional	Paket	1	5,105,000	5,105,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	Paket	1	5,000,000	5,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Paket	1	5,000,000	5,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Luaran KI (paten, hak cipta dll)	Paket	1	400,000	400,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya pembuatan dokumen uji produk	Paket	1	5,000,000	5,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya penyusunan buku termasuk book chapter	Paket	2	1,000,000	2,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	OH	25	35,000	875,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	3	12,000,000	36,000,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	3	1,000,000	3,000,000
Pengumpulan Data	Tiket	OK (kali)	5	1,693,900	8,469,500
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	10	216,000	2,160,000
Pengumpulan Data	Penginapan	OH	10	610,000	6,100,000

## 6. KEMAJUAN PENELITIAN

**A. RINGKASAN:** Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Pembangunan pariwisata di Propinsi Lampung tidak selesai jika berjalan sendiri-sendiri oleh karena itu perlunya jalinan kerjasama yang sinergis antara aktor pentahelix dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata bahari di Propinsi Lampung. Tujuan jangka panjang penelitian ini: menghasilkan Model kebijakan pengembangan industri pariwisata berbasis kearifan lokal melalui jalinan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah daerah, investor, masyarakat, perguruan tinggi dan media. Hasil penelitian tahun kedua tahun anggaran 2020 adalah : strategi pengembangan industri pariwisata di Propinsi Lampung melalui kebijakan kerjasama antar daerah, dilakukan melalui : a. Daya Tarik (attraction): Program OVOD (one village one destination) Kabupaten Pesawaran menjadi daya tarik agar wisatawan ingin berkunjung ke sana, prasyarat agar industri kepariwisataan berfungsi dengan baik adalah daya tarik investasi demikian pula dengan Kabupaten Tanggamus, wisata air terjun Way Lalaan dan pantai Terbaya masih menjadi wisata unggulan Kabupaten tersebut. b. Accessible: Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus dalam memenuhi kebutuhan wisatawan akan kemudahan aksesibilitas meliputi peningkatan kualitas angkutan umum sejak tahun 2017-2021, pembangunan infrastruktur telekomunikasi (pengembangan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan mikro dengan menggunakan jaringan kabel bawah laut sepanjang

tahun 2017-2021 c.Amenittis : penyediaan fasilitas penginapan, tempat peristirahatan bagi wisatawan, sarana parkir yang luas dan representatif, restaurant, dan sarana MCK d.Ancillary (lembaga pengelola): yakni pemerintah, pengelola objek wisata dan investor. Jalinan kerjasama yang sinergis telah terbangun di beberapa spot wisata di Kabupaten Tanggamus maupun Kabupaten Pesawaran.

Strategi lainnya dalam penatakelolaan industri pariwisata berbasis kearifan lokal yakni dengan menjalin kemitraan dengan aktor-aktor pentahelix, antara lain : akademisi/Perguruan Tinggi, pengusaha/investor, media dan stakeholder lainnya

Luaran utama yang ditargetkan pada penelitian tahun ke 3 (tiga) tahun anggaran 2021 ini adalah (i) dokumentasi hasil uji coba produk yang berupa legal draft model kebijakan kerjasama antar aktor pentahelix dalam pengembangan industri pariwisata Propinsi Lampung, sebagai Luaran tambahan adalah : publikasi pada prosiding konferensi Internasional IICIS

Metode yang digunakan pada penelitian lanjutan tahun ke 3 tahun anggaran 2021 ini adalah : metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dipetik melalui wawancara dan FGD terhadap key informan yang relevan dengan kajian penelitian ini : Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Lampung, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus, DPRD, PT, dan stakeholder yang concern terhadap perkembangan pariwisata Lampung. Lokasi penelitian ini Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah kabupaten Pesawaran. Penelitian tahun ke tiga (tahun anggaran 2021) ini memfokuskan pada :

(a) Kebijakan kerjasama antar daerah di Propinsi Lampung dalam pengembangan industri pariwisata berbasis kearifan lokal

(b) Kolaborasi aktor pentahelix yang meliputi kolaborasi yang sinergis antara Pemerintah Daerah, Investor/ pengusaha pariwisata, Perguruan Tinggi, Masyarakat, dan Media dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Propinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Pesawaran yang menjadi lokasi penelitian ini

Aktifitas penelitian tahun ketiga tahun anggaran 2021 meliputi : menjalin kemitraan dengan lembaga terkait serta para stakeholder, finalisasi penyusunan legal draft model, Hak kekayaan Intelektual, penyusunan buku referensi/buku ajar sebagai bahan referensi perkuliahan mahasiswa, serta Publish hasil penelitian tahun ke tiga ini pada prosiding konferensi internasional IICIS Universitas Lampung tahun 2021. Tingkat kesiapan teknologi (TKT) penelitian ini berada pada level 6

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan model

kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data primer dipetik melalui wawancara dan fgd terhadap key informan yang relevan dengan kajian penelitian ini. Kolaborasi model pentahelix dalam pengembangan pariwisata desa wisata Harapan Jaya di lihat dari parameter keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan desa wisata Harapan Jaya dan menciptakan nilai tambah produk wisata yang menggambarkan karakteristik ciri khas atas keunikan produk dari desa wisata berbasis agrowisata tersebut. Karakteristik ciri khas produk pariwisata yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan potensi desa wisatanya antara lain perkebunan kopi, pertanian dan produk kuliner lokal (home industry).

Hasil dan rekomendasi yang penting dari penelitian ini adalah kolaborasi model Pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya perlu mendapatkan perhatian khusus, dan kurangnya komunikasi antar aktor mengenai desa wisata Harapan Jaya. Rendahnya kemampuan pendanaan dan manajemen serta kreativitas SDM yang terampil dalam mengupayakan pembuatan produk-produk industri lokal kepariwisataan terutama menyangkut industri kerajinan tangan dan cendera mata juga mempengaruhi tingkat kurang optimalnya kolaborasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata Harapan Jaya.

Namun demikian sejauh ini hadirnya desa wisata juga membawa dampak yang positif,

pembukaan lapangan kerja baru, pelestarian lingkungan dengan kawasan yang masih asri, sejauh ini pengembangan Desa Wisata Harapan jaya sepenuhnya menjual keasrian alam lokalnya antara lain wisata alam air terjun, dan bumi perkemahan sebagai daya tarik dari kawasan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi Model Pentahelix, dengan adanya keterlibatan Akademisi, Swasta, Komunitas, Pemerintah dan Media sangat lah penting untuk menunjang wisata ke depannya, namun sejauh ini untuk kerjasama tersebut masih belum optimal di ukur dari saling ketergantungan antar aktor, penyatuan pemikiran secara konstruktif, keputusan bersama, dan tanggung jawab bersama, hanya pihak-pihak tertentu saja yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, sehingga pentingya ada perjanjian ataupun regulasi khusus untuk mengatur komponen-kompenen tersebut bisa bekerjasama secara resmi dalam mengupayakan kolaborasi Model Pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya

Key words: kolaborasi, model pentahelix, pariwisata, Pesawaran

**B. KATA KUNCI:** Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

kolaborasi;model pentahelix; pariwisata;Pesawaran

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

menghapus penjelasan di setiap poin.

Pembangunan pariwisata di Propinsi Lampung tidak selesai jika berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, perguruan tinggi, masyarakat dan *media* harus saling *bersinergi*, sehingga potensi pariwisata dapat tergarap dengan maksimal. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersama membangun pariwisata Lampung, dan Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Tim Koordinasi lintas sektor sebagai upaya membangun pariwisata Lampung, dengan kata lain kolaborasi antar aktor pentahelix dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Propinsi Lampung sangatlah penting.

Peran penting Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan didasarkan bahwa pada pemikiran bahwa birokrasi memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala hal berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat suatu negara. Birokrasi juga berperan penting dalam melakukan berbagai tindakan antisipatif untuk meminimalisasi berbagai dampak negatif, mengingat banyaknya potensi persoalan yang muncul dari kepariwisataan

Peran stakeholder terhadap pembangunan kepariwisataan juga tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, tidak terkecuali proses kolaboratif tata kelola pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung. Proses tatakelola pariwisata merupakan suatu proses *adaptive system, dan beorientasi pada konsensus*. Berbasis 2 pakar, yaitu : Anshell dan Gash (2008) memetakan proses kolaboratif yang dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), kemudian terbentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*)

Proses kolaboratif pariwisata tatakelola pariwisata, diasumsikan akan terjadi jika terpenuhinya beberapa syarat, 1. Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi sebenarnya adalah *citizen power*, (menurut Arnstein) 2. Terdapat kondisi

dimana ada kesetaraan kekuasaan, berarti tidak ada dominasi tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki dan terdapat rasa saling menghormati 3. Terdapat aktor-aktor yang kompeten

### 1.1 *Konsep Kebijakan Pembangunan Kepariwisata*

Dalam kehidupan di negara moderen saat ini, kegiatan pembangunan termasuk pembangunan kepariwisataan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik pula. Kebijakan yang baik dapat diilustrasikan seperti seorang diRigen yang mengatur permainan sebuah orkestra yang terdiri dari banyak pemain musik dengan jenis alat musik yang berbeda-beda jenis, suara, dan waktu memainkannya, sehingga menghasilkan sebuah lagu yang sangat indah. Dengan demikian setiap insan pariwisata, dan terlebih lagi para birokrat, baik di lingkungan Pemerintah maupun Pemerintahan daerah, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dalam kepariwisataan.

Ditinjau dari aspek kebutuhan praktis, pembahasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan seringkali tidak terlalu diperhatikan. Orang yang mendengar istilah "kebijakan pembangunan kepariwisataan" pada umumnya secara otomatis akan memfokuskan perhatiannya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam penggolongan kepariwisataan. Namun demikian, beberapa teori terkait dengan konsep dimaksud perlu diungkapkan dalam tulisan ini karena membantu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan kepariwisataan. Ketika kita berbicara mengenai masalah kebijakan pembangunan kepariwisataan, maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian istilah "kebijakan" dan "pembangunan". Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, istilah "kebijakan" didefinisikan sebagai:

"(1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan."

Sementara itu dalam Kamus Merriam-webster, istilah "*policy*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kebijakan", diartikan sebagai aturan atau ide secara resmi di akui sebagai pedoman untuk menentukan pelaksanaan

aktivitas: *"an officially accepted set of rules or ideas about what should be done"*. Dengan demikian istilah *"policy"* atau *"kebijakan"* (khususnya definisi nomor 2) pada prinsipnya adalah parameter yang dijadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakan sebuah aktivitas. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah bahwa tidak dijelaskan secara tegas apakah *"kebijakan"* juga meliputi perturan perundang-undangan. Hal tersebut berbeda dengan istilah *"policy"* yang lebih jelas pengertiannya.

Definisi sederhana lainnya mengenai istilah tersebut adalah arah tindakan atau cara bertindak dipilih dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kondisi faktual, yang menentukan pengambilan keputusan dimasa kini dan masa depan: *"A definite course or method of action selected from among alternatives and in the light on given conditions to guide and determine present and future decisions"*. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, menurut Edgell dan Swanson (2013), pemahaman mengenai kebijakan dibidang kepariwisataan akan menjadi lebih mudah jika dimulai dari definisi Thomas Dye mengenai *"kebijakan publik"*, yaitu tindakan apapun melakukan atau tidak melakukan yang dipilih oleh pemerintah: *"whatever government choose to do or not to do"*.

Sementara itu, istilah *"pembangunan"* diartikan sebagai suatu proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa (Sasmojo, 2004 : 1), tentunya ke arah yang lebih baik. Jika kemudian dikaitkan dengan kedua istilah tersebut dan istilah *"kebijakan publik"*, maka *"kebijakan pembangunan"* akan memiliki pengertian sebagai *parameter yang secara resmi diakui yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman oleh Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi terwujudnya proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa ke arah yang lebih baik.*

Dalam bidang kepariwisataan, dikenal pula istilah dalam bahasa Inggris yaitu *"tourism policy"*. Menurut Goeldner dan Ritchie (2009:414), istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

*"Tourism policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strategies that provide a framework within which the collective and individual decisions directly affecting long-term tourism development and the daily activities within a destination are taken"*.

Pendapat lain mengenai istilah ini diungkapkan pula oleh Paul S. Biederman (2008) didalam buku yang berjudul *Travel and Tourism: An Industry Primer*, yang menambahkan aspek sosial didalam kebijakan kepariwisataan:

*“A tourism policy defines the direction or course of action that a particular country, region, locality, or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The ker principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of tourism policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and the lives of its citizens.”*

Kedua definisi tersebut diatas memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan *tourism policy* atau yang penulis terjemahkan sebagai “kebijakan dibidang kepariwisataan” adalah berbagai macam aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata yang menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan dalam jangka pendek dan panjang. Kebijakan ini harus memberikan jaminan bahwa tujuan utamanya adalah membuat masyarakat yang bersangkutan yang tinggal didestinasii pariwisata memperoleh keuntungan optimal dari kontribusi kepariwisataan dibidang sosial dan ekonomi dalam bentuk kemajuan dan kualitas hidup. Jika dikaitkan dengan konsep pembangunan, maka berarti aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata tersebut harus mengarah kepada perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa.

Edgell dan Swanson (2013) berpendapat bahwa pada intinya kebijakan dibidang kepariwisataan adalah setiap tindakan pemerintah baik di bidang legislatif, administratif, maupun yudisial yang berpengaruh terhadap kepariwisataan. Termasuk di dalamnya adalah aktivias pemasaran, perencanaan dan keberlanjutan. Menurut mereka bentuk kebijakan tersebut adalah berbagai pedoman (aturan), prinsip dan prosedur, yang disusun secara etis dan sifatnya fokus terhadap suatu persoalan serta mewakili harapan suatu masyarakat (atau bangsa) dalam hubungannya dengan aspek perencanaan, pembangunan, produk, jasa, pemasaran dan aspek berkelanjutannya.

## 1.2 *Tourism Law and Hospitality Law*

Masyarakat awam mungkin bingung ketika kemudian istilah kebijakan di bidang kepariwisataan dihubungkan dengan hukum kepariwisataan, atau yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *tourism law* dan *hospitality law*. Istilah *tourism law* itu sendiri merujuk pada segala macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan aktivitas perjalanan seseorang, termasuk dibidang angkutan udara, sistem lisensi, warisan budaya, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, persaingan usahadan sebagainya.

Sementara itu, *hospitality law* di definisikan sebagai segala macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri yang terlibat dalam penyediaan makanan, fasilitas akomodasi, perjalanan dan hiburan (*entertainment*) bagi wisatawan. Dengan demikian, kedua istilah tersebut sebenarnya dapat dikatakan memiliki pengertian yang hampir sama. Dalam hubungan dengan istilah kebijakan dibidang kepariwisataan, walaupun bukan merupakan persoalan yang signifikan, perlu dijelaskan sedikit mengenai perbedaan diantara keduanya. Hukum kepariwisataan sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan dibidang kepariwisataan (ESCAP, 2001).

Walaupun demikian, sebagian besar substansi kebijakan dibidang kepariwisataan dapat merupakan aturan hukum, sebagai mana fakta yang terjadi di AS: "*Robert James, founder of one of the largest hotel contract management companies in the United States once estimated that 60 to 70 percent of the decisions he made on a daily basis involved some type of legal dimension.*"

Oleh karena itu, masalah hukum menjadi elemen sangat penting dalam pembahasan mengenai kebijakan di bidang kepariwisataan. Salah kaprah yang sangat umum terjadi dalam pemikiran para birokrat di Indonesia yang mengelola kepariwisataan adalah bahwa pembangunan kepariwisataan di anggap sama dengan "pemasaran pariwisata" dalam arti kegiatan pemasaran produk yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Paradigma tersebut menyertakan fungsi institusi pemerintahan dibidang kepariwisataan (*government institution*) dengan sebuah perusahaan jasa pariwisata (*tourism company*).

Birokrat pengelola kepariwisataan seharusnya memahami bahwa kebijakan dibidang kepariwisataan yang baik menyangkut kepentingan publik yang jauh lebih luas yaitu pelayanan kepada seluruh anggota masyarakat, tidak hanya kepada kalangan bisnis sehingga evaluasi mengenai dampaknya secara komprehensif terhadap kehidupan masyarakat lokal juga menjadi isu sangat penting.

*"Sound tourism policy goes well beyond the marketing and promotion objectives to consider and evaluate tourism's comprehensive effect on the host community...policy should serve not properly applied, is a vehicle for a government to direct and stimulate the tourism industry, as for example through tax legislation and sponsoring tourism research...One conclusion to be drawn from this analysis is tourism is more than just marketing and tourism policy should reflect that."*

Sebagaimana diketahui, kepariwisataan tidak hanya berkaitan dengan fenomena orang yang melakukan perjalanan. Kepariwisata juga berdampak terhadap masalah-masalah seperti pencapaian tujuan sosial dan budaya, kebijakan luar negeri, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Disamping itu kepariwisataan bergantung kepada produk-produk dari sektor lain. Sebagai contoh, di banyak negara, produk ekspor utama dibidang pertanian, termasuk daun tembakau, hewan ternak hidup dan produk hasil hutan, merupakan bahan-bahan pendukung kepariwisataan:

*"Tourism as a set of dynamic and growing industries involves not just people traveling, but also planning and protecting the destinations and attractions to which people travel ...Tourism policy should aim to improve quality-of-life of the local citizenry and any given destination. Good tourism policy will assist in that process...Tourism has strong links to cultural and social pursuits, foreign policy initiatives, economic development, environmental goals, and sustainable planning...Tourism is also wide ranging in the sense that it demands products from other sectors of the economy. For example, many economies' top agricultural exports include leaf tobacco, live animals products, cotton, and forestry products, that supply demand throughout the world. These products are also assistance goods used by tourism."*

Satu hal yang menarik yang perlu dipahami adalah bahwa kebijakan dan perencanaan kepariwisataan yang baik hanya dapat diwujudkan melalui aktivitas penelitian yang solid. Penelitian kepariwisataan dapat menjadi media diskusi hingga tuntas, pendekatan-pendekatan yang bersifat inovatif dan kreatif yang berbeda dari pendekatan konvensional para pembuat kebijakan dan pakar kepariwisataan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kebijakan dibidang kepariwisataan seharusnya bersifat fleksibel dan memiliki daya tahan yang kuat dalam rangka mendorong perkembangan produk wisata dan menghadapi ketidakstabilan situasi ditingkat global:

*"Tourism policymakers' to fashion policies and plans the future will depend upon solid research to understand better and accept new concepts as they appear. Such research, conducted in a chaotic world, may hammer out innovation and creative approaches that differ from traditional guidelines for policy once held by tourism managers and scholars. The policies must be flexible and resilient enough to foster the development of new policy that is firmly in place can be rendered useless whenever tragic events or new global disturbances erupt as has been the case in recent years."*

Agar kepariwisataan dapat berjalan berkelanjutan dimasa depan, sangat diperlukan keberadaan perencanaan dan kebijakan kepariwisataan yang efektif sejak saat ini. Para pembuat kebijakan, perencanaan dan pemangku kepentingan lainnya harus mampu mengidentifikasi kecenderungan yang berkembang dalam kepariwisataan dan secara

terintegrasi melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlakukan untuk mewujudkan pertumbuhan yang stabil dan produk wisata yang berkualitas, yang menguntungkan baik wisatawan maupun penduduk setempat.

Untuk dapat membuat kebijakan yang tidak merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang, diperlakukan pemahaman mengenai dampak positif dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan kepariwisataan. Bila dampak negatif dimaksud dapat diketahui, diperbaiki dan dikelola secara memadai, kemudian dampak positifnya dibangun maka dapat ditunjukkan bukti bahwa kepariwisataan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan masyarakat. Kebijakan dibidang kepariwisataan harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak lagi bersifat konvensional, yaitu hanya dalam kaitannya dengan produk wisata (yaitu daya tarik wisata, aksesibilitas dan amenitas). Isu ini harus dianggap meliputi segala aspek dibidang kebijakan publik yang terkait dengan kepariwisataan.

Sebagai contoh, pengelolaan sumber daya air pada umumnya menjadi bagian dari kepentingan wisatawan maupun penduduk lokal. Namun demikian, taman wisata tirta (*water park*), lapangan golf yang luas, dan infrastruktur kepariwisataan lainnya dapat mengkonsumsi sumber daya air dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu instansi lingkungan birokrasi yang mengelola sumber daya tersebut akan mempertimbangkan kepentingan kedua pihak terkait. Kebijakan yang sifatnya terintegrasi tersebut menjadi faktor penting kepariwisataan yang berprinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Jika hal tersebut gagal diwujudkan, maka akan terjadi berbagai persoalan yang tidak menghasilkan pembangunan kepariwisataan berkualitas tinggi:

*“understanding both positive and negative impacts will lead to practical sustainable tourism development. When the negative impacts on the environment are recognized, corrected, and managed well and the positive attributes are built up, the results can be presented to stakeholders and tourism can become an important driving force in community development...Included in this policy process should be a listing of the quality, quantity, and geographic distribution of the tourism superstructure and special events, such as festival..policy issues should be extended beyond those traditionally thought of tourism, to be inclusive of all public programs concerned with tourism, not just what is typically perceived as tourism products. For instance, water management issues usually concern local businesses and residents. However, water parks, large golf resorts, and other tourism infrastructure can consume vast quantities of water. Therefore, waterworks departments will want to consider both the tourism industry and the local residents when developing policy. This will be crucial for tourism’s long-*

*term success in a community... Therefore, it is important to have an integrated policy. Without a comprehensive tourism policy, tourism's economic, political and legal implications often have unguided results, which may not lead to high-quality tourism development."*

Dengan demikian ditinjau dari aspek kebutuhan praktis dalam rangka membuat kebijakan dilingkungan birokrasi, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal penting yang seharusnya menjadi perhatian serius para birokrat baik di tingkat daerah maupun ditingkat pemerintahan daerah. **Pertama**, kepariwisataan tidak sekedar merupakan masalah sederhana yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Kepariwisataan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang sifatnya strategis, sehingga diperlukan suatu kebijakan dengan pendekatan yang bersifat holistik dan dilaksanakan secara konsisten.

**Kedua**, sebagai besar kebijakan di bidang kepariwisataan menyangkut masalah penyusunan dan penegakan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pemahaman mengenai hukum dan implementasi hukum seharusnya menjadi salah satu prioritas perhatian birokrasi dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berbasis prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. **Ketiga**, keberhasilan kepariwisataan dimasa depan sangat bergantung pada kualitas kebijaksanaan di bidang kepariwisataan pada hari ini.

### 1.3 Konsep Sinergitas

Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Jadi sinergi dapat dipahami pula sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Covey dalam Kurniawan & Suryawati (2017:40) mendefinisikan sinergitas sebagai sebuah kombinasi antar unsur maupun antar bagian yang akan memperoleh keluaran yang lebih baik dari sebelumnya. Indikator dalam menganalisis sinergitas menurut pendapat Doctoroff meliputi indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, serta kreativitas antar pihak terkait yang menjadi syarat utama bagi sebuah sistem sinergi yang ideal

Sofyandi & Garniwa dalam Rahmawati dkk (2014:643) mengemukakan bahwa Sinergitas dapat terbangun dengan baik melalui dua cara diantaranya

1. Komunikasi yang berorientasi pada sumber yang memandang bahwa komunikasi sebagai kegiatan dengan seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan, dan komunikasi yang

berorientasi pada penerima yang memandang komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

## 2. Koordinasi

Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Dalam hal ini Silalahi dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan koordinasi sebagai bentuk integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam sebuah usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.

Moekijat dalam Rahmawati dkk (2014:643) menyebutkan terdapat 9 (sembilan) syarat utama dalam mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

- 1 Hubungan langsung yang akan mempermudah pencapaian melalui hubungan pribadi secara langsung
- 2 Kesempatan awal dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3 Kontinuitas koordinasi yang harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan
- 4 Dinamisme, koordinasi harus terus menerus
- 5 Tujuan yang jelas untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- 6 Organisasi yang sederhana untuk memudahkan koordinasi yang efektif.
- 7 Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang akan mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan serta membantu dalam hal pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 8 Komunikasi yang efektif
- 9 Kepemimpinan supervisi yang efektif yang akan menjamin koordinasi kegiatan baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat evaluasi.

Sinergitas dalam pencapaian tujuan dapat terlaksana melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Konsep sinergitas merupakan upaya yang harus dilakukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan maupun non pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

### 1.4 *Konsep Model Pentahelix*

Model pentahelix pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arief Yahya yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata

Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan, memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran pengusaha, pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media.

Kotler et al dalam Saputri (2020:24) menyatakan bahwa destinasi wisata akan mendapatkan sebuah keunggulan dalam bersaing apabila masing-masing dari organisasi yang terlibat dapat berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sumber daya lain yang dapat mendukung proses pengembangan pariwisata. Dalam hal ini model pentahelix berfokus pada 5 unsur yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata diantaranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut.

### 1.5 *Peran Aktor Pentahelix*

Pengelolaan sektor pariwisata tidak terlepas dari peran stakeholder dalam proses pengembangannya. Terdapat 5 (lima) aktor yang ikut berkontribusi secara aktif dalam proses pengembangan sektor pariwisata, diantaranya

#### a. Pemerintah

Dalam proses pengembangan sektor pariwisata, pemerintah berperan dalam proses penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung perkembangan pariwisata, menyiapkan kebijakan maupun peraturan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, memberikan fasilitas yang memadai dan melakukan kegiatan promosi serta pemasaran destinasi wisata tersebut. Peran pemerintah dalam pembuat kebijakan maupun regulasi dibidang pariwisata akan mempengaruhi proses pengembangan pariwisata tersebut. Pemerintah juga berperan secara langsung didalam pengembangan regulasi dibidang pariwisata, mengendalikan proses pengembangan pariwisata, serta berperan langsung dalam memperkuat kelembagaan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam merumuskan kebijakan atau regulasi.

#### b. Akademisi

Akademisi dalam proses pengembangan pariwisata berperan dengan melakukan kajian ilmiah serta berbagai riset dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah. Hasil dari kajian ilmiah dan pengabdian masyarakat yang dilakukan para akademisi dapat dimanfaatkan untuk penunjang keberhasilan sektor pariwisata dengan melakukan kerjasama serta komunikasi dengan para akademisi dalam proses pengembangan agrowisata.

c. Dunia usaha

Dalam proses pengembangan pariwisata, dunia usaha atau swasta berperan penting dalam penyelenggaraan bisnis di sektor pariwisata yang mengutamakan etika bisnis, profesional, bertanggung jawab serta berkelanjutan. Dunia usaha berperan sebagai *profit oriented* yang akan bertanggungjawab dalam keberlanjutan lingkungan sebagai hal yang sangat penting dalam sektor pariwisata.

d. Komunitas

Komunitas dalam proses pengembangan pariwisata terdiri dari masyarakat dan LSM atau NGO yang berperan mendukung *sapta pesona* dengan menyediakan jasa pariwisata atau ekonomi kreatif. Masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pengembangan pariwisata.

e. Media

Media berperan pada bidang informasi dan promosi pariwisata. Promosi dan pemasaran bidang pariwisata yang bersifat inklusif dengan memanfaatkan media sosial.

### **Hasil pelaksanaan penelitian**

Hasil pelaksanaan penelitian pada Laporan Kemajuan ini adalah :

Pembangunan pariwisata di Propinsi Lampung tidak selesai jika berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, perguruan tinggi, masyarakat dan *media* harus saling *bersinergi*, sehingga potensi pariwisata dapat tergarap dengan maksimal. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersama membangun pariwisata Lampung, dan Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Tim Koordinasi lintas sektor sebagai upaya

membangun pariwisata Lampung, dengan kata lain kolaborasi antar aktor pentahelix dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Propinsi Lampung sangatlah penting.

Peran penting Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan didasarkan pada pemikiran bahwa birokrasi memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala hal berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat suatu negara. Birokrasi juga berperan penting dalam melakukan berbagai tindakan antisipatif untuk meminimalisasi berbagai dampak negatif, mengingat banyaknya potensi persoalan yang muncul dari kepariwisataan. Penelitian tahun ke tiga ini mengambil lokasi di Kabupaten Pesawaran tepatnya di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay.

### **Gambaran Umum Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran**

Kecamatan Way Ratai merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah barat Kabupaten Pesawaran memiliki jarak rata-rata 40,32 km dari ibukota Kabupaten Pesawaran. Secara geografis terletak di sebelah selatan Provinsi Lampung dengan sebagian wilayah berupa perbukitan, dataran landai, dan pesisir pantai. Sejak diresmikannya pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2007 di Kabupaten Pesawaran memiliki 11 kecamatan dan 114 desa.

Pesawaran merupakan kabupaten kesebelas yang ada di Provinsi Lampung terbentuk pada Tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2007. Kabupaten Pesawaran beribukota di Gedong Tataan, memiliki jarak 27 km dari Bandar Lampung. Pesawaran memiliki 11 kecamatan dan 144 desa. Kecamatan Way Ratai adalah salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Pesawaran. Sebelah utara Kecamatan Way Ratai berbatasan dengan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedong tataan Kabupaten Pesawaran. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Sebagian wilayah Kecamatan Way Ratai merupakan daerah dataran rendah, sebagian lagi merupakan daerah bukit dan dengan luas total kecamatan sebesar 127.21 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Way Ratai beribukota di Desa Wates Way Ratai yang berjarak 41 Km dari ibukota Kabupaten Pesawaran. Desa Wates Way Ratai memiliki luas wilayah terkecil yaitu sebesar 21,56 km<sup>2</sup>.

Kecamatan Way Ratai salah satu daerah berkembang yang menjadi sorotan pemerintah karena banyak terdapat potensi wilayah yang dapat dikembangkan dan menjadi keunggulan daerah. diantaranya menjadi daerah wisata, daerah komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan air tawar. Menjadi daerah pengembangan baru

menyebabkan RT dan dusun di Kecamatan Way Ratai mengalami perubahan sehingga pada tahun 2019 sampai sekarang terdapat 206 RT dan 72 dusun (*BPS: Statistik Daerah Way Ratai Tahun 2020*).

Kecamatan Way Ratai adalah salah satu daerah berkembang yang menjadi sorotan pemerintah. Menjadi daerah pengembangan baru menyebabkan RT dan dusun di Kecamatan Way Ratai mengalami perubahan sehingga pada tahun 2014 sampai sekarang terdapat 206 RT dan 72 Dusun (*BPS: Statistik Daerah Way Ratai Tahun 2016*). Berdasarkan letaknya, Kecamatan Way Ratai sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedondong, bagian selatan dengan Kecamatan Gedong Tataan, bagian barat dengan Kecamatan Kelumbayan, dan bagian timur dengan Kecamatan Padang Cermin (*BPS: Peta Administrasi Kec. Way Ratai*).

Berdasarkan letaknya, Kecamatan Way Ratai sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedondong, bagian selatan dengan Kecamatan Gedong Tataan, bagian barat dengan Kecamatan Kelumbayan, bagian timur dengan Kecamatan Padang Cermin (*BPS: Peta Administrasi Kec. Way Ratai*). Dengan karakteristik wilayah yang morfologinya kebanyakan berupa perbukitan dan wilayah hutan, maka masih banyak terdapat hutan kawasan dan hutan lindung. Wilayah tutupan lahan hutan yang masih alami berbatasan dengan Kecamatan Way Ratai yakni kawasan Taman Hutan Wan Abdurahman.

Kecamatan Way Ratai terdapat desa swadaya Desa Harapan Jaya yang terletak dekat dengan kawasan hutan lindung dengan curah hujan tahunan  $\pm 2500-3000$  mm, berada di ketinggian lebih dari 500 mdpl dengan topografi perbukitan berlereng-lereng didominasi lereng terjal sehingga perkembangan permukiman penduduk berpola menyebar dan memiliki luas  $\pm 15$  km<sup>2</sup> terdiri dari 8 dusun dan 17 RT, Desa Harapan Jaya terletak cukup jauh dari Ibukota Kabupaten Pesawaran ( $\pm 70$ km) dengan akses jalan sebagian besar berupa tanah berbatu sehingga menjadikan desa ini sedikit sulit mengalami perkembangan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Jumlah penduduk yang tinggal di desa Harapan Jaya tergolong sedang yakni 1.520 jiwa penduduk laki-laki dan 1.325 penduduk perempuan (*BPS Kab. Pesawaran Tahun 2020*). Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, hasil proyeksi penduduk tahun 2015 menunjukkan bahwa Desa Harapan Jaya memiliki angka rasio jenis kelamin tertinggisebesar 114,72.

Masyarakat yang tinggal Desa Harapan Jaya banyak yang bekerja di sektor perkebunan dengan mengolah lahan di lereng perbukitan untuk ditanam tanaman pangan seperti jagung, ubi, kedelai, dan padi. Sistem tanam dan olah tanah masyarakat Desa Harapan Jaya masih tradisional karena pendidikan masyarakatnya yang masih berada di

jenjang pendidikan dasar, terbatasnya sarana-prasarana serta kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Dari tahun 2015-2020 terdapat kenaikan angka banyaknya anak yang bersekolah SD(4,22%) tetapi angka banyaknya anak bersekolah SLTP dan SLTA justru mengalami penurunan masing-masing 6,36% dan 2,29% (*Cabdin Pendidikan Kec. Way Ratai*).

Secara administratif sebaran spasial Desa Harapan Jaya dengan wilayah lain, adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan: Hutan Register 19 Wan Abdul Rahman
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cemin
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way Urang, Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paya Kecamatan Padang Cermin dan Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai.

### ***Kolaborasi Model Pentahelix dan Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya***

Pada tahap Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay parameter yang dilihat adalah bagaimana keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan di desa wisata Harapan Jaya dan menciptakan nilai tambah produk pariwisata yang menggambarkan karakteristik ciri khas atas keunikan produk dari desa wisata Harapan Jaya yang membedakan dari pariwisata lainnya. Karakteristik ciri khas produk pariwisata yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan potensi desa wisatanya seperti pengelolaan usaha-usaha kerajinan lokal yang menjadi ciri khas budaya daerah, destinasi wisata air terjun, pengelolaan usaha kuliner khas daerah, pengelolaan usaha penginapan, dan juga pengelolaan usaha berupa warung dan toko-toko untuk kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari.

### **Saling Ketergantungan**

Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Saling Ketergantungan adalah salah satu tolak ukur untuk melihat optimalnya sebuah pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya, Menurut (Grey, 1989) dalam melihat terciptanya kolaborasi salah satunya melalui komponen saling ketergantungan dalam dunia pariwisata. Maka dari itu dalam sebuah penelitian ini peneliti menuliskan menurut hasil observasi penelitian Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya masih belum sepenuhnya optimal sesuai dengan teori saling ketergantungan, yang dimana menurut stakeholder pariwisata untuk menumbuhkan rasa ketergantungan antar aktor perlunya pemberdayaan terutama SDM, budaya dan mainset yang sama agar memahami Proporsionalitas dan Kelemahan tiap aktor untuk ambil bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam mengembangkan Desa Wisata Harapan Jaya. Se jauh ini, masyarakat, pemerintah, akademisi, komunitas dan media masih belum terlalu eksis Dalam Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya maka dari itu perlunya menumbuhkan kesadaran antar aktor karena sejauh ini tingkat kesadaran kita dalam dunia pariwisata masih sangat rendah, masih saling bekerja sendiri (swadaya) karna menurut pengakuan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sendiri untuk meningkatkan saling ketergantungan terhadap aktor lain itu masih belum ada karena memang belum adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait namun pihak POKDARWIS juga tidak ingin dengan adanya ketergantungan terhadap

pihak lain; inovasi dan kreativitas mereka tidak berkembang.

### **Penyatuan Pemikiran Secara Konstruktif Untuk Mencapai Solusi**

Komponen yang kedua Menurut (Gray, 1989) untuk terciptanya sebuah kolaborasi yaitu melalui penyatuan pemikiran secara konstruktif untuk menyamakan visi & misi dan mendapatkan solusi dalam pengembangan. Desa Wisata Harapan Jaya sejauh ini masih sangat perlu di perhatikan dan memerlukan banyak ide serta inovasi dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Harapan Jaya, maka dari itu peran kolaborasi berbagai komponen sangat penting dalam upaya pengembangan desa wisata yang berbasis budaya untuk memberi masukan dan gagasan pola pikir yang kreatif dalam membangun sebuah kawasan desa wisata.

Namun sejauh ini dari hasil observasi penelitian, peneliti menjabarkan problem yang sering di temukan dalam membangun kolaborasi pariwisata dalam desa wisata Harapan Jaya, kurangnya kesadaran dalam bekerjasama dalam bidang pariwisata dengan aktor lain sehingga belum optimalnya kerjasama dalam menyatukan pola pikir dalam pengembangan desa wisata itu sendiri karena belum ada visi dan misi yang sama, maka dari itu partisipasi dari pihak lain tentu membawa dampak positif bagi pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya karena banyaknya partisipasi tentu akan menambah tingkat kepedulian terhadap pariwisata. Namun demikian tidak melupakan adanya dampak negatif juga, karna dalam menjalin kolaborasi tidak hanya modal tanda tangan di atas kertas saja, tetapi juga ada beban moral dan tanggung jawab serta tantangan yang di hadapi kedepannya, salah satunya adalah konsistennya aktor lain yang siap bekerjasama dan tantangan menyatukan pola pikir berbagai aktor karna tentunya dengan partisipasi yang banyak mempunyai pola pikir yang berbeda- beda, maka dari itu solusi untuk mengatasi berbagai konflik agar sejalan dengan apa yang di harapkan harus mengadakan pertemuan rutin minimal 1 kali dalam 2 minggu yang di adakan oleh pihak pariwisata, dengan adanya tatap muka akan menjalin silaturahmi berbagai komponen untuk saling sharing dan ngobrol santai untuk berbicara tentang perencanaan, pengeloan serta bagaimana kelanjutan program pariwisata untuk kedepannya untuk menyatukan pola pikir yang konstruktif berbagai komponen.

### **Keputusan Bersama Semua Aktor (*Joint Ownership of Decisions*)**

Konsep yang ketiga menurut (Gray, 1989) kolaborasi tercipta berdasarkan keputusan bersama antar aktor dalam penentuan kebijakan. Sejalan ini dari hasil observasi penelitian yang di lakukan di Desa Wisata Harapan Jaya sudah mulai terlihat dengan adanya

Musrenbang dalam pembangunan pariwisata dengan mengundang tokoh-tokoh, pihak kelurahan, dinas pariwisata, akademisi, media, dan swasta serta kalangan lain yang terlibat dalam Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran ini. Namun demikian, sejauh ini memang masih belum optimal dari segi pertemuan sehingga untuk pengambilan keputusan masih belum berdasarkan kesepakatan bersama, karena memang sejauh ini berjalan nya pariwisata hanya swadaya dan hanya beberapa komponen saja yang terlibat, maka dari itu pentingnya meningkatkan silaturahmi visi dan misi dalam dunia pariwisata sebagai pengoptimalan pengembangan dari Kolaborasi Desa Wisata Harapan Jaya.

Sejauh ini komunikasi yang kurang lancar menjadi penyebab kurang optimalnya pengambilan keputusan bersama semua aktor, karena kepedulian teradap dunia pariwisata masih perlu di tingkatkan maka dari itu pentingnya pertemuan tatap muka, selain untuk mempermudah komunikasi, salah satu upaya untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik antar komponen. Selanjutnya untuk Desa Wisata Harapan Jaya adalah lebih fokus terhadap musyawarah antar komponen dan aktor lain membuka rapat informal ataupun acara rapat formal sebagai wadah menampung masukan dan evaluasi untuk membangun kolaborasi yang optimal. Selain itu juga harus adanya keterbukaan informasi maupun menyampaikan masukan-masukan yang dapat di terima maupun yang tidak dapat di terima, untuk saling menghargai/menghormati antar pendapat aktor lain sehingga komunikasinya berjalan lancar dan kolaborasinya dapat terjalin dengan baik

### **Tanggung jawab bersama**

Keempat menurut (Gray, 1989) Konsep Kolaborasi merupakan bahwa pariwisata akan lagi hanya tanggung jawab dari satu pihak melainkan membangun tanggung jawab bersama antar berbagai pihak. Dari hasil penelitian observasi konsep tersebut sudah berjalan sesuai dengan kondisi lapangan. Namun demikian, untuk konsep tanggung jawab sejauh ini masih belum ada hukum yang mengikat artinya berdasarkan (MOU) kerjasama. Sejauh ini kerjasama dalam desa wisata hanya beberapa pihak saja yang terjalin kolaborasi karna memang pentingnya sosialisasi sebagai salah satu untuk meningkatnya orang-orang yang berpartisipasi dalam desa wisata Harapan Jaya. Menurut beberapa stakeholder yang bergerak dalam bidang pariwisata sejauh ini memang belum ada kerjasama yang secara resmi akan tetapi secara pribadi itu selalu

mensupport pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya demi kemajuan Desa Wisata kita. Dan sejauh ini profesionalitas dan tanggung jawab dari berbagai kalangan itu terlihat dan dibuktikan dengan sejauh ini masih satu visi untuk mengenalkan Desa Wisata dan masih bisa di arahkan sebagai patner kerja desa wisata, namun memang perlu proses yang sangat panjang karena Desa Wisata Harapan jaya masih punya pekerjaan rumah, untuk bisa mengenalkan Desa Wisata Harapan Jaya dan menjual produk-produk yang unik yang menjadi perhatian publik, walaupun dengan masalah anggaran yang masih minim akan tetapi sejauh ini pengembangan komitmen dan profesionalisme dari kawasan ramah kunjungan terus di angkat dan di optimalkan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan sementara dari Laporan Kemajuan ini adalah :

Demi meningkatkan Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya yang optimal perlu mendapatkan perhatian khusus, karena melihat dari rendahnya kesadaran kolektif berbagai aktor terhadap sikap abai, selalu menunggu arahan, dan kurangnya komunikasi antar aktor mengenai Desa Wisata Harapan Jaya . Rendahnya kemampuan pendanaan dan manajemen serta kreativitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam mengupayakan pembuatan produk- produk industri lokal kepariwisataan terutama menyangkut industri kerajinan tangan dan cendera mata juga mempengaruhi tingkat kurang optimalnya kolaborasi penthelix dalam pengembangan desa wisata Harapan Jaya

Namun demikian sejauh ini hadirnya desa wisata juga membawa dampak yang positif, pembukaan lapangan kerja baru, pelestarian lingkungan dengan kawasan yang berbudaya tradisional yang masih asri, walaupun sejauh ini dalam pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya masih belum sepenuhnya menjual keasrian lokalnya yang ada di kawasan Desa Wisata tersebut. Oleh karena itu, pentingnya Kolaborasi Model *Pentahelix*, dengan adanya keterlibatan Akademisi, Swasta, Komunitas, Pemerintah dan Media sangat lah penting untuk penunjang wisata kedepannya. namun sejauh ini ini untuk kerjasama itu masih belum optimal di ukur dari saling ketergantungan antar aktor, penyatuan pemikiran secara konstruktif, keputusan bersama, dan tanggung jawab bersama, hanya pihak-pihak tertentu saja yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, sehingga nantinya ada perjanjian ataupun regulasi secara khusus untuk mengatur komponen-komponen tersebut bisa bekerjasama secara resmi dalam mengupayakan Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan jaya

Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran ini

## **SARAN**

Adapun saran dan rekomendasi dari laporan kemajuan ini adalah

1. Adanya regulasi khusus sebagai faktor pendukung terjalinya kolaborasi *pentahelix*.
2. Adanya pertemuan-pertemuan, seminar, dengan memberikan pemahaman secara khusus bagaimana seharusnya Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata dan apa-apa saja keuntungan yang dapat diperoleh dari segi ekonomi sosial, budaya, dan lingkungan. Serta kerugian- kerugian yang diperoleh apabila tidak berjalannya dan berkembangnya program kepariwisataan di wilayah mereka.
3. Adanya program-program pembinaan berkelanjutan, seperti pendampingan dalam upaya pembuatan produk pariwisata unggulan, bantuan pendanaan yang memadai setelah melalui proses seleksi ketat agar berhasil guna dan tepat sasaran, membuat program-program pelatihan atau juga studi banding bagi beberapa orang pengelola ketempat kepariwisataan yang sudah maju baik dari segi SDM ataupun manajemennya.
4. Membuat jadwal kegiatan yang jelas, konsisten dan *sustainable* terhadap berbagai event-event kepariwisataan yang di koordinasikan dengan berbagai aktor *Pentahelix*, akademisi, swasta, komunitas, pemerintah, dan media sekaligus menjadi ajang promosi.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**D. STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas.

Penelitian ini merupakan penelitian tahun ke tiga, capaian dan status luaran adalah sebagai berikut:

Luaran Wajib : Dokumentasi uji coba produk (*Legal draft model/Naskah Akademik*) tahun ke 3

Luaran Tambahan : *1 artikel ilmiah yang telah submit pada Konferensi Internasional IICIS (International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies) dengan bukti LoA Konf internasional IICIS ini*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**E. PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPPT). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas.

Peran mitra di tahun ke tiga penelitian ini berupa pemberian data dan informasi berkenaan dengan penyelesaian penelitian dan produk/luaran penelitian. Pada prinsipnya realisasi kerjasama berlangsung sangat baik. Tim peneliti sedang melakukan kerjasama dalam penyusunan *legal draft model* Kolaborasi Aktor Pentahelix Dalam Pengembangan Industri Pariwisata di Propinsi Lampung.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Bersyukur pada ALLAH SWT, secara umum, tim peneliti tidak mendapat kendala dalam penyelesaian laporan kemajuan ini. Hanya saja pandemi covid 19 ini masih menjadi sedikit

hambatan dalam beraktifitas, dikarenakan status “*lockdown*” dan atau *work fome home dan atau PPKM* instansi yang dituju, Meskipun demikian tim bersyukur kendala tersebut tidak mengakibatkan tidak selesainya laporan kemajuan ini,dengan kata lain data-data penting berkenaan dengan penyelesaian laporan kemajuan tahun ke tiga ini berhasil diperoleh berkat kerja keras tim. Mengenai luaran jurnal internasional Tim telah berhasil menerbitkan artikel pada jurnal Internasional terindex DOAJ, yang telah tercapai pada pelaksanaan penelitian tahap 2 tahun anggaran 2020 yang lalu yakni jurnal IJRBS (*INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE* 9(7)(2020) 197-203. Selain itu di tahun ke 2 penelitian Tim telah berhasil menerbitkan Buku Ajar *Manajemen Pembangunan yang diterbitkan oleh Graha Ilmu. Sementara tahun ke 3 ini capaian yang telah diperoleh adalah Legal draft model/Naskah Akademik yang tentu saja masih memerlukan kajian mendalam dari para stakeholder dan submit artikel pada Konferensi Internasional IICIS yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2021 dibuktikan dengan diperolehnya LoA*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA:** Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Penelitian ini telah selesai di tahun ke tiga TA 2021, dan Tim berharap dapat kembali melanjutkan di Periode II tahun anggaran 2022-2024

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agranoff, Robert & Michael McGuire. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Ansell, Chris, & Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol.18 No.4, Hlm. 543-571.
- Carpenter. 1990. *Merriam-Webster Dictionary and Thesaurus*. Halaman Tersedia: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/collaboration>.
- Carrol, Archie B. 1991. *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*. Business Horizons.
- Friedman, Andrew L. dan Samantha Miles. 2006. *STAKEHOLDERS: Theory and Practice*. New York: Oxford University Press.
- Gunawan, Myra P., dan Helmi Himawan. 2010. *Penerapan Teknologi Informasi & Komunikasi dan Inovasi dalam Sistem Pengelolaan Destinasi*. Makalah pada Konferensi Nasional Destination Management Organization. Jakarta 5-8 Agustus.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat Sebuah Pendekatan Konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lindmark, A., Stureson, E., dan Ross. 2009. *Difficulties of Collaboration for Innovation*. Land University
- Liu, Juanita C. 1994. *Pacific Islands Ecotourism: A Public Policy and Planning Guide*. Hawai'i: The Pacific Business Center Program. College of Business Administration University of Hawai'i at Manoa, Honolulu USA.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rema Rosadakarya.
- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Dinata. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pitana, I Gde dan Putu G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2013. *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humaniaka.
- Rhama, Bhayu. 2019. *Taman Nasional dan Ekowisata*. Palangka Raya: Penerbit PT KANISIUS (Anggota IKAPI)
- Richardson, John I and Martin Fluker. 2004. *Understanding and Managing Tourism Australia*. NSW: Pearson Education.
- Satari, F. C., & Asad, N. (2016). *Model Strategi Pengembangan Wirausaha & Ekonomi Kreatif di Tingkat Kota (Pemetaan Per- Kecamatan) Bandung, dengan Pendekatan Ekosistem Ekonomi Kreatif, SWOT, Identifikasi Peran (Pentahelix) Stakeholders dan Rencana Aksi Implementasinya*. Bandung. Retrieved from [http://www.feb.unpad.ac.id/dokumen/files/01-Laporan\\_kemajuan\\_RFU\\_FINAL.pdf](http://www.feb.unpad.ac.id/dokumen/files/01-Laporan_kemajuan_RFU_FINAL.pdf)
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, CV.
- Yoeti, H. Oka A. 2016. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Penerbit PT Balai Pustaka (Persero).
- Wood & Gray, 1991. *Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus*. Halaman Tersedia: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/collaboration>.

Jurnal:

- Fairuza, Mia. 2017. "Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)". (Jurnal), 4-5(13), 13. halaman. Tersedia <http://www.jurnal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp27a31822dffull.pdf>. [28 Juli 2020].
- Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T. (2017). *The Pentahelix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City*. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 412-417. Halaman tersedia [https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber\\_th16-131\\_412-417.pdf](https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_th16-131_412-417.pdf). [9 Agustus 2021]
- Subiantoro, Jhevenda Rafael. 2019. *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Program One Village One Product Kendang Jimbe di Kota Blitar*. (Jurnal), 5 (15), 15 halaman. Tersedia <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/83427>. [20 Agustus 2021].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

PRODUK PENELITIAN



*LEGAL DRAFT MODEL*

NASKAH AKADEMIK

TENTANG

MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BAHARI MELALUI  
KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH  
DI PROPINSI LAMPUNG

*Sub judul tahun ke 3 : Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan  
Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran  
(penelitian tahun ke 3 dari rencana 3 tahun)*

oleh

Dr. Noverman Duadji, M.Si

Dra. Dian Kagungan, M.H

Intan Fitri Meutia, P.hD

*Dibiayai oleh ;*

*Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan  
Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi Nasional Sesuai  
dengan Kontrak Penelitian  
Nomor : 205/SP2H/LT/DRPM/2021*

UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2021

# NASKAH AKADEMIK

TENTANG

**MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA  
BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH  
DI PROPINSI LAMPUNG**

*“Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan Industri  
Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran”*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pariwisata di Propinsi Lampung tidak selesai jika berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, perguruan tinggi, masyarakat dan *media* harus saling *bersinergi*, sehingga potensi pariwisata dapat tergarap dengan maksimal. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersama membangun pariwisata Lampung, dan Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Tim Koordinasi lintas sektor sebagai upaya membangun pariwisata Lampung, dengan kata lain kolaborasi antar aktor pentahelix dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Propinsi Lampung sangatlah penting.

Peran penting Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan didasarkan bahwa pada pemikiran bahwa birokrasi memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala hal berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat suatu negara. Birokrasi juga berperan penting dalam melakukan berbagai tindakan antisipatif untuk menimalisasi berbagai dampak negatif, mengingat banyaknya potensi persoalan yang muncul dari kepariwisataan

Peran stakeholder terhadap pembangunan kepariwisataan juga tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, tidak terkecuali proses kolaboratif tata kelola pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung. Proses tatakelola pariwisata merupakan suatu proses ***adaptive system, dan beorientasi pada konsensus***. Berbasis 2 pakar, yaitu : Anshell dan Gash (2008) memetakan proses kolaboratif yang dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (***face to face dialogue***), membangun kepercayaan (trust building), membangun komitmen terhadap proses (***commitment to the process***), berbagi pemahaman (***shared understanding***), kemudian terbentuknya hasil sementara (***intermediate outcome***)

Kolaborasi model pentahelix dalam pengembangan pariwisata desa wisata di lihat dari parameter keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan desa wisata. Proses kolaboratif pariwisata dan tatakelola pariwisata, diasumsikan akan terjadi jika terpenuhinya beberapa syarat, (i). Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi sebenarnya adalah *citizen power*, (menurut Arnstein) (ii). Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, berarti tidak ada dominasi tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki dan terdapat rasa saling menghormati (iii). Terdapat aktor-aktor yang kompeten

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : bagaimakah kolaborasi antar aktor pentahelix dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran?

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan model kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran yang menjadi lokasi penelitian ini.

Manfaat penelitian ini adalah : meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran tepatnya di desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratay

#### 1.2 Tujuan Khusus

1. Menghasilkan model kebijakan pengembangan industri

- pariwisata melalui kebijakan kerjasama antar daerah di  
Propinsi Lampung,  
2. Menyusun naskah kebijakan Rancangan Peraturan  
Daerah Pariwisata  
3. Publikasi Jurnal Internasional  
4. Buku ajar (ISBN)

## **B. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

***Tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:***

1. Merumuskan kerangka kebijakan ***jalinan kerjasama yang sinergis/ kolaborasi antar aktor pentahelix*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota beserta stakeholder dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal

2. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang Model kebijakan ***jalinan kerjasama yang sinergis*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus, sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal

3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang ***jalinan kerjasama yang sinergis/kolaborasi antar aktor pentahelix*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota beserta stakeholder dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus, sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal

***Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah*** sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berdasarkan temuan persoalan dalam praktek tatakelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesawaran dalam hal ini adalah kebijakan ***jalinan kerjasama yang sinergis/kolaborasi antar aktor pentahelix*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota beserta stakeholder dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah studi lapang dan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil pengkajian dan dokumen pendukung lainnya.

## BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

### A. Kajian Teoritis

#### 2.1 Pengertian Pariwisata dan Industri Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas

serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan berarti keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. (Sedarmayanti, 2014)

Industri pariwisata: usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan, tujuan kepariwisataan, yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Menghapus kemiskinan.
- d. Mengatasi pengangguran.
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya.
- f. Memajukan kebudayaan.
- g. Mengangkat citra bangsa.
- h. Memupuk rasa cinta tanah air.
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Untuk mengembangkan kegiatan wisata daerah, tujuan wisata harus memiliki:

- a. Objek/atraksi dan daya tarik wisata.
- b. Transportasi dan infrastruktur.
- c. Akomodasi( tempat menginap).
- d. Usaha makanan dan minuman.
- e. Jasa pendukung lainnya (hal yang mnedukung kelancaran berwisata, misal: biro perjalanan, cinderamata, informasi, pemandu, kantor pos, bank, penukaran uang, internet, wartel, pulsa, salon, dan lain-lain). (Unesco, 2009).

#### 2.2 Konsep Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan

Da lam kehidupan di negara moderen saat ini, kegiatan pembangunan termasuk pembangunan kepariwisataan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik pula. Kebijakan yang baik dapat diilustrasikan seperti seorang dlrigen yang mengatur permainan sebuah orkestra yang terdiri dari banyak pemain musik dengan jenis alat musik yang berbeda-beda jenis, suara, dan wakyu memainkannya, sehingga menghasilkan sebuah lagu yang sangat indah. Dengan demikian setiap insan pariwisata, dan terlebih lagi para birokrat, baik di lingkungan Pemerintah maupun Pemrintahan daerah, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dalam kepariwisataan.

Ditinjau dari aspek kebutuhan praktis, pembahasan tentang teori-tori yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan seringkali tidak terlalu diprhatikan. Orang yang mendengar istilah "kebijakan pembangunan kepariwisataan" pada umumnya secara otomatis akan memfokuskan perhatiannya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam penggolongan kepariwisataan. Namun demikian, beberapa teori terkait dengan konsep dimaksud perlu diungkapkan dalam

tulisan ini karena membantu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan kepariwisataan. Ketika kita berbicara mengenai masalah kebijakan pembangunan kepariwisataan, maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian istilah "kebijakan" dan "pembangunan". Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, istilah "kebijakan" didefinisikan sebagai:

"(1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjad garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemeritahan , organisasi, dsb); pernyataan cita-cita , tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan."

Sementara itu dalam Kamus Merriam-webster, istilah "*policy*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kebijakan", diartikan sebagai aturan atau ide secara resmi di akui sebagai pedoman untuk menentukan pelaksanaan aktivitas: "*an offcially accepeted set of rules or idieas about what should be done*". Dengan demikian istilah "*policy*" atau "kebijakan" (khususnya definisi nommer 2) pada prinsipnya adalah parameter yang dijadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakan sebuah aktivitas. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah bahwa tidak dijelaskan secara tegas apakah "kebijakan" juga meliputi perturan perundang-undangan. Hal tersebut berbeda dengan istilah "*policy*" yang lebih jelas pengertiannya.

Definisi sederhana lainnya mengenai istilah tersebut adalah arah tindakan atau cara bertindak dipilih dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kondisi faktual, yang menentuka pengambilan keputusan dimasakini dan masa depan: "*A definite course or method of action selected from among alternatives and in the light on given conditions to guede and determine present and future decisions*". Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, menurut Edgell dan Swanson (2013), pemahaman mengenai kebijakan dibidang kepariwisataan akan menjadi lebih mudah jika dimulai dari definisi Thomas Dye mengenai "kebijakan publik", yaitu tindakan apapun melakukan atau tidak melakukan yang dipilih oleh pemerintah: "*whatever government choose to do or not to to*".

Sementara itu, istilah "pembangunan" diartikan sebagai suatu proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa (Sasmojo, 2004 : 1), tentunya ke arah yang lebih baik. Jika kemudian dikaitkan dengan kedua istilah tersebut dan istilah "kebijakan publik", maka "kebijakan pembangunan" akan memiliki pengertian sebagai *parameter yang secara resmi diakui yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman oleh Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi terwujudnya proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa ke arah yang lebih baik*.

Dalam bidang kepariwisataan, dikenal pula istilah dalam bahasa Inggris yaitu "*tourism policy*". Menurut Goeldner dan Ritchie (2009:414), istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

"*Tourism policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strategies taht provide a framework within which the collective and individual decisions directly affecting long-term tourism development and the daily activities within a destination are taken*".

Pendapat lain mengenai istilah ini diungkapkan pula oleh Paul S. Biederman (2008) didalam buku yang berjudul *Travel and Tourism: An Industry Primer*, yang menambahkan aspek sosial didalam kebijakan kepariwisataan:

"*A tourism policy defines the direction or course of action that a particular country, region, localty, or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The ker principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or localty) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of tourism policy is to improve the progress of the nation (region or localty) and the lives of its citizens.*"

Kedua definisi tersebut diatas memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan *tourism policy* atau yang penulis terjemahkan sebagai “kebijakan dibidang kepariwisataan” adalah berbagai macam aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata yang menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan dalam jangka pendek dan panjang. Kebijakan ini harus memberikan jaminan bahwa tujuan utamanya adalah membuat masyarakat yang bersangkutan yang tinggal didestinasinya pariwisata memperoleh keuntungan optimal dari kontribusi kepariwisataan dibidang sosial dan ekonomi dalam bentuk kemajuan dan kualitas hidup. Jika dikaitkan dengan konsep pembangunan, maka berarti aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata tersebut harus mengarah kepada perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa.

Edgell dan Swanson (2013) berpendapat bahwa pada intinya kebijakan dibidang kepariwisataan adalah setiap tindakan pemerintah baik di bidang legislatif, administratif, maupun yudisial yang berpengaruh terhadap kepariwisataan. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas pemasaran, perencanaan dan keberlanjutan. Menurut mereka bentuk kebijakan tersebut adalah berbagai pedoman (aturan), prinsip dan prosedur, yang disusun secara etis dan sifatnya fokus terhadap suatu persoalan serta mewakili harapan suatu masyarakat (atau bangsa) dalam hubungannya dengan aspek perencanaan, pembangunan, produk, jasa, pemasaran dan aspek keberlanjutannya.

#### 1.6 Konsep Sinergitas

Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Jadi sinergi dapat dipahami pula sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Covey dalam Kurniawan & Suryawati (2017:40) mendefinisikan sinergitas sebagai sebuah kombinasi antar unsur maupun antar bagian yang akan memperoleh keluaran yang lebih baik dari sebelumnya. Indikator dalam menganalisis sinergitas menurut pendapat doctoroff meliputi indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, serta kreativitas antar pihak terkait yang menjadi syarat utama bagi sebuah sistem sinergi yang ideal

Sofyandi & Garniwa dalam Rahmawati dkk (2014:643) mengemukakan bahwa Sinergitas dapat terbangun dengan baik melalui dua cara diantaranya

Komunikasi yang berorientasi pada sumber yang memandang bahwa komunikasi sebagai kegiatan dengan seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan, dan komunikasi yang berorientasi pada penerima yang memandang komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

Koordinasi

Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Dalam hal ini Silalahi dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan koordinasi sebagai bentuk integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam sebuah usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.

Moekijat dalam Rahmawati dkk (2014:643) menyebutkan terdapat 9 (sembilan) syarat utama dalam mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

10 Hubungan langsung yang akan mempermudah pencapaian melalui hubungan pribadi secara langsung

11 Kesempatan awal dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

12 Kontinuitas koordinasi yang harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan

13 Dinamisme, koordinasi harus terus menerus

14 Tujuan yang jelas untuk memperoleh koordinasi yang efektif.

15 Organisasi yang sederhana untuk memudahkan koordinasi yang efektif.

16 Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang akan mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan serta membantu dalam hal pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

17 Komunikasi yang efektif

18 Kepemimpinan supervisi yang efektif yang akan menjamin koordinasi kegiatan baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat evaluasi.

Sinergitas dalam pencapaian tujuan dapat terlaksana melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Konsep sinergitas merupakan upaya yang harus dilakukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan maupun non pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

### 1.7 *Konsep Model Pentahelix*

Model pentahelix pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arief Yahya yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan, memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran pengusaha, pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media.

Kotler et al dalam Saputri (2020:24) menyatakan bahwa destinasi wisata akan mendapatkan sebuah keunggulan dalam bersaing apabila masing-masing dari organisasi yang terlibat dapat berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sumber daya lain yang dapat mendukung proses pengembangan pariwisata. Dalam hal ini model pentahelix berfokus pada 5 unsur yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata diantaranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut.

### 1.8 *Peran Aktor Pentahelix*

Pengelolaan sektor pariwisata tidak terlepas dari peran stakeholder dalam proses pengembangannya. Terdapat 5 (lima) aktor yang ikut berkontribusi secara aktif dalam proses pengembangan sektor pariwisata, diantaranya

#### f. Pemerintah

Dalam proses pengembangan sektor pariwisata, pemerintah berperan dalam proses penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung perkembangan pariwisata, menyiapkan kebijakan maupun peraturan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, memberikan fasilitas yang memadai dan melakukan kegiatan promosi serta pemasaran destinasi wisata tersebut. Peran pemerintah dalam pembuat kebijakan maupun regulasi dibidang pariwisata akan mempengaruhi proses pengembangan pariwisata tersebut. Pemerintah juga berperan secara langsung didalam pengembangan regulasi dibidang pariwisata, mengendalikan proses pengembangan pariwisata, serta berperan langsung dalam memperkuat kelembagaan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam merumuskan kebijakan atau regulasi.

#### g. Akademisi

Akademisi dalam proses pengembangan pariwisata berperan dengan melakukan kajian ilmiah serta berbagai riset dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah. Hasil dari kajian ilmiah dan pengabdian masyarakat yang dilakukan para akademisi dapat dimanfaatkan untuk penunjang keberhasilan sektor pariwisata dengan melakukan kerjasama serta komunikasi dengan para akademisi dalam proses pengembangan agrowisata.

h. Dunia usaha

Dalam proses pengembangan pariwisata, dunia usaha atau swasta berperan penting dalam penyelenggaraan bisnis disektor pariwisata yang mengutamakan etika bisnis, profesional, bertanggung jawab serta berkelanjutan. Dunia usaha berperan sebagai *profit oriented* yang akan bertanggungjawab dalam keberlanjutan lingkungan sebagai hal yang sangat penting dalam sektor pariwisata.

i. Komunitas

Komunitas dalam proses pengembangan pariwisata terdiri dari masyarakat dan LSM atau NGO yang berperan mendukung sapta pesona dengan menyediakan jasa pariwisata atau ekonomi kreatif. Masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pengembangan pariwisata.

j. Media

Media berperan pada bidang informasi dan promosi pariwisata. Promosi dan pemasaran bidang pariwisata yang bersifat inklusif dengan memanfaatkan media sosial.

### ***Studi Pendahuluan yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai***

Hasil penelitian Kagungan, 2009 dan Yulia (2012) tentang Penataan Kawasan Industri Pariwisata pesisir Bandar Lampung berbasis *Integrated Coastal Zone Management* menyimpulkan keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir menjadi kawasan industri pariwisata yang "*layak jual*" mencakup 4 (empat) aspek (i) keterpaduan wilayah/ekologis (ii) keterpaduan sektor (iii) keterpaduan disiplin ilmu (iv) keterpaduan *stakeholder*.

Hasil penelitian dan kajian Neta (2012) dan Ratnasari (2014) menyimpulkan bahwa dari sisi pemberdayaan masyarakat, penataan kawasan industri pariwisata pesisir Bandar Lampung akan sangat menguntungkan para nelayan di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini berada pada posisi *regulator* dan penyedia *infrastruktur* jika dipaksakan sebagai pengelola kawasan, dikhawatirkan terbuka peluang penyimpangan. Oleh karena itu dalam pengelolaan kawasan pesisir Bandar Lampung menjadi kawasan industri pariwisata yang handal dan layak jual patut mempertimbangkan keterlibatan dan peran serta para *stakeholders* lainnya.

Menurut kajian kami sebagai peneliti, model kebijakan pengembangan industri pariwisata berbasis kearifan lokal melalui kebijakan kerjasama antar daerah di Propinsi Lampung yang akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat harus memiliki ***tema sentral*** sebagai sesuatu yang layak jual. Tema sentral perlu dipilih dan ditetapkan agar dari sisi *marketing* kawasan pesisir menjadi lebih layak jual. Terlebih anggaran pembangunannya bukan hanya berasal dari pemerintah tetapi juga berasal dari kalangan investor yang membutuhkan ***value added*** ketika memilih berinvestasi di kawasan pesisir.

Selanjutnya hasil penelitian Putra, Rizki (2019) dan ***Kagungan, Duadji. Noverman dan Meutia (2019)*** secara umum menyimpulkan bahwa : Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus meliputi :

***a. Daya Tarik (attraction)***

*Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam penatakelolaan area wisata menuju industri pariwisata berbasis kearifan lokal dilakukan melalui program **One Village One Destination (satu desa satu destinasi wisata)**. Pemerintah Kabupaten Pesawaran berusaha mengembangkan desa-desa di Pesawaran untuk dijadikan sebagai destinasi*

wisata. Dari 148 desa di Pesawaran saat ini sudah 50 desa yang mengembangkan destinasi wisata, selanjutnya akan dipilih 16 desa yang berdaya saing dengan destinasi unggulannya. Dimana nantinya setelah terpilih 16 besar, dari ke 16 desa tersebut dalam skala even baik propinsi maupun nasional.

Melalui program *one village one destination* diharapkan dapat menyuguhkan daya tarik wisata sesuai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Meskipun demikian, Pemerintah setempat tetap perlu membenahi fasilitas-fasilitas pendukung, antara lain ketersediaan toko-toko atau gerai-gerai penjual suvenir, fasilitas rumah makan bagi pengunjung, dan sarana pendukung lainnya.

#### ***b.Accessible***

Strategi pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memenuhi kebutuhan wisatawan mendapatkan kemudahan aksesibilitas (*accessible*) antara lain akan ditingkatkannya kualitas angkutan umum sejak tahun 2017-2021, pengembangan prasarana telekomunikasi (pengembangan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan mikro mempergunakan jaringan kabel bawah laut sepanjang tahun 2017-2021.

Strategi pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan pariwisata secara umum sudah baik (prasarana informasi dan sistem telekomunikasi telah tersedia) namun yang perlu dibenahi adalah prasarana transportasi, beberapa ruas jalan tanah yang masih menjadi kendala, juga terjadinya kemacetan apabila hari libur tiba. Tentunya hal ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pesawaran khususnya, agar aksesibilitas objek-objek wisata di kawasan Kecamatan Teluk Pandan menjadi lebih baik lagi.

#### ***c.Amenittis***

Salah satu syarat daerah tujuan wisata (DTW) adalah fasilitas dari objek wisata, antara lain fasilitas penginapan, MCK, dan fasilitas parkir. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesawaran maupun Kabupaten Tanggamus telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik antara lain, penyediaan fasilitas penginapan, tempat peristirahatan bagi wisatawan, sarana parkir yang luas dan representatif, restaurant, dan sarana MCK yang cukup memadai bagi wisatawan.

#### ***d.Ancillary (lembaga pengelola)***

Lembaga pengelola yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah, pengelola objek wisata dan investor.

### **Selanjutnya, hasil penelitian Duadji, Kagungan dan Meutia (2020) menyimpulkan :**

Secara umum strategi pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

#### **1. daya tarik**

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mengelola kawasan pariwisata menuju industri pariwisata berbasis kearifan lokal dilakukan melalui program One Village One Destination. Pemerintah Kabupaten Pesawaran sedang mencoba untuk menjadikan desa- desa di Kabupaten Pesawaran sebagai tujuan wisata. Dari 148 desa di Kabupaten Pesawaran saat ini 50 desa telah mengembangkan destinasi wisata, kemudian akan dipilih

16 desa berdaya saing dengan destinasi unggulannya. Dimana kedepannya setelah 16 besar terpilih, dari 16 desa dalam skala event baik provinsi maupun nasional. Program OVOD (*one village one destination*) diharapkan dapat menghadirkan tempat-tempat wisata yang sesuai dengan potensi daerahnya. Industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal menjadi salah satu daya tarik agar wisatawan ingin berkunjung ke sana. Selain menarik wisatawan, daya tarik suatu destinasi pariwisata juga dibutuhkan untuk menarik investor. Prasyarat agar industri kepariwisataan berfungsi dengan baik adalah daya tarik investasi, karena untuk memastikan efektivitas setiap bidang kegiatan ekonomi perlu memiliki sumber daya, sedangkan alokasi dana publik tidak sepenuhnya menutupi pemeliharaan dan pengembangannya. (Kozmenko et al., 2015)

Daya tarik investasi dari sektor pariwisata merupakan kombinasi dari faktor mikro dan tingkat makro yang membantu calon investor membentuk gambaran umum daerah tersebut dan memberikan kesempatan untuk menilai daya tariknya. Daya tarik investasi bergantung pada faktor-faktor berikut: tingkat sosial ekonomi, perkembangan objek penelitian, kegiatan investasi; tingkat perkembangan kepariwisataan, khususnya dinamika arus wisata, penyediaan prasarana wisata, ketersediaan sumber daya investasi dan lain-lain(Kozmenko et al., 2015).Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan fasilitas pendukung, antara lain ketersediaan toko atau toko souvenir, fasilitas restoran bagi pengunjung, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pernyataan dan Daya Saing (2010) Pariwisata berkontribusi pada aktivitas di hampir setiap industri di seluruh perekonomian. Proses dimana konsumen (pengunjung) datang ke produk (tujuan), mengkonsumsi produk pariwisata yang dapat diidentifikasi dan juga menimbulkan biaya hidup sehari-hari di tempat tujuan tersebut adalah unik di antara pasar barang dan jasa yang diperdagangkan. Sifat produk dan jasa yang sangat luas yang dikonsumsi oleh wisatawan menghadirkan masalah-masalah tertentu yang tidak umum terjadi di pasar produk lain. Selain itu, pariwisata memiliki pengaruh sosial di berbagai bidangseperti kejahatan, kesehatan, kemacetan, harga tanah dan lainnya, serta fasilitas perkotaan.

## 2. Dapat diakses

Pariwisata yang dapat diakses adalah bentuk pariwisata yang melibatkan proses

kolaboratif antara pemangku kepentingan yang memungkinkan orang-orang dengan persyaratan akses, termasuk mobilitas, penglihatan, pendengaran dan dimensi kognitif akses, untuk berfungsi secara mandiri dan dengan kesetaraan dan martabat melalui penyampaian yang dirancang secara universal (Pernyataan & Daya Saing, 2010) produk, jasa dan lingkungan pariwisata (Buhalis & Darcy, 2012). Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memenuhi kebutuhan wisatawan akan kemudahan aksesibilitas meliputi peningkatan kualitas angkutan umum sejak tahun 2017-2021, pembangunan infrastruktur telekomunikasi (pengembangan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan mikro dengan menggunakan jaringan kabel bawah laut sepanjang tahun 2017-2021. Kabupaten Pesawaran Strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata umumnya sudah baik (infrastruktur informasi dan sistem telekomunikasi tersedia) namun yang perlu dibenahi adalah infrastruktur transportasi, beberapa jalan tanah yang masih menjadi kendala, dan kemacetan saat hari raya terjadi tentunya menjadi tanggung jawab Kabupaten Pesawaran. pemerintah pada khususnya, sehingga aksesibilitas objek wisata di Kecamatan Teluk Pandan menjadi lebih baik.

### 3. Menittis

Menurut Carlsen dan Butler (2011) Ada empat strategi utama yang digunakan oleh lembaga taman untuk mengendalikan dan mengelola wisata bahari; ini termasuk strategi regulasi, fisik (yaitu infrastruktur), pendidikan dan ekonomi. atraksi, antara lain fasilitas penginapan, toilet, dan fasilitas parkir. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik antara lain jumlah fasilitas penginapan, tempat istirahat bagi wisatawan, fasilitas parkir yang luas dan representatif, restoran, serta fasilitas toilet yang memadai bagi wisatawan.

### 4. Insillary

Kelembagaan pengelolaan yang dimaksud disini adalah pemerintah, pengelola objek wisata dan investor. Berdasarkan uraian di atas maka strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus dalam pengelolaan industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. , yang umumnya bertujuan:

- a) Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan berkelanjutan
- b) Menata perencanaan pembangunan daerah yang terencana dengan baik
- c) Promosi potensi daerah
- d) Mengoptimalkan kekayaan alam wilayah
- e) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- f) Menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat lokal
- g) Mendukung pembangunan daerah, provinsi dan nasional

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di masing-masing Kabupaten melibatkan peran investor, baik pihak swasta maupun pihak lainnya. Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan menjadi obyek wisata terpadu (integrated area tourism) antara wisata alam, wisata budaya hingga pertemuan, insentif, konferensi dan pameran (MICE) pariwisata.

### KESIMPULAN

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sendiri tengah menyiapkan skema percepatan pemulihan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif di Provinsi Lampung setelah pandemi COVID-19. Dengan beberapa skema salah satunya menyiapkan pariwisata berwawasan lingkungan, berwawasan kesehatan, serta berwawasan keamanan sebagai upaya membangun kembali sektor pariwisata. Pemerintah Provinsi Lampung Kabupaten/Kota bersinergi dalam menangani dan membangun kembali industri pariwisata dari dampak Covid-19,

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan tiga tahapan untuk merespon dampak Covid-19 yaitu tanggap darurat, pemulihan (recovery), dan normalisasi. Di tahap tanggap darurat, memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan untuk menyiapkan akomodasi, makanan, hingga transportasi. Selain itu berkoordinasi dengan K/L dan berbagai pihak terkait dalam

mengambil langkah-langkah untuk mendukung industri atau pelaku pariwisata Indonesia. Pada tahap kedua yaitu pemulihan, Kemenparekraf akan berkoordinasi dengan K/L lain untuk mengidentifikasi dampak secara detail akibat wabah Covid-19.

Secara resmi pemerintah Lampung belum mengeluarkan kebijakan strategi di bidang pariwisata terdampak covid-19. Pemerintah daerah dalam hal ini masih mengikuti kebijakan Nasional yang di buat oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun semua pariwisata di Indonesia menurut Wishnutama selaku Mentri Pariwisata dan ekonomi kreatif akan menerapkan strategi yang berfokus pada memperbaiki hal dasar terkait higienitas, keselamatan, dan keamanan, serta mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar, halitu pula yang nantinya akan di terapkan oleh pemerintah Propinsi Lampung agar masyarakat tidak lagi khawatir tentang kebersihan pariwisata dan lebih merasa aman saat melakukan wisata di daerah tersebut.

Saran/rekomendasi yang penting dari hasil penelitian ini adalah :

a. Pentingnya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap obyek wisata “baru” air terjun Way lalaan dan pantai Terbaya yang sangat berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten tersebut tanpa mengabaikan peran sertakelompok sadar wisata dan masyarakat lokal

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok sadar wisata melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan baik melalui pelatihan, bantuan anggaran dan evaluasi rutin kegiatan pokdarwis, dalam rangka membangkitkan kembali gairah pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan kabupaten Lampung Selatan seiring menyambut eranew normal dan tetap menerapkan standar operating procedure covid 19 demi keselamatan pengelola dan pengunjung

c. Strategi pengembangan pariwisata di Propinsi Lampung harus menerapkan strategi yang berfokus pada memperbaiki hal dasar terkait higienitas, keselamatan, dan keamanan, serta mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar.

d. Pentingnya strategi inovasi untuk terus berkreasi dalam rangka mengembangkan industri pariwisata di Propinsi Lampung selain pemanfaatan website desa wisata, jalinan kerjasama dengan stakeholder, penguatan peran kelembagaan kelompok sadar wisata

e. Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah harus seiring sejalan dengan dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung, agar tidak terkesan pengembangan industri pariwisata daerah di Propinsi Lampung berjalan sendiri-sendiri

f. Kebijakan pariwisata yang perlu diperkuat, antara lain dukungan kepada industri dan pelaku

pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), dukungan anggaran, subsidi pendidikan pariwisata, penguatan SOP Mitigasi Pariwisata, prioritas pada pembenahan destinasi, meningkatkan peran pokdarwis di desa wisata sebagai tim gugus desa yang dibina oleh Kemenparekraf cq Dinas Pariwisata Kab Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan Lampung Selatan, dan penguatan regulasi masuknya wisatawan mancanegara

Luaran yang telah dicapai dari hasil penelitian tahap 2 tahun 2020 :

1. Legal draft model
2. Artikel Ilmiah yang telah di submit pada Jurnal terindex
4. Buku Referensi dalam proses ISBN

## **Hasil**

### ***Kolaborasi Model Pentahelix dan Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya***

Pada tahap Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata

Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay parameter yang dilihat adalah bagaimana keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan di desa wisata Harapan Jaya dan menciptakan nilai tambah produk pariwisata yang menggambarkan karakteristik ciri khas atas keunikan produk dari desa wisata Harapan Jaya yang membedakan dari pariwisata lainnya. Karakteristik ciri khas produk pariwisata yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan potensi desa wisatanya seperti pengelolaan usaha-usaha kerajinan lokal yang menjadi ciri khas budaya daerah, destinasi wisata air terjun, pengelolaan usaha kuliner khas daerah, pengelolaan usaha penginapan, dan juga pengelolaan usaha berupa warung dan toko-toko untuk kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari.

### **Saling Ketergantungan**

Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Saling Ketergantungan adalah salah satu tolak ukur untuk melihat optimalnya sebuah pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya, Menurut (Grey, 1989) dalam melihat terciptanya kolaborasi salah satunya melalui komponen saling ketergantungan dalam dunia pariwisata. Maka dari itu dalam sebuah penelitian ini peneliti menuliskan menurut hasil observasi penelitian Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya masih belum sepenuhnya optimal sesuai dengan teori saling ketergantungan, yang dimana menurut stakeholder pariwisata untuk menumbuhkan rasa ketergantungan antar aktor perlunya pemberdayaan terutama SDM, budaya dan mainset yang sama agar memahami Proporsionalitas dan Kelemahan tiap aktor untuk ambil bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam mengembangkan Desa Wisata Harapan Jaya. Sejauh ini, masyarakat, pemerintah, akademisi, komunitas dan media masih belum terlalu eksis Dalam Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya maka dari itu perlunya menumbuhkan kesadaran antar aktor karena sejauh ini tingkat kesadaran kita dalam dunia pariwisata masih sangat rendah, masih saling bekerja sendiri (swadaya) karna menurut pengakuan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sendiri untuk meningkatkan saling ketergantungan terhadap aktor lain itu masih belum ada karena memang belum adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait namun pihak POKDARWIS juga tidak ingin dengan adanya ketergantungan terhadap pihak lain; inovasi dan kreativitas mereka tidak berkembang.

### **Penyatuan Pemikiran Secara Konstruktif Untuk Mencapai Solusi**

Komponen yang kedua Menurut (Gray, 1989) untuk terciptanya sebuah kolaborasi yaitu melalui penyatuan pemikiran secara konstruktif untuk menyamakan visi & misi dan mendapatkan solusi dalam pengembangan. Desa Wisata Harapan Jaya sejauh ini masih sangat perlu di perhatikan dan memerlukan banyak ide serta inovasi dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Harapan Jaya, maka dari itu peran kolaborasi berbagai komponen sangat penting dalam upaya pengembangan desa wisata yang berbasis budaya untuk memberi masukan dan gagasan pola pikir yang kreatif dalam membangun sebuah kawasan desa wisata.

Namun sejauh ini dari hasil observasi penelitian, peneliti menjabarkan problem yang sering di temukan dalam membangun kolaborasi pariwisata dalam desa wisata Harapan Jaya, kurangnya kesadaran dalam bekerjasama dalam bidang pariwisata dengan aktor lain sehingga belum optimalnya kerjasama dalam menyatukan pola pikir dalam pengembangan desa

wisata itu sendiri karena belum ada visi dan misi yang sama, maka dari itu partisipasi dari pihak lain tentu membawa dampak positif bagi pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya karena banyaknya partisipasi tentu akan menambah tingkat kepedulian terhadap pariwisata. Namun demikian tidak melupakan adanya dampak negatif juga, karna dalam menjalin kolaborasi tidak hanya modal tanda tangan di atas kertas saja, tetapi juga ada beban moral dan tanggung jawab serta tantangan yang di hadapi kedepannya, salah satunya adalah konsistennya aktor lain yang siap bekerjasama dan tantangan menyatukan pola pikir berbagai aktor karna tentunya dengan partisipasi yang banyak mempunyai pola pikir yang berbeda- beda, maka dari itu solusi untuk mengatasi berbagai konflik agar sejalan dengan apa yang di harapkan harus mengadakan pertemuan rutin minimal 1 kali dalam 2 minggu yang di adakan oleh pihak pariwisata, dengan adanya tatap muka akan menjalin silaturahmi berbagai komponen untuk saling sharing dan ngobrol santai untuk berbicara tentang perencanaan, pengelolaan serta bagaimana kelanjutan program pariwisata untuk kedepannya untuk menyatukan pola pikir yang konstruktif berbagai komponen.

### **Keputusan Bersama Semua Aktor (*Joint Ownership of Decisions*)**

Konsep yang ketiga menurut (Gray, 1989) kolaborasi tercipta berdasarkan keputusan bersama antar aktor dalam penentuan kebijakan. Se jauh ini dari hasil observasi penelitian yang di lakukan di Desa Wisata Harapan Jaya sudah mulai terlihat dengan adanya Musrenbang dalam pembangunan pariwisata dengan mengundang tokoh-tokoh, pihak kelurahan, dinas pariwisata, akademisi, media, dan swasta serta kalangan lain yang terlibat dalam Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran ini. Namun demikian, se jauh ini memang masih belum optimal dari segi pertemuan sehingga untuk pengambilan keputusan masih belum berdasarkan kesepakatan bersama, karena memang se jauh ini berjalan nya pariwisata hanya swadaya dan hanya beberapa komponen saja yang terlibat, maka dari itu pentingnya meningkatkan silaturahmi visi dan misi dalam dunia pariwisata sebagai pengoptimalan pengembangan dari Kolaborasi Desa Wisata Harapan Jaya.

Se jauh ini komunikasi yang yang kurang lancar menjadi penyebab kurang optimalnya pengambilan keputusan bersama semua aktor, karena kepedulian teradap dunia pariwisata masih perlu di tingkatkan maka dari itu pentingnya pertemuan tatap muka, selain untuk mempermudah komunikasi, salah satu upaya untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik antar komponen. Selanjutnya untuk Desa Wisata Harapan Jaya adalah lebih fokus terhadap musyawarah antar komponen dan aktor lain membuka rapat informal ataupun acara rapat formal sebagai wadah menampung masukan dan evaluasi untuk membangun kolaborasi yang optimal. Selain itu juga harus adanya keterbukaan informasi maupun menyampaikan masukan-masukan yang dapat di terima maupun yang tidak dapat di terima, untuk saling menghargai/menghormati antar pendapat aktor lain sehingga komunikasinya berjalan lancar dan kolaborasinya dapat terjalin dengan baik

### **Tanggung jawab bersama**

Keempat menurut (Gray, 1989) Konsep Kolaborasi merupakan bahwa pariwisata bukan lagi hanya tanggung jawab dari satu pihak melainkan

membangungun tanggung jawab bersama antar berbagai pihak. Dari hasil penelitian observasi konsep tersebut sudah berjalan sesuai dengan kondisi lapangan. Namun demikian, untuk konsep tanggung jawab sejauh ini masih belum ada hukum yang mengikat artinya berdasarkan (MOU) kerjasama. Sejauh ini kerjasama dalam desa wisata hanya beberapa pihak saja yang terjalin kolaborasi karena memang pentingnya sosialisasi sebagai salah satu untuk meningkatnya orang-orang yang berpartisipasi dalam desa wisata Harapan Jaya. Menurut beberapa stakeholder yang bergerak dalam bidang pariwisata sejauh ini memang belum ada kerjasama yang secara resmi akan tetapi secara pribadi itu selalu mensupport pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya demi kemajuan Desa Wisata kita. Dan sejauh ini profesionalitas dan tanggung jawab dari berbagai kalangan itu terlihat dan dibuktikan dengan sejauh ini masih satu visi untuk mengenalkan Desa Wisata dan masih bisa di arahkan sebagai patner kerja desa wisata, namun memang perlu proses yang sangat panjang karena Desa Wisata Harapan jaya masih punya pekerjaan rumah, untuk bisa mengenalkan Desa Wisata Harapan Jaya dan menjual produk-produk yang unik yang menjadi perhatian publik, walaupun dengan masalah anggaran yang masih minim akan tetapi sejauh ini pengembangan komitmen dan profesionalisme dari kawasan ramah kunjungan terus di angkat dan di optimalkan.

**BAB III**  
**ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**YANG RELEVAN**

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Naskah Akademik ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
4. Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
6. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5262
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepariwisata
10. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 20)
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran
12. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2019 Tentang Desa Wisata : One Village One Destination
13. Bappeda Kabupaten Pesawaran. 2019. Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kepariwisata
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung
16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Bahari dan Warisan Budaya di Kabupaten Pesawaran

17.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Pantai, Kuliner dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pesawaran

**BAB IV**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI PERATURAN DAERAH**

Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten tentang Kepariwisataaan ditujukan untuk memberikan landasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sekaligus pengembangan kepariwisataaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta terwujudnya pengelolaan kepariwisataaan daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

A.Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dengan tujuan rekreasi
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang dilakukan oleh pengusaha, masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
7. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan pariwisata
8. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi tujuan wisata adalah kawasan geografi yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dalam kegiatan pariwisata
9. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai Undang-Undang
10. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah. Pemerintah daerah, dan pengusaha
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan baran/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata

12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/jasa guna pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
14. Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
15. Sapta pesona adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan
16. *Innovative Government* adalah Pemerintah Daerah yang memiliki inovasi menonjol di bidang tatakelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah
17. *Good Governance* (pemerintahan yang baik) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat
18. Kerjasama antar daerah diartikan suatu bentuk
  - kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota, atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
19. Model Pentahelix adalah model yang berfokus pada 5 unsur yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata
  - diantaranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut.
20. Sinergitas adalah sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Jadi sinergi dapat dipahami pula sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Covey dalam Kurniawan & Suryawati (2017:40) mendefinisikan sinergitas sebagai sebuah kombinasi antar unsur maupun antar bagian yang akan memperoleh keluaran yang lebih baik dari sebelumnya.

B. Materi yang akan diatur dalam Naskah Akademik ini adalah penormaan tentang :

1. Pelaksanaan model kebijakan pengembangan industri pariwisata yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
2. Tahapan penilaian meliputi bidang:
  - a. Penilaian aspek – aspek kebijakan tentang pengembangan kawasan wisata Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung
  - b. Rumusan payung hukum tentang kebijakan pengembangan industri Pariwisata di Kabupaten Pesawaran
  - c. Penilaian perumusan *draft* Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesawaran

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi/Kabupaten.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Demi meningkatkan Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya yang optimal perlu mendapatkan perhatian khusus, karena melihat dari rendahnya kesadaran kolektif berbagai aktor terhadap sikap abai, selalu menunggu arahan, dan kurangnya komunikasi antar aktor mengenai Desa Wisata Harapan Jaya . Rendahnya kemampuan pendanaan dan manajemen serta kreativitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam mengupayakan pembuatan produk- produk industri lokal kepariwisataan terutama menyangkut industri kerajinan tangan dan cenderung mata juga mempengaruhi tingkat kurang optimalnya kolaborasi penthelix dalam pengembangan desa wisata Harapan Jaya

Namun demikian sejauh ini hadirnya desa wisata juga membawa dampak yang positif, pembukaan lapangan kerja baru, pelestarian lingkungan dengan kawasan yang berbudaya tradisional yang masih asri, walaupun sejauh ini dalam pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya masih belum sepenuhnya menjual keasrian lokalnya yang ada di kawasan Desa Wisata tersebut. Oleh karena itu, pentingnya Kolaborasi Model *Pentahelix*, dengan adanya keterlibatan Akademisi, Swasta, Komunitas, Pemerintah dan Media sangat lah penting untuk penunjang wisata kedepannya. namun sejauh ini ini untuk kerjasama itu masih belum optimal di ukur dari saling ketergantungan antar aktor, penyatuan pemikiran secara konstruktif, keputusan bersama, dan tanggung jawab bersama, hanya pihak-pihak tertentu saja yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, sehingga nantinya ada perjanjian ataupun regulasi secara khusus untuk mengatur komponen-komponen tersebut bisa bekerjasama secara resmi dalam mengupayakan Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran ini

### **SARAN**

1. Adanya regulasi khusus sebagai faktor pendukung terjalannya kolaborasi *Pentahelix*
2. Program pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan, sangat penting untuk dilakukan, terutama berkaitan dengan pembinaan terhadap pengolahan dan pemasaran produk unggulan destinasi wisata setempat, termasuk bantuan anggaran
3. Koordinasi secara berkelanjutan bersama aktor-aktor *pentahelix* dalam pelaksanaan berbagai event pariwisata

**LAMPIRAN MATERI NASKAH AKADEMIK**

**MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BAHARI MELALUI  
KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH  
DI PROPINSI LAMPUNG**

***“Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan  
Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran”***

***LEGAL DRAFT***

**TENTANG**

**MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BAHARI  
MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA  
ANTAR DAERAH DI PROPINSI LAMPUNG**

***“Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan Industri  
Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran”***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KONSIDERAN**

- Menimbang :
- (1) bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
  - (2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI PROPINSI LAMPUNG

**KONSIDERAN**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
4. Pasal 4 (ayat 1) Undang –Undang Dasar Negara Tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
6. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5262
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepariwisata
10. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 20
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran

# **Pentahelix Model Collaboration in Tourism Industry Development Policy in Pesawaran Regency**

Dian Kagungan<sup>1</sup>, Noverman Duadji<sup>2</sup>, IntanFitri Meutia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Lecturer majoring in State Administration FISIP Lampung University

Email : [dian.kagungan@fisip.unila.ac.id](mailto:dian.kagungan@fisip.unila.ac.id)

## **ABSTRACT**

The long-term goal of this research is to produce a model pentahelix collaboration in tourism development in the tourist village of Harapan Jaya, Way Ratay District, Pesawaran Regency. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, primary data collected through interviews and FGDs on key informants relevant to this research study. The collaboration of the pentahelix model in the tourism development of the Harapan Jaya tourism village is seen from the parameters of the involvement of various actors to work together in optimizing the development of the Harapan Jaya tourism village and creating added value for tourism products that illustrate characteristics of the unique products of the agro-tourism-based tourism village. The characteristics of the tourism product in question are those related to the potential of the tourism village, including coffee plantations, agriculture and local culinary products (home industry).

The important results and recommendations of this study are the collaboration of the Pentahelix model in the development of the Harapan Jaya Tourism Village needs special attention, and the lack of communication between actors regarding the Harapan Jaya tourism village. The low capacity of funding and management as well as the creativity of skilled human resources in seeking to manufacture local tourism industrial products, especially regarding the handicraft and souvenir industry, also affects the level of penthelix collaboration in the development of the Harapan Jaya tourism village is less than optimal.

However, so far the presence of the tourist village has also brought a positive impact, opening new jobs, preserving the environment with a beautiful area, so far the development of the Harapan Jaya Tourism Village has fully sold its local natural beauty, including waterfalls, and camping grounds as a source of energy. withdraw from the area. Therefore, the importance of the Pentahelix Model collaboration, with the involvement of Academics, Private, Community, Government and Media is very important to support tourism in the future, but so far this collaboration is still not optimal, measured from the interdependence between actors, the unification of ideas as a whole. constructive, shared decisions, and shared responsibility, only certain parties are involved in the collaboration,

**Key words:** *collaboration, pentahelix model, tourism, Pesawaran*

## **1. PRELIMINARY**

Tourism development in Lampung Province is not complete if it goes alone. The government, tourism business actors, universities, the community and the media must work together, so that tourism potential can be exploited to the maximum. The Lampung Province Tourism and Creative Economy Office invites all parties to jointly develop Lampung tourism, and the Lampung Provincial Government has formed a

cross-sector Coordination Team as an effort to develop Lampung tourism, in other words, collaboration between pentahelix actors in tourism industry development policies in Lampung Province is very important.

The important role of the Government and local governments in the field of tourism is based on the idea that the bureaucracy has the power to decide all matters relating to the survival of the people of a country. The bureaucracy also plays an important role in taking various anticipatory actions to minimize negative impacts, given the many potential problems that arise from tourism.

The role of stakeholders in tourism development also cannot be ignored in tourism development policies in Indonesia through empowerment activities carried out, including collaborative process of tourism governance in Pesawaran Regency, Lampung Province. The tourism governance process is a process ***adaptive system, and consensus oriented***. Based on 2 experts, namely: Anshell and Gash (2008) mapped out a collaborative process starting with face-to-face dialogue, building trust, building commitment to the process, sharing

understanding (shared understanding), then the formation of an intermediate outcome (intermediate outcome)

The collaboration of the pentahelix model in the development of tourism village tourism is seen from the parameters of the involvement of various actors to work together in optimizing the development of tourist villages. The collaborative process of tourism and tourism management is assumed to occur if several conditions are met, (i). There is stakeholder participation. Participation is actually citizen power, (according to Arnstein) (ii). There is a condition where there is equality of power, meaning that there is no certain domination, every actor in dialogue is not hindered by hierarchical boundaries and there is mutual respect (iii). There are competent actors

The problem formulation of this research is: how is the collaboration between pentahelix actors in the tourism industry development policy in Pesawaran Regency?

The long-term goal of this research is to produce a pentahelix collaboration model in tourism development in the tourist village of Harapan Jaya, Way Ratay District, Pesawaran Regency which is the location of this research.

The benefits of this research are: improving the welfare of local communities in the policy of developing the tourism industry in Pesawaran Regency, precisely in Harapan Jaya village, Way Ratay District.

## **LITERATURE REVIEW**

### ***1.1. Concept of Tourism Development Policy***

In today's modern life, development activities, including tourism development, will not run well without a good policy. A good policy can be illustrated as a conductor who arranges the game of an orchestra consisting of many musicians with different types of musical instruments, sounds, and time to play them, so as to produce a very beautiful song. Thus, every tourism person, and even more so bureaucrats, both within the Government and regional governments, must have a deep understanding of the importance of formulating and implementing good policies in tourism.

Judging from the aspect of practical needs, discussions about theories related to development policies are often not given much attention. People who hear the term "tourism development policy" in general will automatically focus their attention on activities carried out by the Government and local governments in classifying tourism.

However, several theories related to the concept in question need to be disclosed in this paper because they help provide a deeper understanding of the activities that should be carried out by the Government and local governments in tourism management. When we talk about the problem of tourism development policy, it is necessary to first discuss the meaning of the terms "policy" and "development". "(1) cleverness; proficiency; wisdom; (2) a series of concepts and principles that become the outline and basis of plans in the implementation of a job, leadership, and ways of acting (regarding government, organization, etc.); a statement of ideals, goals, principles, or intentions as guidelines for management in an effort to achieve goals; direction."

Meanwhile in the Merriam-Webster Dictionary, the term "policy" which is translated into Indonesian as "policy", is defined as a rule or idea officially recognized as a guideline for determining the implementation of activities: "an officially accepted set of rules or ideas about what should be done". Thus, the term "policy" or "policy" (especially the definition number 2) in principle is a parameter that is used as the basis or guideline for carrying out an activity. The difference between the two terms is that it is not explicitly explained whether "policy" is also includes statutory regulations. This is different from the term "policy" which has a clearer meaning.

Another simple definition of the term is that the direction of action or method of action is chosen from various alternatives by considering the factual conditions, which determine current and future decision making: "A definite course or method of action selected from among alternatives and in the light on given conditions to guide" and determine present and future decisions". In relation to government duties, according to Edgell and Swanson (2013), understanding of policy in the field of tourism will be easier if it starts from Thomas Dye's definition of "public policy", namely any action to do or not to do that is chosen by the government: "whatever government" choose to do or not to do".

Meanwhile, the term "development" is defined as a process of change based on the wishes of a nation's society (Sasmojo, 2004: 1), of course for the better. If it is then associated with these two terms and the term "public policy", then "development policy" will have the meaning as an officially recognized parameter that is used as a basis or guideline by the Government to do or not do something for the realization of a change process based on the wishes of the government. a nation for the better.

In the field of tourism, the term in English is also known, namely "tourism policy". According to Goeldner and Ritchie (2009:414), the term is defined as follows: "Tourism policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strategies that provide a framework within which the collective and individual decisions directly affect long-term tourism development and the daily activities within a destination are taken".

Another opinion regarding this term is also expressed by Paul S. Biederman (2008) in a book entitled *Travel and Tourism: An Industry Primer*, which adds a social aspect to tourism policy: "*A tourism policy defines the direction or course of action that is a particular country, region, locality, or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The key principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of tourism policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and the lives of its citizens.*"

The two definitions above illustrate that what is meant by tourism policy or what the author translates as "policy in the field of tourism" are various kinds of rules,

strategies and targets for tourism development or promotion that become guidelines for decision making in the short and long term. This policy must ensure that the main goal is to make the people concerned who live in tourism destinations obtain optimal benefits from the contribution of tourism in the social and economic fields in the form of progress and quality of life. If it is associated with the concept of development, it means that the rules, strategies and objectives of the development or promotion of tourism must lead to changes based on the wishes of a nation's people.

Edgell and Swanson (2013) argue that in essence policy in the field of tourism is every government action in the legislative, administrative, and judicial fields that affect tourism. This includes marketing, planning and sustainability activities. According to them, the policy forms are various guidelines (rules), principles and procedures, which are structured ethically and are focused on an issue and represent the expectations of a society (or nation) in relation to aspects of planning, development, products, services, marketing and other aspects of development. sustainability.

## **1.2 Synergy Concept**

Najiyati and Rahmat in Rahmawati et al (2014:643) define synergy as a combination or combination of elements or parts that can produce better and greater output than before. So synergy can also be understood as a joint operation or a combination of elements to produce a better output. Covey in Kurniawan&Suryawati (2017:40) defines synergy as a combination between elements and between parts that will get a better output than before. Indicators in analyzing synergy according to doctoroff's opinion include indicators of effective communication, fast feedback, trust, and creativity between related parties which are the main requirements for an ideal synergy system.

Sofyandi&Garniwa in Rahmawati et al (2014: 643) suggest that synergy can be built properly in two ways including

Source-oriented communication which views communication as an activity with a person (source) actually moving stimuli to get a response, and receiver-oriented communication which views communication as all activities in which a person (receiver) responds to a stimulus or stimulus.

### **Coordination**

Communication cannot stand alone without coordination. In this case, Silalahi in Rahmawati et al (2014:643) defines coordination as a form of integration of individual activities and units into a joint effort, namely working towards a common goal.

Moekijat in Rahmawati et al (2014:643) states that there are 9 (nine) main requirements in realizing effective coordination, namely 10 Direct relationships that will facilitate achievement through direct personal relationships

- 19 Early opportunities in the early stages of planning and policy making.
- 20 Continuity of coordination that must take place at all times starting from the planning stage
- 21 Dynamism, coordination must be continuous
- 22 Clear goals to achieve effective coordination.
- 23 Simple organization to facilitate effective coordination.
- 24 Clear formulation of authority and responsibility that will reduce conflict between different employees and help in working with unity of purpose.
- 25 Effective communication

26 Effective supervisory leadership that will ensure the coordination of activities both at the planning level and at the evaluation level.

Synergy in achieving goals can be achieved through good communication and coordination. The concept of synergy is an effort that must be made in implementing government and non-government systems both at the central and regional levels.

### **1.3 Pentahelix Model Concept**

The pentahelix model was first launched by the Minister of Tourism and Creative Economy, Arief Yahya, which was then incorporated into the Regulation of the Minister of Tourism of the Republic of Indonesia Number 14 of 2016 concerning Guidelines for Sustainable Tourism Destinations that to create, ensure the quality of activities, facilities, services, and to create experiences and the value of tourism benefits in order to provide benefits and benefits to the community and the environment, it is necessary to encourage the tourism system through optimizing the role of entrepreneurs, government, society/community, academics and the media.

Kotler et al in Saputri (2020: 24) state that tourist destinations will gain a competitive advantage if each of the organizations involved can share knowledge, skills, expertise, and other resources that can support the tourism development process. In this case the pentahelix model focuses on 5 elements that support the implementation of tourism development including the government as a policy maker, academics as a transfer of knowledge and related research, the community or community as a social force, entrepreneurs as a force in market mechanisms and the media as a means of promoting tourism objects. the.

### **1.4 Pentahelix Actor Role**

The management of the tourism sector cannot be separated from the role of stakeholders in the development process. There are 5 (five) actors who actively contribute in the process of developing the tourism sector, including:

a. Government

In the process of developing the tourism sector, the government plays a role in the process of providing adequate facilities and infrastructure to support tourism development, preparing policies and regulations relating to the tourism sector, providing adequate facilities and carrying out promotional and marketing activities for these tourist destinations. The role of the government in making policy and regulations in the field of tourism will affect the tourism development process. The government also plays a direct role in the development of regulations in the field of tourism, controls the tourism development process, and plays a direct role in strengthening institutions in an effort to increase capacity and capability in formulating policies or regulations.

b. Academics

Academics in the tourism development process play a role by conducting scientific studies as well as various research and community services related to the development of the tourism sector in an area. The results of scientific studies and community service conducted by academics can be used to support the success of the tourism sector by collaborating and communicating with academics in the process of developing agro-tourism.

c. Business world

In the process of tourism development, the business or private sector plays an important role in conducting business in the tourism sector that prioritizes

business ethics, is professional, responsible and sustainable. The business world acts as a profit oriented that will be responsible for environmental sustainability as a very important thing in the tourism sector.

d. Community

The community in the tourism development process consists of the community and NGOs or NGOs whose role is to support SaptaPesona by providing tourism services or the creative economy. The community is both an object and a subject in the tourism development process.

e. Media

The media plays a role in the field of information and tourism promotion. Promotion and marketing in the tourism sector that is inclusive by utilizing social media.

## **METHOD**

The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, primary data collected through interviews and FGDs on key informants relevant to this research study. The data were analyzed through the stages of data reduction to drawing conclusions. The collaboration of the pentahelix model in the tourism development of the Harapan Jaya tourism village is seen from the parameters of the involvement of various actors to work together in optimizing the development of the Harapan Jaya tourism village and creating added value for tourism products that illustrate characteristics of the unique products of the agro-tourism-based tourism village. The characteristics of the tourism product in question are those related to the potential of the tourism village, including coffee plantations, agriculture and local culinary products (home industry).

## **RESULTS AND DISCUSSION**

Tourism development in Lampung Province is not complete if it goes alone. The government, tourism business actors, universities, the community and the media must work together, so that tourism potential can be exploited to the maximum. The Lampung Province Tourism and Creative Economy Office invites all parties to jointly develop Lampung tourism, and the Lampung Provincial Government has formed a cross-sector Coordination Team as an effort to develop Lampung tourism, in other words, collaboration between pentahelix actors in tourism industry development policies in Lampung Province is very important.

The important role of the Government and local governments in the tourism sector is based on the idea that the bureaucracy has the power to decide all matters relating to the survival of the people of a country. The bureaucracy also plays an important role in taking various anticipatory actions to minimize negative impacts, given the many potential problems that arise from tourism. This third year research took place in Pesawaran Regency, precisely in Harapan Jaya Village, Way Ratay District.

### ***Overview Of Way Ratay District, Pesawaran Regency***

Way Ratai District is one of the sub-districts located in the west of Pesawaran Regency and has an average distance of 40.32 km from the capital of Pesawaran Regency. Geographically, it is located in the south of Lampung Province with some areas in the form of hills, sloping plains, and the coast. Since its inauguration on November 2,

2007 based on Law no. 33 of 2007 in Pesawaran Regency has 11 sub-districts and 114 villages.

Pesawaran is the eleventh district in Lampung Province which was formed in 2007 based on Law no. 33 of 2007. Pesawaran Regency has its capital in GedongTataan, 27 km from Bandar Lampung. Pesawaran has 11 sub-districts and 144 villages. Way Ratai District is one part of the Pesawaran Regency area. To the north, Way Ratai District is bordered by Kedondong District, Pesawaran Regency. To the south, it is bordered by the Gedong sub-district of Pesawaran regency. In the east it is bordered by Padang Cermin District. In the west, it is bordered by Kelumbayan District, Tanggamus Regency. Part of Way Ratai District is a lowland area, part of it is a hill area and with a total sub-district area of 127.21 Km<sup>2</sup>. Way Ratai District has its capital in Wates Way Ratai Village, which is 41 km from the capital of Pesawaran Regency. Wates Way Ratai Village has the smallest area of 21.56 km<sup>2</sup>.

Way Ratai District is one of the developing areas that is in the spotlight of the government because there are many potential areas that can be developed and become regional advantages. including being a tourist area, an area for agricultural commodities, plantations and freshwater fisheries. Being a new development area has caused RT and hamlets in Way Ratai Sub-district to change so that in 2019 until now there are 206 RT and 72 hamlets (BPS: Way Ratai Regional Statistics 2020).

Way Ratai sub-district is one of the developing areas that is in the spotlight of the government. As a new development area, the RT and hamlets in Way Ratai Sub-district underwent changes so that in 2014 until now there were 206 RTs and 72 Hamlets (BPS: Way Ratai Regional Statistics 2016). Based on its location, Way Ratai District is bordered to the north by Kedondong District, to the south by GedongTataan District, to the west by Kelumbayan District, and in the east by Padang Cermin District (BPS: Administrative Map of Way Ratai District).

Based on its location, Way Ratai District is bordered to the north by Kedondong District, to the south by GedongTataan District, to the west by Kelumbayan District, to the east by Padang Cermin District (BPS: Administrative Map of Way Ratai District). With the characteristics of the area whose morphology is mostly in the form of hills and forest areas, there are still many forest areas and protected forests. The unspoiled forest land cover area borders the Way Ratai District, namely the Wan Abdurahman Forest Park area.

Way Ratai Subdistrict, there is a self-help village, Harapan Jaya Village, which is located close to a protected forest area with an annual rainfall of  $\pm$  2500-3000 mm, located at an altitude of more than 500 meters above sea level with a hilly topography of slopes dominated by steep slopes so that the development of population settlements has a spread pattern and has a With an area of  $\pm$  15 km<sup>2</sup> consisting of 8 hamlets and 17 RTs, Harapan Jaya Village is located quite far from the capital city of Pesawaran Regency ( $\pm$  70km) with road access mostly in the form of rocky soil, making this village a little difficult to develop both in terms of social and economic aspects. The number of people living in Harapan Jaya village is classified as moderate, namely 1,520 male residents and 1,325 female residents (BPS Kab. Pesawaran 2020). When viewed by gender,

Many people who live in Harapan Jaya Village work in the plantation sector by cultivating land on the hillsides to plant food crops such as corn, sweet potatoes, soybeans, and rice. The planting and tillage system of the people of Harapan Jaya Village is still traditional because the education of the community is still at the basic education level, limited infrastructure and lack of knowledge about technology. From 2015-2020 there was an increase in the number of children attending elementary school (4.22%)

but the number of children attending junior and senior high school actually decreased by 6.36% and 2.29%, respectively (CabdinPendidikanKec. Way Ratai) .

Administratively, the spatial distribution of Harapan Jaya Village with other areas is:

To the north it is bordered by: Register 19 Wan Abdul Rahman Forest

In the east, it is bordered by Padang Cermin Village, Padang Cemin District

To the south, it is bordered by Way Urang Village, Hanau Berak Village, Padang Cermin District.

In the west it is bordered by Paya Village, Padang Cermin District and Pesawaran Indah Village, Way Ratai District.

### ***Pentahelix Model Collaboration and Harapan Jaya Tourism Village Development***

At the collaboration stage of the Pentahelix Model in the Development of the Harapan Jaya Tourism Village, Way Ratai District, the parameters seen are how the involvement of various actors is to work together in optimizing development in village tourJaya and create added value product tourist which describe the characteristics of the uniqueness of the product from the tourist village of Harapan Jaya that distinguishes it from other tourism. The characteristics of the tourism product in question are those related to the potential of the tourist village such as the management of local handicraft businesses that are characteristic of regional culture, waterfall tourist destinations, regional culinary business management, lodging business management, and also business management in the form of stalls and restaurants. shops for necessities for everyday life.

#### **Interdependence**

In the development of the Harapan Jaya Tourism Village, Way Ratai District, mutual dependence is one of the benchmarks for seeing the optimal development of the Harapan Jaya Tourism Village, according to (Grey, 1989) in seeing the creation of collaboration, one of which is through the component of interdependence in the world of tourism. Therefore, in this study, the researcher wrote that according to the observations of the Pentahelix Model Collaboration research in the development of the Harapan Jaya Tourism Village, it is still not fully optimal in accordance with the theory of interdependence, which according to tourism stakeholders is to foster a sense of dependence between actors, the need for empowerment, especially human resources. the same culture and mainset in order to understand the Proportionality and Weaknesses of each actor to take part in accordance with their respective functions in developing the Harapan Jaya Tourism Village. So far, the community, government, academics, communities and media have not really existed in the Pentahelix Model Collaboration in the Development of the Harapan Jaya Tourism Village, therefore it is necessary to raise awareness among actors because so far our awareness level in the world of tourism is still very low, still working with each other. own (self-help) because according to the recognition of the tourism awareness group (POKDARWIS) to increase interdependence on other actors it still does not exist because there is no collaboration with related parties but POKDARWIS also does not want dependence on other parties.

#### **Constructive Unification of Thoughts To Reach Solutions**

The second component according to (Gray, 1989) for the creation of a collaboration is through the unification of thoughts constructively to equate the vision & mission and find solutions in development. Harapan Jaya Tourism Village so far still

needs to be considered and requires a lot of ideas and innovations in an effort to develop the Harapan Jaya Tourism Village, therefore the role of collaboration of various components is very important in efforts to develop a culture-based tourism village to provide input and ideas for a good mindset. creative in building a tourist village area. But so far from the results of research observations, researchers describe the problems that are often found in building tourism collaborations in the Harapan Jaya tourist village, the lack of awareness in collaborating in tourism with other actors so that cooperation in unifying the mindset in the development of the tourist village itself is not optimal because there is no shared vision and mission, therefore participation from other parties will certainly have a positive impact on the development of the Harapan Jaya Tourism Village because the large number of participations will certainly increase the level of concern for tourism. However, do not forget that there are negative impacts as well, because in collaborating, there is not only a signature on paper, but also a moral burden and responsibility as well as the challenges that will be faced in the future.

### **Join Ownership of Decisions**

The third concept according to (Gray, 1989) is that collaboration is created based on joint decisions between actors in policy making. So far, from the results of research observations carried out in the Harapan Jaya Tourism Village, it has begun to be seen with the Musrenbang in tourism development by inviting leaders, village officials, tourism offices, academics, media, and the private sector as well as other groups involved in the Pentahelix Model Collaboration. In the development of the Herapan Jaya Tourism Village, Way Ratay District, Pesawaran Regency. However, so far it is still not optimal in terms of meetings so that decision making is still not based on mutual agreement, because so far tourism has only been self-supporting and only a few components are involved.

So far, the lack of smooth communication is the cause of less than optimal decision making with all actors, because concern for the world of tourism still needs to be improved, therefore the importance of face-to-face meetings, in addition to facilitating communication, is one of the efforts to establish good relations between components. . Furthermore, Harapan Jaya Tourism Village is more focused on deliberation between components and other actors to open informal meetings or formal meeting events as a forum to accommodate input and evaluation to build optimal collaboration. In addition, there must also be disclosure of information as well as submitting acceptable and unacceptable inputs.

### **Shared responsibility**

Fourth, according to (Gray, 1989) the concept of collaboration is that tourism is no longer just the responsibility of one party but rather builds a shared responsibility between various parties. From the results of observational research, the concept has been running in accordance with field conditions. However, for the concept of responsibility so far there is still no binding law on the meaning based on a cooperation (MOU). So far, only a few parties have collaborated in tourism villages because of the importance of socialization as one of the ways to increase the number of people participating in the SeiGohong tourist village. According to several stakeholders engaged in tourism so far, there has been no official collaboration, but personally it has always supported the development of the Harapan Jaya Tourism Village for the progress of our Tourism Village. And so far the professionalism and responsibility of various groups can be seen and proven by so far there is still one vision to introduce Tourism Villages and can still be directed as tourism village work

partners, but it does need a very long process because Harapan Jaya Tourism Village still has work home, to be able to introduce Harapan Jaya Tourism Village and sell unique products that are of public concern.

## **CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS**

In order to improve the collaboration of the Pentahelix Model in the development of an optimal Harapan Jaya Tourism Village, special attention needs to be paid, due to the low collective awareness of various actors towards neglect, always waiting for directions, and the lack of communication between actors regarding the Harapan Jaya Tourism Village. The low ability of funding and management as well as the creativity of skilled human resources (HR) in seeking to manufacture local tourism industrial products, especially regarding the handicraft and souvenir industry, also affects the level of penthelix collaboration in the development of the tourism village of Harapan Jaya is less than optimal.

However, so far the presence of a tourist village has also brought a positive impact, opening new jobs, preserving the environment with a traditional cultured area that is still beautiful, although so far the development of the Harapan Jaya Tourism Village has not fully sold its local beauty in the Tourism Village area. the. Therefore, the importance of the Pentahelix Model Collaboration, with the involvement of Academics, Private, Community, Government and Media is very important for supporting tourism in the future. but so far, the cooperation is still not optimal, measured from the interdependence between actors, constructive unification of thoughts, joint decisions, and shared responsibilities, only certain parties are involved in the collaboration,

## **SUGGESTION**

1. The existence of special regulations as a supporting factor for collaboration *pentahelix*.
2. Continuous development programs through trainings, are very important to do, especially with regard to fostering the processing and marketing of superior products of local tourist destinations, including budget assistance.
3. Continuous coordination with pentahelix actors in the implementation of various tourism events.

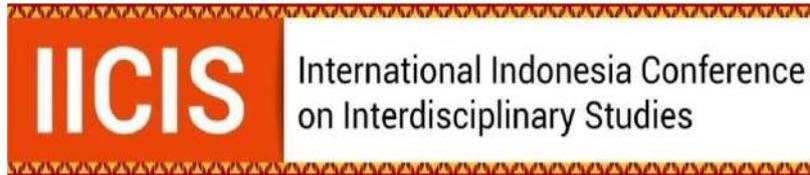
## **REFERENCES**

1. Agranoff, Robert & Michael McGuire. 2003. Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Washington DC: Georgetown University Press.
2. Ansell, Chris, & Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, Hlm. 543-571.

3. Friedman, Andrew L. and Samantha Miles. 2006. Stakeholders: Theory and Practice. New York: Oxford University Press.
4. Hadiwijoyo, SuryoSakti. 2012. Community Based Rural Tourism Planning A Conceptual Approach. Yogyakarta: Graha Ilmu.
5. Lindmark, A., Stureson, E., and Ross. 2009. Difficulties of Collaboration for Innovation. Land University
6. Liu, Juanita C. 1994. Pacific Islands Ecotourism: A Public Policy and Planning Guide. Hawaii: The Pacific Business Center Program. College of Business Administration University of Hawai'i at Manoa, Honolulu USA.
7. Moleong, Lexy J. Qualitative Research Methods. Bandung: PT. RemaRosadakarya.
8. Pitana, I Gde and I Ketut Surya Dinata. 2009. Introduction to Tourism Science. Yogyakarta: Publisher Andi.
9. Prasiasa, DewaPutu Oka. 2013. Community Based Tourism Destinations. Jakarta: SalembaHumaniaka. Richardson, John I and Martin Fluker. 2004. Understanding and Managing Tourism Australia. NSW: Pearson Education.
10. Sugiono. 2018. Qualitative Research Methods. Bandung: Alfabeta Publishers, CV.
11. Yoeti, H. Oka A. 2016. Tourism Planning and Development. Jakarta: Publisher PT Balai Pustaka (Persero).
12. Wood & Gray, 1991. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus. Available Pages: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/collaboration>.

#### Journal:

13. Muhyi, HA, Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T. (2017). The Pentahelix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. Review of Integrative Business and Economics Research, 6(1), 412-417. Available page [https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riberth16-131\\_412-417.pdf](https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riberth16-131_412-417.pdf). [9 August 2021]
14. Subiantoro, Jhevenda Rafael. 2019. Collaboration between Stakeholders in the One Village One Product Kendang Jimbe Program in Blitar City. (Journal), 5 (15), 15 pages. Available <http://repository.unair.ac.id/en/eprint/83427>. [August 20, 2021].
15. Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government.
16. Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning



Bandar Lampung, 17 July 2021

Dear Authors,

We are pleased to inform you that your abstract has been accepted as an oral presentation for the 2<sup>nd</sup> Indonesia International Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS) 2021, which will be held as an Online Webinar on 26-27 October 2021.

Abstract Title:

**Pentahelix Model Collaboration in Tourism Industry Development Policy in Pesawaran District**

For the full paper, we have uploaded the guideline in the IICIS 2021 website. Authors are required to strictly follow the guidelines.

<https://iicis.fisip.unila.ac.id/call-for-papers/>

We would like to thank you for your contribution to the conference, and look forward to seeing you in October.

Warmest regards,

IICIS's Secretariat

Team

The 2<sup>nd</sup> Indonesia International Conference on Interdisciplinary Studies  
[iicis@fisip.unila.ac.id](mailto:iicis@fisip.unila.ac.id)

Address: Faculty of Social and Political Science, Universitas Lampung  
Jl. Prof Sumantri Brodjonegoro No 1 Bandar Lampung, Lampung Indonesia 35141  
Website: <http://iicis.fisip.unila.ac.id/> e-mail: [iicis@fisip.unila.ac.id](mailto:iicis@fisip.unila.ac.id)

SimulasiNS x (1) WhatsApp x Unduh Me | AaveFO x legal abah Di Nawa... x FGD "Kebijakan Pariwisata Lam...

youtube.com/watch?v=PJP4xrlqDBo&feature=youtu.be

Telusuri

Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung

*Focus Group Discussion*  
**KEBIJAKAN PARIWISATA LAMPUNG  
DI ERA NEW NORMAL**



FGD "Kebijakan Pariwisata Lampung di Era New Normal"

37 x ditonton • Live streaming 9 jam lalu

5 0 BAGIKAN SIMPAN

Berikutnya

LIHE Gelar Publik Teta...  
Kadipaten-Raja Ampo...  
5thms News  
30 sedang menonton  
LIVE SEKARANG

Berkonung.../Rumab...  
Single Top Rumahnya...  
Nisa waly Official  
27.36 x ditonton - 23 jam...  
27.36

Lagu Indonesia Terbaik  
Terpopuler - Terhita Sepa...  
Musica Studio's  
49 sedang menonton  
LIVE SEKARANG

SPECIAL MALAM MINGG...  
SYAHDI! TETAP DISINI...  
NABILA-SUMMA  
27.26 x ditonton - 3 hari...  
Bani

TETAPDISI 5.00

INI ORANG UMUR 20 UDA...

Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Dokumentasi hasil uji coba produk

Target: Ada

Dicapai: Tersedia

Dokumen wajib diunggah:

1. Dokumentasi (foto) Pengujian Produk
2. Dokumen Deskripsi dan Spesifikasi Produk
3. Dokumen Hasil Uji Coba Produk

Dokumen sudah diunggah:

1. Dokumen Deskripsi dan Spesifikasi Produk
2. Dokumen Hasil Uji Coba Produk
3. Dokumentasi (foto) Pengujian Produk

Dokumen belum diunggah:

- Sudah lengkap

Nama Produk: LEGAL DRAFT MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  
PARIWISATA BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI  
PROVINSI LAMPUNG :Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan  
Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran

Tgl. Pengujian: 7 September 2021

Link Dokumentasi:

<https://drive.google.com/folderview?id=1nqPSHtGPQsDYeJSID3KPgqy51yqni9hM>

PRODUK PENELITIAN



*LEGAL DRAFT MODEL*

**NASKAH AKADEMIK**

*TENTANG*

**MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA  
BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH  
DI PROPINSI LAMPUNG**

*Sub judul tahun ke 3 : Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan  
Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran  
(penelitian tahun ke 3 dari rencana 3 tahun)*

oleh

**Dr. Noverman Duadji, M.Si  
Dra. Dian Kagungan, M.H  
Intan Fitri Meutia, P.hD**

*Dibiayai oleh ;*

*Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan  
Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi  
Nasional Sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor : 205/SP2H/LT/DRPM/2021*

**UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2021**

# **NASKAH AKADEMIK**

***TENTANG***

**MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA  
BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH  
DI PROPINSI LAMPUNG**

***“Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan Industri  
Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran”***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pariwisata di Propinsi Lampung tidak selesai jika berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, perguruan tinggi, masyarakat dan *media* harus saling *bersinergi*, sehingga potensi pariwisata dapat tergarap dengan maksimal. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersama membangun pariwisata Lampung, dan Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Tim Koordinasi lintas sektor sebagai upaya membangun pariwisata Lampung, dengan kata lain kolaborasi antar aktor pentahelix dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Propinsi Lampung sangatlah penting.

Peran penting Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan didasarkan bahwa pada pemikiran bahwa birokrasi memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala hal berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat suatu negara. Birokrasi juga berperan penting dalam melakukan berbagai tindakan antisipatif untuk menimalisasi berbagai dampak negatif, mengingat banyaknya potensi persoalan yang muncul dari kepariwisataan

Peran stakeholder terhadap pembangunan kepariwisataan juga tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, tidak terkecuali proses kolaboratif tata kelola pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung. Proses tatakelola pariwisata merupakan suatu proses *adaptive system, dan beorientasi pada konsensus*. Berbasis 2 pakar, yaitu : Anshell dan Gash (2008) memetakan proses kolaboratif yang dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (trust building), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), kemudian terbentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*)

Kolaborasi model pentahelix dalam pengembangan pariwisata desa wisata di lihat dari parameter keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan desa wisata. Proses kolaboratif pariwisata dan tatakelola pariwisata, diasumsikan akan terjadi jika terpenuhinya beberapa syarat, (i). Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi sebenarnya adalah *citizen power*, (menurut Arnstein) (ii). Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, berarti tidak ada dominasi tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki dan terdapat rasa saling menghormati (iii). Terdapat aktor-aktor yang kompeten

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : bagaimakah kolaborasi antar aktor pentahelix dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran?

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan model kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran yang menjadi lokasi penelitian ini.

Manfaat penelitian ini adalah : meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran tepatnya di desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratay

#### 1.2 Tujuan Khusus

1. Menghasilkan model kebijakan pengembangan industri pariwisata melalui kebijakan kerjasama antar daerah di Propinsi Lampung,

2. Menyusun naskah kebijakan/naskah akademik
3. Publikasi Jurnal Internasional
4. Buku ajar (ISBN)

## **B. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

***Tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:***

1. Merumuskan kerangka kebijakan ***jalinan kerjasama yang sinergis/ kolaboarsi antar aktor pentahelix*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota beserta stakeholder dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal
2. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang Model kebijakan ***jalinan kerjasama yang sinergis*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus, sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang ***jalinan kerjasama yang sinergis/kolaborasi antar aktor pentahelix*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota beserta stakeholder dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus, sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal

***Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah*** sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berdasarkan temuan persoalan dalam praktek tatakelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesawaran dalam hal ini adalah kebijakan ***jalinan kerjasama yang sinergis/kolaborasi antar aktor pentahelix*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota beserta stakeholder dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah studi lapang dan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil pengkajian dan dokumen pendukung lainnya.

## BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

### A. Kajian Teoritis

#### 2.1 Pengertian Pariwisata dan Industri Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan berarti keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. (Sedarmayanti, 2014)

Industri pariwisata: usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan, tujuan kepariwisataan, yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Menghapus kemiskinan.
- d. Mengatasi pengangguran.
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya.
- f. Memajukan kebudayaan.
- g. Mengangkat citra bangsa.
- h. Memupuk rasa cinta tanah air.
- i. Memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa.
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Untuk mengembangkan kegiatan wisata daerah, tujuan wisata harus memiliki:

- a. Objek/atraksi dan daya tarik wisata.
- b. Transportasi dan infrastruktur.
- c. Akomodasi( tempat menginap).
- d. Usaha makanan dan minuman.
- e. Jasa pendukung lainnya (hal yang mendukung kelancaran berwisata, misal: biro perjalanan, cinderamata, informasi, pemandu, kantor pos, bank, penukaran uang, internet, wartel, pulsa, salon, dan lain-lain). (Unesco, 2009).

#### 2.2 Konsep Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan

Da lam kehidupan di negara moderen saat ini, kegiatan pembangunan termasuk pembangunan kepariwisataan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik pula. Kebijakan yang baik dapat diilustrasikan seperti seorang dlrigen yang mengatur permainan sebuah orkestra yang terdiri dari banyak pemain musik dengan jenis alat musik yang berbeda-beda jenis, suara, dan wakyu memainkannya, sehingga menghasilkan sebuah lagu yang sangat indah. Dengan demikian setiap insan pariwisata, dan terlebih lagi para birokrat, baik di lingkungan Pemerintah maupun Pemrintahan daerah, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dalam kepariwisataan.

Ditinjau dari aspek kebutuhan praktis, pembahasan tentang teori-tori yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan seringkali tidak terlalu diprhatikan. Orang yang mendengar istilah "kebijakan pembangunan kepariwisataan" pada umumnya secara otomatis akan memfokuskan perhatiannya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam penggolongan kepariwisataan. Namun demikian, beberapa teori terkait dengan konsep dimaksud perlu diungkapkan dalam

tulisan ini karena membantu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan kepariwisataan. Ketika kita berbicara mengenai masalah kebijakan pembangunan kepariwisataan, maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian istilah "kebijakan" dan "pembangunan". Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, istilah "kebijakan" didefinisikan sebagai:

"(1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjad garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemeritahan ,organisasi, dsb); pernyataan cita-cita ,tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan."

Sementara itu dalam Kamus Merriam-webster, istilah "*policy*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kebijakan", diartikan sebagai aturan atau ide secara resmi di akui sebagai pedoman untuk menentukan pelaksanaan aktivitas: "*an offcially accepeted set of rules or idieas about what should be done*". Dengan demikian istilah "*policy*" atau "kebijakan" (khususnya definisi nommer 2) pada prinsipnya adalah parameter yang dijadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakan sebuah aktivitas. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah bahwa tidak dijelaskan secara tegas apakah "kebijakan" juga meliputi perturan perundang-undangan. Hal tersebut berbeda dengan istilah "*policy*" yang lebih jelas pengertiannya.

Definisi sederhana lainnya mengenai istilah tersebut adalah arah tindakan atau cara bertindak dipilih dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kondisi faktual, yang menentuka pengambilan keputusan dimasakini dan masa depan: "*A definite course or method of action selected from among alternatives and in the light on given conditions to guede and determine present and future decisions*". Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, menurut Edgell dan Swanson (2013), pemahaman mengenai kebijakan dibidang kepariwisataan akan menjadi lebih mudah jika dimulai dari definisi Thomas Dye mengenai "kebijakan publik", yaitu tindakan apapun melakukan atau tidak melakukan yang dipilih oleh pemerintah: "*whatever government choose to do or not to to*".

Sementara itu, istilah "pembangunan" diartikan sebagai suatu proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa (Sasmojo, 2004 : 1), tentunya ke arah yang lebih baik. Jika kemudian dikaitkan dengan kedua istilah tersebut dan istilah "kebijakan publik", maka "kebijakan pembangunan" akan memiliki pengertian sebagai *parameter yang secara resmi diakui yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman oleh Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi terwujudnya proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa ke arah yang lebih baik*.

Dalam bidang kepariwisataan, dikenal pula istilah dalam bahasa Inggris yaitu "*tourism policy*". Menurut Goeldner dan Ritchie (2009:414), istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

"*Tourism policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strategies taht provide a framework within which the collective and individual decisions directly affecting long-term tourism development and the daily activities within a destination are taken*".

Pendapat lain mengenai istilah ini diungkapkan pula oleh Paul S. Biederman (2008) didalam buku yang berjudul *Travel and Tourism: An Industry Primer*, yang menambahkan aspek sosial didalam kebijakan kepariwisataan:

"*A tourism policy defines the direction or course of action that a particular country, region, localty, or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The ker principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or localty) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of tourism policy is to improve the progress of the nation (region or localty) and the lives of its citizens.*"

Kedua definisi tersebut diatas memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan *tourism policy* atau yang penulis terjemahkan sebagai “kebijakan dibidang kepariwisataan” adalah berbagai macam aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata yang menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan dalam jangka pendek dan panjang. Kebijakan ini harus memberikan jaminan bahwa tujuan utamanya adalah membuat masyarakat yang bersangkutan yang tinggal didestinasinya pariwisata memperoleh keuntungan optimal dari kontribusi kepariwisataan dibidang sosial dan ekonomi dalam bentuk kemajuan dan kualitas hidup. Jika dikaitkan dengan konsep pembangunan, maka berarti aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata tersebut harus mengarah kepada perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa.

Edgell dan Swanson (2013) berpendapat bahwa pada intinya kebijakan dibidang kepariwisataan adalah setiap tindakan pemerintah baik di bidang legislatif, administratif, maupun yudisial yang berpengaruh terhadap kepariwisataan. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas pemasaran, perencanaan dan keberlanjutan. Menurut mereka bentuk kebijakan tersebut adalah berbagai pedoman (aturan), prinsip dan prosedur, yang disusun secara etis dan sifatnya fokus terhadap suatu persoalan serta mewakili harapan suatu masyarakat (atau bangsa) dalam hubungannya dengan aspek perencanaan, pembangunan, produk, jasa, pemasaran dan aspek keberlanjutannya.

### 1.1 Konsep Sinergitas

Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Jadi sinergi dapat dipahami pula sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Covey dalam Kurniawan & Suryawati (2017:40) mendefinisikan sinergitas sebagai sebuah kombinasi antar unsur maupun antar bagian yang akan memperoleh keluaran yang lebih baik dari sebelumnya. Indikator dalam menganalisis sinergitas menurut pendapat doctoroff meliputi indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, serta kreativitas antar pihak terkait yang menjadi syarat utama bagi sebuah sistem sinergi yang ideal

Sofyandi & Garniwa dalam Rahmawati dkk (2014:643) mengemukakan bahwa Sinergitas dapat terbangun dengan baik melalui dua cara diantaranya

1. Komunikasi yang berorientasi pada sumber yang memandang bahwa komunikasi sebagai kegiatan dengan seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan, dan komunikasi yang berorientasi pada penerima yang memandang komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

2. Koordinasi

Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Dalam hal ini Silalahi dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan koordinasi sebagai bentuk integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam sebuah usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.

Moekijat dalam Rahmawati dkk (2014:643) menyebutkan terdapat 9 (sembilan) syarat utama dalam mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

- 1 Hubungan langsung yang akan mempermudah pencapaian melalui hubungan pribadi secara langsung
- 2 Kesempatan awal dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3 Kontinuitas koordinasi yang harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan
- 4 Dinamisme, koordinasi harus terus menerus
- 5 Tujuan yang jelas untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- 6 Organisasi yang sederhana untuk memudahkan koordinasi yang efektif.

- 7 Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang akan mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan serta membantu dalam hal pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 8 Komunikasi yang efektif
- 9 Kepemimpinan supervisi yang efektif yang akan menjamin koordinasi kegiatan baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat evaluasi.

Sinergitas dalam pencapaian tujuan dapat terlaksana melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Konsep sinergitas merupakan upaya yang harus dilakukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan maupun non pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

## 1.2 Konsep Model Pentahelix

Model pentahelix pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arief Yahya yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan, memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran pengusaha, pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media.

Kotler et al dalam Saputri (2020:24) menyatakan bahwa destinasi wisata akan mendapatkan sebuah keunggulan dalam bersaing apabila masing-masing dari organisasi yang terlibat dapat berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sumber daya lain yang dapat mendukung proses pengembangan pariwisata. Dalam hal ini model pentahelix berfokus pada 5 unsur yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata diantaranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut.

## 1.3 Peran Aktor Pentahelix

Pengelolaan sektor pariwisata tidak terlepas dari peran stakeholder dalam proses pengembangannya. Terdapat 5 (lima) aktor yang ikut berkontribusi secara aktif dalam proses pengembangan sektor pariwisata, diantaranya

### a. Pemerintah

Dalam proses pengembangan sektor pariwisata, pemerintah berperan dalam proses penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung perkembangan pariwisata, menyiapkan kebijakan maupun peraturan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, memberikan fasilitas yang memadai dan melakukan kegiatan promosi serta pemasaran destinasi wisata tersebut. Peran pemerintah dalam pembuat kebijakan maupun regulasi dibidang pariwisata akan mempengaruhi proses pengembangan pariwisata tersebut. Pemerintah juga berperan secara langsung didalam pengembangan regulasi dibidang pariwisata, mengendalikan proses pengembangan pariwisata, serta berperan langsung dalam memperkuat kelembagaan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam merumuskan kebijakan atau regulasi.

### b. Akademisi

Akademisi dalam proses pengembangan pariwisata berperan dengan melakukan kajian ilmiah serta berbagai riset dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah. Hasil dari kajian ilmiah dan pengabdian masyarakat yang dilakukan para akademisi dapat dimanfaatkan untuk penunjang keberhasilan sektor pariwisata dengan melakukan kerjasama serta komunikasi dengan para akademisi dalam proses pengembangan agrowisata.

c. Dunia usaha

Dalam proses pengembangan pariwisata, dunia usaha atau swasta berperan penting dalam penyelenggaraan bisnis disektor pariwisata yang mengutamakan etika bisnis, profesional, bertanggung jawab serta berkelanjutan. Dunia usaha berperan sebagai *profit oriented* yang akan bertanggungjawab dalam keberlanjutan lingkungan sebagai hal yang sangat penting dalam sektor pariwisata.

d. Komunitas

Komunitas dalam proses pengembangan pariwisata terdiri dari masyarakat dan LSM atau NGO yang berperan mendukung sapta pesona dengan menyediakan jasa pariwisata atau ekonomi kreatif. Masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pengembangan pariwisata.

e. Media

Media berperan pada bidang informasi dan promosi pariwisata. Promosi dan pemasaran bidang pariwisata yang bersifat inklusif dengan memanfaatkan media sosial.

### ***Studi Pendahuluan yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai***

Hasil penelitian Kagungan, 2009 dan Yulia (2012) tentang Penataan Kawasan Industri Pariwisata pesisir Bandar Lampung berbasis *Integrated Coastal Zone Management* menyimpulkan keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir menjadi kawasan industri pariwisata yang "*layak jual*" mencakup 4 (empat) aspek (i) keterpaduan wilayah/ekologis (ii) keterpaduan sektor (iii) keterpaduan disiplin ilmu (iv) keterpaduan *stakeholder*.

Hasil penelitian dan kajian Neta (2012) dan Ratnasari (2014) menyimpulkan bahwa dari sisi pemberdayaan masyarakat, penataan kawasan industri pariwisata pesisir Bandar Lampung akan sangat menguntungkan para nelayan di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini berada pada posisi *regulator* dan penyedia *infrastruktur* jika dipaksakan sebagai pengelola kawasan, dikhawatirkan terbuka peluang penyimpangan. Oleh karena itu dalam pengelolaan kawasan pesisir Bandar Lampung menjadi kawasan industri pariwisata yang handal dan layak jual patut mempertimbangkan keterlibatan dan peran serta para *stakeholders* lainnya.

Menurut kajian kami sebagai peneliti, model kebijakan pengembangan industri pariwisata berbasis kearifan lokal melalui kebijakan kerjasama antar daerah di Propinsi Lampung yang akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat harus memiliki ***tema sentral*** sebagai sesuatu yang layak jual. Tema sentral perlu dipilih dan ditetapkan agar dari sisi *marketing* kawasan pesisir menjadi lebih layak jual. Terlebih anggaran pembangunannya bukan hanya berasal dari pemerintah tetapi juga berasal dari kalangan investor yang membutuhkan ***value added*** ketika memilih berinvestasi di kawasan pesisir.

Selanjutnya hasil penelitian Putra, Rizki (2019) dan ***Kagungan, Duadji. Noverman dan Meutia (2019)*** secara umum menyimpulkan bahwa : Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus meliputi :

***a. Daya Tarik (attraction)***

*Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam penatakelolaan area wisata menuju industri pariwisata berbasis kearifan lokal dilakukan melalui program **One Village One Destination (satu desa satu destinasi wisata)**. Pemerintah Kabupaten Pesawaran berusaha mengembangkan desa-desa di Pesawaran untuk dijadikan sebagai destinasi*

wisata. Dari 148 desa di Pesawaran saat ini sudah 50 desa yang mengembangkan destinasi wisata, selanjutnya akan dipilih 16 desa yang berdaya saing dengan destinasi unggulannya. Dimana nantinya setelah terpilih 16 besar, dari ke 16 desa tersebut dalam skala even baik propinsi maupun nasional.

Melalui program *one village one destination* diharapkan dapat menyuguhkan daya tarik wisata sesuai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Meskipun demikian, Pemerintah setempat tetap perlu membenahi fasilitas-fasilitas pendukung, antara lain ketersediaan toko-toko atau gerai-gerai penjual suvenir, fasilitas rumah makan bagi pengunjung, dan sarana pendukung lainnya.

#### ***b.Accessible***

Strategi pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memenuhi kebutuhan wisatawan mendapatkan kemudahan aksesibilitas (*accessible*) antara lain akan ditingkatkannya kualitas angkutan umum sejak tahun 2017-2021, pengembangan prasarana telekomunikasi (pengembangan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan mikro mempergunakan jaringan kabel bawah laut sepanjang tahun 2017-2021.

Strategi pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan pariwisata secara umum sudah baik (prasarana informasi dan sistem telekomunikasi telah tersedia) namun yang perlu dibenahi adalah prasarana transportasi, beberapa ruas jalan tanah yang masih menjadi kendala, juga terjadinya kemacetan apabila hari libur tiba. Tentunya hal ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pesawaran khususnya, agar aksesibilitas objek-objek wisata di kawasan Kecamatan Teluk Pandan menjadi lebih baik lagi.

#### ***c.Amenittis***

Salah satu syarat daerah tujuan wisata (DTW) adalah fasilitas dari objek wisata, antara lain fasilitas penginapan, MCK, dan fasilitas parkir. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesawaran maupun Kabupaten Tanggamus telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik antara lain, penyediaan fasilitas penginapan, tempat peristirahatan bagi wisatawan, sarana parkir yang luas dan representatif, restaurant, dan sarana MCK yang cukup memadai bagi wisatawan.

#### ***d.Ancillary (lembaga pengelola)***

Lembaga pengelola yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah, pengelola objek wisata dan investor.

### **Selanjutnya, hasil penelitian Duadji, Kagungan dan Meutia (2020) menyimpulkan :**

Secara umum strategi pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

#### **1. daya tarik**

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mengelola kawasan pariwisata menuju industri pariwisata berbasis kearifan lokal dilakukan melalui program One Village One Destination. Pemerintah Kabupaten Pesawaran sedang mencoba untuk menjadikan desa- desa di Kabupaten Pesawaran sebagai tujuan wisata. Dari 148 desa di Kabupaten Pesawaran saat ini 50 desa telah mengembangkan destinasi wisata, kemudian akan dipilih

16 desa berdaya saing dengan destinasi unggulannya. Dimana kedepannya setelah 16 besar terpilih, dari 16 desa dalam skala event baik provinsi maupun nasional. Program OVOD (*one village one destination*) diharapkan dapat menghadirkan tempat-tempat wisata yang sesuai dengan potensi daerahnya. Industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal menjadi salah satu daya tarik agar wisatawan ingin berkunjung ke sana. Selain menarik wisatawan, daya tarik suatu destinasi pariwisata juga dibutuhkan untuk menarik investor. Prasyarat agar industri kepariwisataan berfungsi dengan baik adalah daya tarik investasi, karena untuk memastikan efektivitas setiap bidang kegiatan ekonomi perlu memiliki sumber daya, sedangkan alokasi dana publik tidak sepenuhnya menutupi pemeliharaan dan pengembangannya. (Kozmenko et al., 2015)

Daya tarik investasi dari sektor pariwisata merupakan kombinasi dari faktor mikro dan tingkat makro yang membantu calon investor membentuk gambaran umum daerah tersebut dan memberikan kesempatan untuk menilai daya tariknya. Daya tarik investasi bergantung pada faktor-faktor berikut: tingkat sosial ekonomi, perkembangan objek penelitian, kegiatan investasi; tingkat perkembangan kepariwisataan, khususnya dinamika arus wisata, penyediaan prasarana wisata, ketersediaan sumber daya investasi dan lain-lain(Kozmenko et al., 2015).Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan fasilitas pendukung, antara lain ketersediaan toko atau toko souvenir, fasilitas restoran bagi pengunjung, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pernyataan dan Daya Saing (2010) Pariwisata berkontribusi pada aktivitas di hampir setiap industri di seluruh perekonomian. Proses dimana konsumen (pengunjung) datang ke produk (tujuan), mengkonsumsi produk pariwisata yang dapat diidentifikasi dan juga menimbulkan biaya hidup sehari-hari di tempat tujuan tersebut adalah unik di antara pasar barang dan jasa yang diperdagangkan. Sifat produk dan jasa yang sangat luas yang dikonsumsi oleh wisatawan menghadirkan masalah-masalah tertentu yang tidak umum terjadi di pasar produk lain. Selain itu, pariwisata memiliki pengaruh sosial di berbagai bidangseperti kejahatan, kesehatan, kemacetan, harga tanah dan lainnya, serta fasilitas perkotaan.

## 2. Dapat diakses

Pariwisata yang dapat diakses adalah bentuk pariwisata yang melibatkan proses

kolaboratif antara pemangku kepentingan yang memungkinkan orang-orang dengan persyaratan akses, termasuk mobilitas, penglihatan, pendengaran dan dimensi kognitif akses, untuk berfungsi secara mandiri dan dengan kesetaraan dan martabat melalui penyampaian yang dirancang secara universal (Pernyataan & Daya Saing, 2010) produk, jasa dan lingkungan pariwisata (Buhalis & Darcy, 2012). Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memenuhi kebutuhan wisatawan akan kemudahan aksesibilitas meliputi peningkatan kualitas angkutan umum sejak tahun 2017-2021, pembangunan infrastruktur telekomunikasi (pengembangan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan mikro dengan menggunakan jaringan kabel bawah laut sepanjang tahun 2017-2021. Kabupaten Pesawaran Strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata umumnya sudah baik (infrastruktur informasi dan sistem telekomunikasi tersedia) namun yang perlu dibenahi adalah infrastruktur transportasi, beberapa jalan tanah yang masih menjadi kendala, dan kemacetan saat hari raya terjadi tentunya menjadi tanggung jawab Kabupaten Pesawaran. pemerintah pada khususnya, sehingga aksesibilitas objek wisata di Kecamatan Teluk Pandan menjadi lebih baik.

### 3. Menittis

Menurut Carlsen dan Butler (2011) Ada empat strategi utama yang digunakan oleh lembaga taman untuk mengendalikan dan mengelola wisata bahari; ini termasuk strategi regulasi, fisik (yaitu infrastruktur), pendidikan dan ekonomi. atraksi, antara lain fasilitas penginapan, toilet, dan fasilitas parkir. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik antara lain jumlah fasilitas penginapan, tempat istirahat bagi wisatawan, fasilitas parkir yang luas dan representatif, restoran, serta fasilitas toilet yang memadai bagi wisatawan.

### 4. Insillary

Kelembagaan pengelolaan yang dimaksud disini adalah pemerintah, pengelola objek wisata dan investor. Berdasarkan uraian di atas maka strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus dalam pengelolaan industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. , yang umumnya bertujuan:

- a) Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan berkelanjutan
- b) Menata perencanaan pembangunan daerah yang terencana dengan baik
- c) Promosi potensi daerah
- d) Mengoptimalkan kekayaan alam wilayah
- e) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- f) Menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat lokal
- g) Mendukung pembangunan daerah, provinsi dan nasional

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di masing-masing Kabupaten melibatkan peran investor, baik pihak swasta maupun pihak lainnya. Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan menjadi obyek wisata terpadu (integrated area tourism) antara wisata alam, wisata budaya hingga pertemuan, insentif, konferensi dan pameran (MICE) pariwisata.

### KESIMPULAN

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sendiri tengah menyiapkan skema percepatan pemulihan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif di Provinsi Lampung setelah pandemi COVID-19. Dengan beberapa skema salah satunya menyiapkan pariwisata berwawasan lingkungan, berwawasan kesehatan, serta berwawasan keamanan sebagai upaya membangun kembali sektor pariwisata. Pemerintah Provinsi Lampung Kabupaten/Kota bersinergi dalam menangani dan membangun kembali industri pariwisata dari dampak Covid-19,

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan tiga tahapan untuk merespon dampak Covid-19 yaitu tanggap darurat, pemulihan (recovery), dan normalisasi. Di tahap tanggap darurat, memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan untuk menyiapkan akomodasi, makanan, hingga transportasi. Selain itu berkoordinasi dengan K/L dan berbagai pihak terkait dalam

mengambil langkah-langkah untuk mendukung industri atau pelaku pariwisata Indonesia. Pada tahap kedua yaitu pemulihan, Kemenparekraf akan berkoordinasi dengan K/L lain untuk mengidentifikasi dampak secara detail akibat wabah Covid-19.

Secara resmi pemerintah Lampung belum mengeluarkan kebijakan strategi di bidang pariwisata terdampak covid-19. Pemerintah daerah dalam hal ini masih mengikuti kebijakan Nasional yang di buat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun semua pariwisata di Indonesia menurut Wishnutama selaku Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif akan menerapkan strategi yang berfokus pada memperbaiki hal dasar terkait higienitas, keselamatan, dan keamanan, serta mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar, hal itu pula yang nantinya akan di terapkan oleh pemerintah Propinsi Lampung agar masyarakat tidak lagi khawatir tentang kebersihan pariwisata dan lebih merasa aman saat melakukan wisata di daerah tersebut.

Saran/rekomendasi yang penting dari hasil penelitian ini adalah :

a. Pentingnya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadapobyek wisata “baru” air terjun Way lalaan dan pantai Terbaya yang sangat berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten tersebut tanpa mengabaikan peran sertakelompok sadar wisata dan masyarakat lokal

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok sadar wisata melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan baik melalui pelatihan, bantuan anggaran dan evaluasi rutin kegiatan pokdarwis, dalam rangka membangkitkan kembali gairah pariwisata di Kabupaten Pesawaran, KabupatenTanggamus dan kabupaten Lampung Selatan seiring menyambut era new normal dan tetap menerapkan standar operating procedure covid 19 demi keselamatan pengelola dan pengunjung

c. Strategi pengembangan pariwisata di Propinsi Lampung harus menerapkan strategi yang berfokus pada memperbaiki hal dasar terkait higienitas, keselamatan, dan keamanan, serta mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar.

d. Pentingnya strategi inovasi untuk terus berkreasi dalam rangka mengembangkan industri pariwisata di Propinsi Lampung selain pemanfaatan website desa wisata, jalinan kerjasama dengan stakeholder, penguatan peran kelembagaan kelompok sadar wisata

e. Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah harus seiring sejalan dengan dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung, agar tidak terkesan pengembangan industri pariwisata daerahb di Propinsi Lampung berjalan sendiri-sendiri

f. Kebijakan pariwisata yang perlu diperkuat, antara lain dukungan kepada industri danpelaku

pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), dukungan anggaran, subsidi pendidikan pariwisata, penguatan SOP Mitigasi Pariwisata, prioritas pada pembenahan destinasi, meningkatkan peran pokdarwis di desa wisata sebagai tim gugus desa yang dibina oleh Kemenparekraf cq Dinas Pariwisata Kab Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan Lampung Selatan, dan penguatan regulasi masuknya wisatawan mancanegara

Luaran yang telah dicapai dari hasil penelitian tahap 2 tahun 2020 :

1. Legal draft model
2. Artikel Ilmiah yang telah di submit pada Jurnal terindex
4. Buku Referensi dalam proses ISBN

## Hasil

### **Kolaborasi Model *Pentahelix* dan Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya**

Pada tahap Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay parameter yang dilihat adalah bagaimana keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan di desa wisata Harapan Jaya dan menciptakan Karakteristik ciri khas produk pariwisata yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan potensi desa wisatanya seperti pengelolaan usaha-usaha kerajinan lokal yang menjadi ciri khas budaya daerah, destinasi wisata air terjun, pengelolaan usaha kuliner khas daerah, pengelolaan usaha penginapan, dan juga pengelolaan usaha berupa warung dan toko-toko untuk kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari.

#### **Saling Ketergantungan**

Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Saling Ketergantungan adalah salah satu tolak ukur untuk melihat optimalnya sebuah pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya, Menurut (Grey, 1989) dalam melihat terciptanya kolaborasi salah satunya melalui komponen saling ketergantungan dalam dunia pariwisata. Maka dari itu dalam sebuah penelitian ini peneliti menuliskan menurut hasil observasi penelitian Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya masih belum sepenuhnya optimal sesuai dengan teori saling ketergantungan, yang dimana menurut stakeholder pariwisata untuk menumbuhkan rasa ketergantungan antar aktor perlunya pemberdayaan terutama SDM, budaya dan mainset yang sama agar memahami Proporsionalitas dan Kelemahan tiap aktor untuk ambil bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam mengembangkan Desa Wisata Harapan Jaya. Se jauh ini, masyarakat, pemerintah, akademisi, komunitas dan media masih belum terlalu eksis Dalam Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya maka dari itu perlunya menumbuhkan kesadaran antar aktor karena sejauh ini tingkat kesadaran kita dalam dunia pariwisata masih sangat rendah, masih saling bekerja sendiri (swadaya) karna menurut pengakuan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sendiri untuk meningkatkan saling ketergantungan terhadap aktor lain itu masih belum ada karena memang belum adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait namun pihak POKDARWIS juga tidak ingin dengan adanya ketergantungan terhadap pihak lain; inovasi dan kreativitas mereka tidak berkembang.

#### **Penyatuan Pemikiran Secara Konstruktif Untuk Mencapai Solusi**

Komponen yang kedua Menurut (Gray, 1989) untuk terciptanya sebuah kolaborasi yaitu melalui penyatuan pemikiran secara konstruktif untuk menyamakan visi & misi dan mendapatkan solusi dalam pengembagan. Desa Wisata Harapan Jaya sejauh ini masih sangat perlu di perhatikan dan memerlukan banyak ide serta inovasi dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Harapan Jaya, maka dari itu peran kolaborasi berbagai komponen sangat penting dalam upaya pengembangan desa wisata yang berbasis budaya untuk memberi masukan dan gagasan pola pikir yang kreatif dalam membangun sebuah kawasan desa wisata.

Namun sejauh ini dari hasil observasi penelitian, peneliti menjabarkankan problem yang sering di temukan dalam membangun kolaborasi pariwisata dalam desa wisata Harapan Jaya, kurangnya kesadaran dalam bekerjasama dalam bidang pariwisata dengan aktor lain sehingga belum optimalnya kerjasama dalam menyatukan pola pikir dalam pengembangan desa wisata itu sendiri karena belum ada visi dan misi yang sama, maka dari itu partisipasi dari pihak lain tentu membawa dampak positif bagi pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya karena banyaknya partisipasi tentu akan menambah tingkat kepedulian terhadap pariwisata. Namun demikian tidak melupakan adanya dampak negatif juga, karna dalam menjalin kolaborasi tidak hanya modal tanda tangan di atas kertas saja, tetapi juga ada beban moral dan tanggung jawab serta tantangan yang di hadapi kedepannya, salah satunya adalah konsistennya aktor lain yang siap bekerjasama dan tantangan menyatukan pola pikir berbagai aktor karna tentunya dengan partisipasi yang banyak mempunyai pola pikir yang berbeda- beda, maka dari itu solusi untuk mengatasi berbagai konflik agar sejalan dengan apa yang di harapkan harus mengadakan pertemuan rutin minimal 1 kali dalam 2 minggu yang di adakan oleh pihak pariwisata, dengan adanya tatap muka akan menjalin silaturahmi berbagai komponen untuk saling sharing dan ngobrol santai untuk berbicara tentang perencanaan, pengeloan serta bagaimana kelanjutan program pariwisata untuk kedepannya untuk menyatukan pola pikir yang konstruktif berbagai komponen.

### **Keputusan Bersama Semua Aktor (*Joint Ownership of Decisions*)**

Konsep yang ketiga menurut (Gray, 1989) kolaborasi tercipta berdasarkan keputusan bersama antar aktor dalam penentuan kebijakan. Sejauh ini dari hasil observasi penelitian yang di lakukan di Desa Wisata Harapan Jaya sudah mulai terlihat dengan adanya Musrenbang dalam pembangunan pariwisata dengan mengundang tokoh-tokoh, pihak kelurahan, dinas pariwisata, akademisi, media, dan swasta serta kalangan lain yang terlibat dalam Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran ini. Namun demikian, sejauh ini memang masih belum optimal dari segi pertemuan sehingga untuk pengambilan keputusan masih belum berdasarkan kesepakatan bersama, karena memang sejauh ini berjalan nya pariwisata

hanya swadaya dan hanya beberapa komponen saja yang terlibat, makadari itu pentingnya meningkatkan silaturahmi visi dan misi dalam dunia pariwisata sebagai pengoptimalan pengembangan dari Kolaborasi Desa Wisata Harapan Jaya.

Sejauh ini komunikasi yang kurang lancar menjadi penyebab kurang optimalnya pengambilan keputusan bersama semua aktor, karena kepedulian teradap dunia pariwisata masih perlu di tingkatkan maka dari itu pentingnya pertemuan tatap muka, selain untuk mempermudah komunikasi, salah satu upaya untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik antar komponen. Selanjutnya untuk Desa Wisata Harapan Jaya adalah lebih fokus terhadap musyawarah antar kompenen dan aktor lain membuka rapat informal ataupun acara rapat formal sebagai wadah menampung masukan dan evaluasi untuk membangun kolaborasi yang optimal. Selain itu juga harus adanya keterbukaan informasi maupun menyampaikan masukan-masukan yang dapat di terima maupun yang tidak dapat di terima, untuk saling menghargai/menghormati antar pendapat aktor lain sehingga komunikasinya berjalan lancar dan kolaborasinya dapat terjalin dengan baik

### **Tanggung jawab bersama**

Keempat menurut (Gray, 1989) Konsep Kolaborasi merupakan bahwa pariwisata bukan lagi hanya tanggung jawab dari satu pihak melainkan membangun tanggung jawab bersama antar berbagai pihak. Dari hasil penelitian observasi konsep tersebut sudah berjalan sesuai dengan kondisi lapangan. Namun demikian, untuk konsep tanggung jawab sejauh ini masih belum ada hukum yang mengikat artinya berdasarkan (MOU) kerjasama. Sejauh ini kerjasama dalam desa wisata hanya beberapa pihak saja yang terjalin kolaborasi karna memang pentingnya sosialisasi sebagai salah satu untuk meningkatnya orang-orang yang berpartisipasi dalam desa wisata sei gohong. Menurut beberapa stakeholder yang bergerak dalam bidang pariwisata sejauh ini memang belum ada kerjasama yang secara resmi akan tetapi secara pribadi itu selalu mensupport pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya demi kemajuan Desa Wisata kita. Dan sejauh ini profesionalitas dan tanggung jawab dari berbagai kalangan itu terlihat dan dibuktikan dengan sejauh ini masih satu visi untuk mengenalkan Desa Wisata dan masih bisa di arahkan sebagai patner kerja desa wisata, namun memang perlu proses yang sangat panjang karena Desa Wisata Harapan jaya masih punya pekerjaan rumah, untuk bisa mengenalkan Desa Wisata Harapan Jaya dan menjual produk-produk yang unik yang menjadi perhatian publik, walaupun dengan masalah anggaran yang masih minim akan tetapi sejauh ini pengembangan komitmen dan profesionalisme dari kawasan ramah kunjungan terus di angkat dan di optimalkan.

### **BAB III**

#### **ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN**

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Naskah Akademik ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
4. Pasal 4 (ayat 1) Undang –Undang Dasar Negara Tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
6. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5262
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepariwisata
10. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 20)
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran
12. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2019 Tentang Desa Wisata : One Village One Destination

13. Bappeda Kabupaten Pesawaran. 2019. Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kepariwisataaan
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung
16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Bahari dan Warisan Budaya di Kabupaten Pesawaran
17. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Pantai, Kuliner dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pesawaran

## **BAB IV**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI PERATURAN DAERAH**

Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten tentang Kepariwisataaan ditujukan untuk memberikan landasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sekaligus pengembangan kepariwisataan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

A. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dengan tujuan rekreasi
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang dilakukan oleh pengusaha, masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
7. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan pariwisata
8. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi tujuan wisata adalah kawasan geografi yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dalam kegiatan pariwisata
9. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai Undang-Undang

10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah. Pemerintah daerah, dan pengusaha
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggaraan pariwisata
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/jasa guna pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
14. Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
15. Sapta pesona adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan
16. *Innovative Government* adalah Pemerintah Daerah yang memiliki inovasi menonjol di bidang tatakelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah
17. *Good Governance* (pemerintahan yang baik) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat
18. Kerjasama antar daerah diartikan suatu bentuk kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota, atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
19. Model Pentahelix adalah model yang berfokus pada 5 unsur yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata

diantaranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut.

20. Sinergitas adalah sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Jadi sinergi dapat dipahami pula sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Covey dalam Kurniawan & Suryawati (2017:40) mendefinisikan sinergitas sebagai sebuah kombinasi antar unsur maupun antar bagian yang akan memperoleh keluaran yang lebih baik dari sebelumnya.

B. Materi yang akan diatur dalam Naskah Akademik ini adalah penormaan tentang :

1. Pelaksanaan model kebijakan pengembangan industri pariwisata yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
2. Tahapan penilaian meliputi bidang:
  - a. Penilaian aspek – aspek kebijakan tentang pengembangan kawasan wisata Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung, Rumusan payung hukum tentang kebijakan pengembangan industri Pariwisata di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus
  - b.** Penilaian perumusan *draft* Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesawaran.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Demi meningkatkan Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya yang optimal perlu mendapatkan perhatian khusus, karena melihat dari rendahnya kesadaran kolektif berbagai aktor terhadap sikap abai, selalu menunggu arahan, dan kurangnya komunikasi antar aktor mengenai Desa Wisata Harapan Jaya . Rendahnya kemampuan pendanaan dan manajemen serta kreativitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam mengupayakan pembuatan produk- produk industri lokal kepariwisataan terutama menyangkut industri kerajinan tangan dan cendera mata juga mempengaruhi tingkat kurang optimalnya kolaborasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata Harapan Jaya

Namun demikian sejauh ini hadirnya desa wisata juga membawa dampak yang positif, pembukaan lapangan kerja baru, pelestarian lingkungan dengan kawasan yang berbudaya tradisional yang masih asri, walaupun sejauh ini dalam pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya masih belum sepenuhnya menjual keasrian lokalnya yang ada di kawasan Desa Wisata tersebut. Oleh karena itu, pentingnya Kolaborasi Model *Pentahelix*, dengan adanya keterlibatan Akademisi, Swasta, Komunitas, Pemerintah dan Media sangat lah penting untuk penunjangan wisata kedepannya. namun sejauh ini ini untuk kerjasama itu masih belum optimal di ukur dari saling ketergantungan antar aktor, penyatuan pemikiran secara konstruktif, keputusan bersama, dan tanggung jawab bersama, hanya pihak-pihak tertentu saja yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, sehingga nantinya ada perjanjian ataupun regulasi secara khusus untuk mengatur komponen-komponen tersebut bisa bekerjasama secara resmi dalam mengupayakan Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran ini

### **SARAN**

1. Adanya regulasi khusus sebagai faktor pendukung terjalannya kolaborasi *Pentahelix*
2. Program pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan, sangat penting untuk dilakukan, terutama berkaitan dengan pembinaan terhadap pengolahan dan pemasaran produk unggulan destinasi wisata setempat, termasuk bantuan anggaran

4. Koordinasi secara berkelanjutan bersama aktor-aktor pentahelix dalam pelaksanaan berbagai event pariwisata

**LAMPIRAN MATERI NASKAH AKADEMIK**

**MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA  
BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH  
DI PROPINSI LAMPUNG**

*“Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan  
Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran”*

**LEGAL DRAFT**

**TENTANG**

**MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  
PARIWISATA BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA  
ANTAR DAERAH DI PROPINSI LAMPUNG**

*“Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan  
Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran”*

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KONSIDERAN**

Menimbang : (1) bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan  
(2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI PROPINSI LAMPUNG

**KONSIDERAN**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
4. Pasal 4 (ayat 1) Undang –Undang Dasar Negara Tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
6. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5262
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepariwisata
10. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 20
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
4. Pasal 4 (ayat 1) Undang -Undang Dasar Negara Tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

6. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5262

7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan

9.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepariwisataan

10.Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 20



PRODUK PENELITIAN



*LEGAL DRAFT MODEL*

**NASKAH AKADEMIK**

*TENTANG*

**MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA  
BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH  
DI PROPINSI LAMPUNG**

*Sub judul tahun ke 3 : Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan  
Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran  
(penelitian tahun ke 3 dari rencana 3 tahun)*

oleh

**Dr. Noverman Duadji, M.Si  
Dra. Dian Kagungan, M.H  
Intan Fitri Meutia, P.hD**

*Dibiayai oleh ;*

*Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan  
Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi  
Nasional Sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor : 205/SP2H/LT/DRPM/2021*

**UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2021**

# **NASKAH AKADEMIK**

***TENTANG***

**MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA  
BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH  
DI PROPINSI LAMPUNG**

***“Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan Industri  
Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran”***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pariwisata di Propinsi Lampung tidak selesai jika berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, perguruan tinggi, masyarakat dan *media* harus saling *bersinergi*, sehingga potensi pariwisata dapat tergarap dengan maksimal. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersama membangun pariwisata Lampung, dan Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Tim Koordinasi lintas sektor sebagai upaya membangun pariwisata Lampung, dengan kata lain kolaborasi antar aktor pentahelix dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Propinsi Lampung sangatlah penting.

Peran penting Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan didasarkan bahwa pada pemikiran bahwa birokrasi memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala hal berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat suatu negara. Birokrasi juga berperan penting dalam melakukan berbagai tindakan antisipatif untuk menimalisasi berbagai dampak negatif, mengingat banyaknya potensi persoalan yang muncul dari kepariwisataan

Peran stakeholder terhadap pembangunan kepariwisataan juga tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, tidak terkecuali proses kolaboratif tata kelola pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung. Proses tatakelola pariwisata merupakan suatu proses *adaptive system, dan beorientasi pada konsensus*. Berbasis 2 pakar, yaitu : Anshell dan Gash (2008) memetakan proses kolaboratif yang dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (trust building), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), kemudian terbentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*)

Kolaborasi model pentahelix dalam pengembangan pariwisata desa wisata di lihat dari parameter keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan desa wisata. Proses kolaboratif pariwisata dan tatakelola pariwisata, diasumsikan akan terjadi jika terpenuhinya beberapa syarat, (i). Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi sebenarnya adalah *citizen power*, (menurut Arnstein) (ii). Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, berarti tidak ada dominasi tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki dan terdapat rasa saling menghormati (iii). Terdapat aktor-aktor yang kompeten

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : bagaimakah kolaborasi antar aktor pentahelix dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran?

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan model kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran yang menjadi lokasi penelitian ini.

Manfaat penelitian ini adalah : meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran tepatnya di desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratay

#### 1.2 Tujuan Khusus

1. Menghasilkan model kebijakan pengembangan industri pariwisata melalui kebijakan kerjasama antar daerah di Propinsi Lampung,

2. Menyusun naskah kebijakan/naskah akademik
3. Publikasi Jurnal Internasional
4. Buku ajar (ISBN)

## **B. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

***Tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:***

1. Merumuskan kerangka kebijakan ***jalinan kerjasama yang sinergis/ kolaboarsi antar aktor pentahelix*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota beserta stakeholder dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal
2. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang Model kebijakan ***jalinan kerjasama yang sinergis*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus, sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang ***jalinan kerjasama yang sinergis/kolaborasi antar aktor pentahelix*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota beserta stakeholder dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus, sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal

***Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah*** sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berdasarkan temuan persoalan dalam praktek tatakelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesawaran dalam hal ini adalah kebijakan ***jalinan kerjasama yang sinergis/kolaborasi antar aktor pentahelix*** antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota beserta stakeholder dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata di Propinsi Lampung dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu ***solusi efektif*** meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah studi lapang dan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil pengkajian dan dokumen pendukung lainnya.

## BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

### A. Kajian Teoritis

#### 2.1 Pengertian Pariwisata dan Industri Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataaan berarti keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. (Sedarmayanti, 2014)

Industri pariwisata: usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan, tujuan kepariwisataan, yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Menghapus kemiskinan.
- d. Mengatasi pengangguran.
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya.
- f. Memajukan kebudayaan.
- g. Mengangkat citra bangsa.
- h. Memupuk rasa cinta tanah air.
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Untuk mengembangkan kegiatan wisata daerah, tujuan wisata harus memiliki:

- a. Objek/atraksi dan daya tarik wisata.
- b. Transportasi dan infrastruktur.
- c. Akomodasi( tempat menginap).
- d. Usaha makanan dan minuman.
- e. Jasa pendukung lainnya (hal yang mnedukung kelancaran berwisata, misal: biro perjalanan, cinderamata, informasi, pemandu, kantor pos, bank, penukaran uang, internet, wartel, pulsa, salon, dan lain-lain). (Unesco, 2009).

#### 2.2 Konsep Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan

Da lam kehidupan di negara moderen saat ini, kegiatan pembangunan termasuk pembangunan kepariwisataan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik pula. Kebijakan yang baik dapat diilustrasikan seperti seorang dlrigen yang mengatur permainan sebuah orkestra yang terdiri dari banyak pemain musik dengan jenis alat musik yang berbeda-beda jenis, suara, dan wakyu memainkannya, sehingga menghasilkan sebuah lagu yang sangat indah. Dengan demikian setiap insan pariwisata, dan terlebih lagi para birokrat, baik di lingkungan Pemerintah maupun Pemrintahan daerah, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dalam kepariwisataan.

Ditinjau dari aspek kebutuhan praktis, pembahasan tentang teori-tori yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan seringkali tidak terlalu diprhatikan. Orang yang mendengar istilah "kebijakan pembangunan kepariwisataan" pada umumnya secara otomatis akan memfokuskan perhatiannya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam penggolongan kepariwisataan. Namun demikian, beberapa teori terkait dengan konsep dimaksud perlu diungkapkan dalam

tulisan ini karena membantu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan kepariwisataan. Ketika kita berbicara mengenai masalah kebijakan pembangunan kepariwisataan, maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian istilah "kebijakan" dan "pembangunan". Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, istilah "kebijakan" didefinisikan sebagai:

"(1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjad garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemeritahan , organisasi, dsb); pernyataan cita-cita , tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan."

Sementara itu dalam Kamus Merriam-webster, istilah "*policy*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kebijakan", diartikan sebagai aturan atau ide secara resmi di akui sebagai pedoman untuk menentukan pelaksanaan aktivitas: "*an offcially accepeted set of rules or idieas about what should be done*". Dengan demikian istilah "*policy*" atau "kebijakan" (khususnya definisi nommer 2) pada prinsipnya adalah parameter yang dijadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakan sebuah aktivitas. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah bahwa tidak dijelaskan secara tegas apakah "kebijakan" juga meliputi perturan perundang-undangan. Hal tersebut berbeda dengan istilah "*policy*" yang lebih jelas pengertiannya.

Definisi sederhana lainnya mengenai istilah tersebut adalah arah tindakan atau cara bertindak dipilih dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kondisi faktual, yang menentuka pengambilan keputusan dimasakini dan masa depan: "*A definite course or method of action selected from among alternatives and in the light on given conditions to guede and determine present and future decisions*". Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, menurut Edgell dan Swanson (2013), pemahaman mengenai kebijakan dibidang kepariwisataan akan menjadi lebih mudah jika dimulai dari definisi Thomas Dye mengenai "kebijakan publik", yaitu tindakan apapun melakukan atau tidak melakukan yang dipilih oleh pemerintah: "*whatever government choose to do or not to to*".

Sementara itu, istilah "pembangunan" diartikan sebagai suatu proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa (Sasmojo, 2004 : 1), tentunya ke arah yang lebih baik. Jika kemudian dikaitkan dengan kedua istilah tersebut dan istilah "kebijakan publik", maka "kebijakan pembangunan" akan memiliki pengertian sebagai *parameter yang secara resmi diakui yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman oleh Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi terwujudnya proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa ke arah yang lebih baik*.

Dalam bidang kepariwisataan, dikenal pula istilah dalam bahasa Inggris yaitu "*tourism policy*". Menurut Goeldner dan Ritchie (2009:414), istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

*"Tourism policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strategies taht provide a framework within which the collective and individual decisions directly affecting long-term tourism development and the daily activities within a destination are taken"*.

Pendapat lain mengenai istilah ini diungkapkan pula oleh Paul S. Biederman (2008) didalam buku yang berjudul *Travel and Tourism: An Industry Primer*, yang menambahkan aspek sosial didalam kebijakan kepariwisataan:

*"A tourism policy defines the direction or course of action that a particular country, region, localty, or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The ker principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or localty) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of tourism policy is to improve the progress of the nation (region or localty) and the lives of its citizens."*

Kedua definisi tersebut diatas memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan *tourism policy* atau yang penulis terjemahkan sebagai “kebijakan dibidang kepariwisataan” adalah berbagai macam aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata yang menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan dalam jangka pendek dan panjang. Kebijakan ini harus memberikan jaminan bahwa tujuan utamanya adalah membuat masyarakat yang bersangkutan yang tinggal didestinasinya pariwisata memperoleh keuntungan optimal dari kontribusi kepariwisataan dibidang sosial dan ekonomi dalam bentuk kemajuan dan kualitas hidup. Jika dikaitkan dengan konsep pembangunan, maka berarti aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata tersebut harus mengarah kepada perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa.

Edgell dan Swanson (2013) berpendapat bahwa pada intinya kebijakan dibidang kepariwisataan adalah setiap tindakan pemerintah baik di bidang legislatif, administratif, maupun yudisial yang berpengaruh terhadap kepariwisataan. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas pemasaran, perencanaan dan keberlanjutan. Menurut mereka bentuk kebijakan tersebut adalah berbagai pedoman (aturan), prinsip dan prosedur, yang disusun secara etis dan sifatnya fokus terhadap suatu persoalan serta mewakili harapan suatu masyarakat (atau bangsa) dalam hubungannya dengan aspek perencanaan, pembangunan, produk, jasa, pemasaran dan aspek keberlanjutannya.

### 1.1 Konsep Sinergitas

Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Jadi sinergi dapat dipahami pula sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Covey dalam Kurniawan & Suryawati (2017:40) mendefinisikan sinergitas sebagai sebuah kombinasi antar unsur maupun antar bagian yang akan memperoleh keluaran yang lebih baik dari sebelumnya. Indikator dalam menganalisis sinergitas menurut pendapat doctoroff meliputi indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, serta kreativitas antar pihak terkait yang menjadi syarat utama bagi sebuah sistem sinergi yang ideal

Sofyandi & Garniwa dalam Rahmawati dkk (2014:643) mengemukakan bahwa Sinergitas dapat terbangun dengan baik melalui dua cara diantaranya

1. Komunikasi yang berorientasi pada sumber yang memandang bahwa komunikasi sebagai kegiatan dengan seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan, dan komunikasi yang berorientasi pada penerima yang memandang komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

2. Koordinasi

Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Dalam hal ini Silalahi dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan koordinasi sebagai bentuk integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam sebuah usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.

Moekijat dalam Rahmawati dkk (2014:643) menyebutkan terdapat 9 (sembilan) syarat utama dalam mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

- 1 Hubungan langsung yang akan mempermudah pencapaian melalui hubungan pribadi secara langsung
- 2 Kesempatan awal dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3 Kontinuitas koordinasi yang harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan
- 4 Dinamisme, koordinasi harus terus menerus
- 5 Tujuan yang jelas untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- 6 Organisasi yang sederhana untuk memudahkan koordinasi yang efektif.

- 7 Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang akan mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan serta membantu dalam hal pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 8 Komunikasi yang efektif
- 9 Kepemimpinan supervisi yang efektif yang akan menjamin koordinasi kegiatan baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat evaluasi.

Sinergitas dalam pencapaian tujuan dapat terlaksana melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Konsep sinergitas merupakan upaya yang harus dilakukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan maupun non pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

## 1.2 Konsep Model Pentahelix

Model pentahelix pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arief Yahya yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan, memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran pengusaha, pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media.

Kotler et al dalam Saputri (2020:24) menyatakan bahwa destinasi wisata akan mendapatkan sebuah keunggulan dalam bersaing apabila masing-masing dari organisasi yang terlibat dapat berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sumber daya lain yang dapat mendukung proses pengembangan pariwisata. Dalam hal ini model pentahelix berfokus pada 5 unsur yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata diantaranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut.

## 1.3 Peran Aktor Pentahelix

Pengelolaan sektor pariwisata tidak terlepas dari peran stakeholder dalam proses pengembangannya. Terdapat 5 (lima) aktor yang ikut berkontribusi secara aktif dalam proses pengembangan sektor pariwisata, diantaranya

### a. Pemerintah

Dalam proses pengembangan sektor pariwisata, pemerintah berperan dalam proses penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung perkembangan pariwisata, menyiapkan kebijakan maupun peraturan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, memberikan fasilitas yang memadai dan melakukan kegiatan promosi serta pemasaran destinasi wisata tersebut. Peran pemerintah dalam pembuat kebijakan maupun regulasi dibidang pariwisata akan mempengaruhi proses pengembangan pariwisata tersebut. Pemerintah juga berperan secara langsung didalam pengembangan regulasi dibidang pariwisata, mengendalikan proses pengembangan pariwisata, serta berperan langsung dalam memperkuat kelembagaan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam merumuskan kebijakan atau regulasi.

### b. Akademisi

Akademisi dalam proses pengembangan pariwisata berperan dengan melakukan kajian ilmiah serta berbagai riset dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah. Hasil dari kajian ilmiah dan pengabdian masyarakat yang dilakukan para akademisi dapat dimanfaatkan untuk penunjang keberhasilan sektor pariwisata dengan melakukan kerjasama serta komunikasi dengan para akademisi dalam proses pengembangan agrowisata.

c. Dunia usaha

Dalam proses pengembangan pariwisata, dunia usaha atau swasta berperan penting dalam penyelenggaraan bisnis disektor pariwisata yang mengutamakan etika bisnis, profesional, bertanggung jawab serta berkelanjutan. Dunia usaha berperan sebagai *profit oriented* yang akan bertanggungjawab dalam keberlanjutan lingkungan sebagai hal yang sangat penting dalam sektor pariwisata.

d. Komunitas

Komunitas dalam proses pengembangan pariwisata terdiri dari masyarakat dan LSM atau NGO yang berperan mendukung sapta pesona dengan menyediakan jasa pariwisata atau ekonomi kreatif. Masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pengembangan pariwisata.

e. Media

Media berperan pada bidang informasi dan promosi pariwisata. Promosi dan pemasaran bidang pariwisata yang bersifat inklusif dengan memanfaatkan media sosial.

### ***Studi Pendahuluan yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai***

Hasil penelitian Kagungan, 2009 dan Yulia (2012) tentang Penataan Kawasan Industri Pariwisata pesisir Bandar Lampung berbasis *Integrated Coastal Zone Management* menyimpulkan keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir menjadi kawasan industri pariwisata yang "*layak jual*" mencakup 4 (empat) aspek (i) keterpaduan wilayah/ekologis (ii) keterpaduan sektor (iii) keterpaduan disiplin ilmu (iv) keterpaduan *stakeholder*.

Hasil penelitian dan kajian Neta (2012) dan Ratnasari (2014) menyimpulkan bahwa dari sisi pemberdayaan masyarakat, penataan kawasan industri pariwisata pesisir Bandar Lampung akan sangat menguntungkan para nelayan di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini berada pada posisi *regulator* dan penyedia *infrastruktur* jika dipaksakan sebagai pengelola kawasan, dikhawatirkan terbuka peluang penyimpangan. Oleh karena itu dalam pengelolaan kawasan pesisir Bandar Lampung menjadi kawasan industri pariwisata yang handal dan layak jual patut mempertimbangkan keterlibatan dan peran serta para *stakeholders* lainnya.

Menurut kajian kami sebagai peneliti, model kebijakan pengembangan industri pariwisata berbasis kearifan lokal melalui kebijakan kerjasama antar daerah di Propinsi Lampung yang akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat harus memiliki ***tema sentral*** sebagai sesuatu yang layak jual. Tema sentral perlu dipilih dan ditetapkan agar dari sisi *marketing* kawasan pesisir menjadi lebih layak jual. Terlebih anggaran pembangunannya bukan hanya berasal dari pemerintah tetapi juga berasal dari kalangan investor yang membutuhkan ***value added*** ketika memilih berinvestasi di kawasan pesisir.

Selanjutnya hasil penelitian Putra, Rizki (2019) dan ***Kagungan, Duadji. Noverman dan Meutia (2019)*** secara umum menyimpulkan bahwa : Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus meliputi :

***a. Daya Tarik (attraction)***

*Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam penatakelolaan area wisata menuju industri pariwisata berbasis kearifan lokal dilakukan melalui program **One Village One Destination (satu desa satu destinasi wisata)**. Pemerintah Kabupaten Pesawaran berusaha mengembangkan desa-desa di Pesawaran untuk dijadikan sebagai destinasi*

wisata. Dari 148 desa di Pesawaran saat ini sudah 50 desa yang mengembangkan destinasi wisata, selanjutnya akan dipilih 16 desa yang berdaya saing dengan destinasi unggulannya. Dimana nantinya setelah terpilih 16 besar, dari ke 16 desa tersebut dalam skala even baik propinsi maupun nasional.

Melalui program *one village one destination* diharapkan dapat menyuguhkan daya tarik wisata sesuai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Meskipun demikian, Pemerintah setempat tetap perlu membenahi fasilitas-fasilitas pendukung, antara lain ketersediaan toko-toko atau gerai-gerai penjual suvenir, fasilitas rumah makan bagi pengunjung, dan sarana pendukung lainnya.

#### ***b.Accessible***

Strategi pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memenuhi kebutuhan wisatawan mendapatkan kemudahan aksesibilitas (*accessible*) antara lain akan ditingkatkannya kualitas angkutan umum sejak tahun 2017-2021, pengembangan prasarana telekomunikasi (pengembangan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan mikro mempergunakan jaringan kabel bawah laut sepanjang tahun 2017-2021.

Strategi pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan pariwisata secara umum sudah baik (prasarana informasi dan sistem telekomunikasi telah tersedia) namun yang perlu dibenahi adalah prasarana transportasi, beberapa ruas jalan tanah yang masih menjadi kendala, juga terjadinya kemacetan apabila hari libur tiba. Tentunya hal ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pesawaran khususnya, agar aksesibilitas objek-objek wisata di kawasan Kecamatan Teluk Pandan menjadi lebih baik lagi.

#### ***c.Amenittis***

Salah satu syarat daerah tujuan wisata (DTW) adalah fasilitas dari objek wisata, antara lain fasilitas penginapan, MCK, dan fasilitas parkir. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesawaran maupun Kabupaten Tanggamus telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik antara lain, penyediaan fasilitas penginapan, tempat peristirahatan bagi wisatawan, sarana parkir yang luas dan representatif, restaurant, dan sarana MCK yang cukup memadai bagi wisatawan.

#### ***d.Ancillary (lembaga pengelola)***

Lembaga pengelola yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah, pengelola objek wisata dan investor.

### **Selanjutnya, hasil penelitian Duadji, Kagungan dan Meutia (2020) menyimpulkan :**

Secara umum strategi pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

#### **1. daya tarik**

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mengelola kawasan pariwisata menuju industri pariwisata berbasis kearifan lokal dilakukan melalui program One Village One Destination. Pemerintah Kabupaten Pesawaran sedang mencoba untuk menjadikan desa- desa di Kabupaten Pesawaran sebagai tujuan wisata. Dari 148 desa di Kabupaten Pesawaran saat ini 50 desa telah mengembangkan destinasi wisata, kemudian akan dipilih

16 desa berdaya saing dengan destinasi unggulannya. Dimana kedepannya setelah 16 besar terpilih, dari 16 desa dalam skala event baik provinsi maupun nasional. Program OVOD (*one village one destination*) diharapkan dapat menghadirkan tempat-tempat wisata yang sesuai dengan potensi daerahnya. Industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal menjadi salah satu daya tarik agar wisatawan ingin berkunjung ke sana. Selain menarik wisatawan, daya tarik suatu destinasi pariwisata juga dibutuhkan untuk menarik investor. Prasyarat agar industri kepariwisataan berfungsi dengan baik adalah daya tarik investasi, karena untuk memastikan efektivitas setiap bidang kegiatan ekonomi perlu memiliki sumber daya, sedangkan alokasi dana publik tidak sepenuhnya menutupi pemeliharaan dan pengembangannya. (Kozmenko et al., 2015)

Daya tarik investasi dari sektor pariwisata merupakan kombinasi dari faktor mikro dan tingkat makro yang membantu calon investor membentuk gambaran umum daerah tersebut dan memberikan kesempatan untuk menilai daya tariknya. Daya tarik investasi bergantung pada faktor-faktor berikut: tingkat sosial ekonomi, perkembangan objek penelitian, kegiatan investasi; tingkat perkembangan kepariwisataan, khususnya dinamika arus wisata, penyediaan prasarana wisata, ketersediaan sumber daya investasi dan lain-lain(Kozmenko et al., 2015).Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan fasilitas pendukung, antara lain ketersediaan toko atau toko souvenir, fasilitas restoran bagi pengunjung, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pernyataan dan Daya Saing (2010) Pariwisata berkontribusi pada aktivitas di hampir setiap industri di seluruh perekonomian. Proses dimana konsumen (pengunjung) datang ke produk (tujuan), mengkonsumsi produk pariwisata yang dapat diidentifikasi dan juga menimbulkan biaya hidup sehari-hari di tempat tujuan tersebut adalah unik di antara pasar barang dan jasa yang diperdagangkan. Sifat produk dan jasa yang sangat luas yang dikonsumsi oleh wisatawan menghadirkan masalah-masalah tertentu yang tidak umum terjadi di pasar produk lain. Selain itu, pariwisata memiliki pengaruh sosial di berbagai bidangseperti kejahatan, kesehatan, kemacetan, harga tanah dan lainnya, serta fasilitas perkotaan.

## 2. Dapat diakses

Pariwisata yang dapat diakses adalah bentuk pariwisata yang melibatkan proses

kolaboratif antara pemangku kepentingan yang memungkinkan orang-orang dengan persyaratan akses, termasuk mobilitas, penglihatan, pendengaran dan dimensi kognitif akses, untuk berfungsi secara mandiri dan dengan kesetaraan dan martabat melalui penyampaian yang dirancang secara universal (Pernyataan & Daya Saing, 2010) produk, jasa dan lingkungan pariwisata (Buhalis & Darcy, 2012). Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memenuhi kebutuhan wisatawan akan kemudahan aksesibilitas meliputi peningkatan kualitas angkutan umum sejak tahun 2017-2021, pembangunan infrastruktur telekomunikasi (pengembangan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan mikro dengan menggunakan jaringan kabel bawah laut sepanjang tahun 2017-2021. Kabupaten Pesawaran Strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata umumnya sudah baik (infrastruktur informasi dan sistem telekomunikasi tersedia) namun yang perlu dibenahi adalah infrastruktur transportasi, beberapa jalan tanah yang masih menjadi kendala, dan kemacetan saat hari raya terjadi tentunya menjadi tanggung jawab Kabupaten Pesawaran. pemerintah pada khususnya, sehingga aksesibilitas objek wisata di Kecamatan Teluk Pandan menjadi lebih baik.

### 3. Menittis

Menurut Carlsen dan Butler (2011) Ada empat strategi utama yang digunakan oleh lembaga taman untuk mengendalikan dan mengelola wisata bahari; ini termasuk strategi regulasi, fisik (yaitu infrastruktur), pendidikan dan ekonomi. atraksi, antara lain fasilitas penginapan, toilet, dan fasilitas parkir. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik antara lain jumlah fasilitas penginapan, tempat istirahat bagi wisatawan, fasilitas parkir yang luas dan representatif, restoran, serta fasilitas toilet yang memadai bagi wisatawan.

### 4. Insillary

Kelembagaan pengelolaan yang dimaksud disini adalah pemerintah, pengelola objek wisata dan investor. Berdasarkan uraian di atas maka strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus dalam pengelolaan industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. , yang umumnya bertujuan:

- a) Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan berkelanjutan
- b) Menata perencanaan pembangunan daerah yang terencana dengan baik
- c) Promosi potensi daerah
- d) Mengoptimalkan kekayaan alam wilayah
- e) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- f) Menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat lokal
- g) Mendukung pembangunan daerah, provinsi dan nasional

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di masing-masing Kabupaten melibatkan peran investor, baik pihak swasta maupun pihak lainnya. Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan menjadi obyek wisata terpadu (integrated area tourism) antara wisata alam, wisata budaya hingga pertemuan, insentif, konferensi dan pameran (MICE) pariwisata.

### KESIMPULAN

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sendiri tengah menyiapkan skema percepatan pemulihan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif di Provinsi Lampung setelah pandemi COVID-19. Dengan beberapa skema salah satunya menyiapkan pariwisata berwawasan lingkungan, berwawasan kesehatan, serta berwawasan keamanan sebagai upaya membangun kembali sektor pariwisata. Pemerintah Provinsi Lampung Kabupaten/Kota bersinergi dalam menangani dan membangun kembali industri pariwisata dari dampak Covid-19,

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan tiga tahapan untuk merespon dampak Covid-19 yaitu tanggap darurat, pemulihan (recovery), dan normalisasi. Di tahap tanggap darurat, memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan untuk menyiapkan akomodasi, makanan, hingga transportasi. Selain itu berkoordinasi dengan K/L dan berbagai pihak terkait dalam

mengambil langkah-langkah untuk mendukung industri atau pelaku pariwisata Indonesia. Pada tahap kedua yaitu pemulihan, Kemenparekraf akan berkoordinasi dengan K/L lain untuk mengidentifikasi dampak secara detail akibat wabah Covid-19.

Secara resmi pemerintah Lampung belum mengeluarkan kebijakan strategi di bidang pariwisata terdampak covid-19. Pemerintah daerah dalam hal ini masih mengikuti kebijakan Nasional yang di buat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun semua pariwisata di Indonesia menurut Wishnutama selaku Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif akan menerapkan strategi yang berfokus pada memperbaiki hal dasar terkait higienitas, keselamatan, dan keamanan, serta mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar, hal itu pula yang nantinya akan di terapkan oleh pemerintah Propinsi Lampung agar masyarakat tidak lagi khawatir tentang kebersihan pariwisata dan lebih merasa aman saat melakukan wisata di daerah tersebut.

Saran/rekomendasi yang penting dari hasil penelitian ini adalah :

a. Pentingnya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadapobyek wisata “baru” air terjun Way lalaan dan pantai Terbaya yang sangat berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten tersebut tanpa mengabaikan peran sertakelompok sadar wisata dan masyarakat lokal

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok sadar wisata melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan baik melalui pelatihan, bantuan anggaran dan evaluasi rutin kegiatan pokdarwis, dalam rangka membangkitkan kembali gairah pariwisata di Kabupaten Pesawaran, KabupatenTanggamus dan kabupaten Lampung Selatan seiring menyambut era new normal dan tetap menerapkan standar operating procedure covid 19 demi keselamatan pengelola dan pengunjung

c. Strategi pengembangan pariwisata di Propinsi Lampung harus menerapkan strategi yang berfokus pada memperbaiki hal dasar terkait higienitas, keselamatan, dan keamanan, serta mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar.

d. Pentingnya strategi inovasi untuk terus berkreasi dalam rangka mengembangkan industri pariwisata di Propinsi Lampung selain pemanfaatan website desa wisata, jalinan kerjasama dengan stakeholder, penguatan peran kelembagaan kelompok sadar wisata

e. Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah harus seiring sejalan dengan dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung, agar tidak terkesan pengembangan industri pariwisata daerahb di Propinsi Lampung berjalan sendiri-sendiri

f. Kebijakan pariwisata yang perlu diperkuat, antara lain dukungan kepada industri danpelaku

pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), dukungan anggaran, subsidi pendidikan pariwisata, penguatan SOP Mitigasi Pariwisata, prioritas pada pembenahan destinasi, meningkatkan peran pokdarwis di desa wisata sebagai tim gugus desa yang dibina oleh Kemenparekraf cq Dinas Pariwisata Kab Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan Lampung Selatan, dan penguatan regulasi masuknya wisatawan mancanegara

Luaran yang telah dicapai dari hasil penelitian tahap 2 tahun 2020 :

1. Legal draft model
2. Artikel Ilmiah yang telah di submit pada Jurnal terindex
4. Buku Referensi dalam proses ISBN

## Hasil

### **Kolaborasi Model *Pentahelix* dan Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya**

Pada tahap Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay parameter yang dilihat adalah bagaimana keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan di desa wisata Harapan Jaya dan menciptakan Karakteristik ciri khas produk pariwisata yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan potensi desa wisatanya seperti pengelolaan usaha-usaha kerajinan lokal yang menjadi ciri khas budaya daerah, destinasi wisata air terjun, pengelolaan usaha kuliner khas daerah, pengelolaan usaha penginapan, dan juga pengelolaan usaha berupa warung dan toko-toko untuk kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari.

#### **Saling Ketergantungan**

Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Saling Ketergantungan adalah salah satu tolak ukur untuk melihat optimalnya sebuah pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya, Menurut (Grey, 1989) dalam melihat terciptanya kolaborasi salah satunya melalui komponen saling ketergantungan dalam dunia pariwisata. Maka dari itu dalam sebuah penelitian ini peneliti menuliskan menurut hasil observasi penelitian Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya masih belum sepenuhnya optimal sesuai dengan teori saling ketergantungan, yang dimana menurut stakeholder pariwisata untuk menumbuhkan rasa ketergantungan antar aktor perlunya pemberdayaan terutama SDM, budaya dan mainset yang sama agar memahami Proporsionalitas dan Kelemahan tiap aktor untuk ambil bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam mengembangkan Desa Wisata Harapan Jaya. Se jauh ini, masyarakat, pemerintah, akademisi, komunitas dan media masih belum terlalu eksis Dalam Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya maka dari itu perlunya menumbuhkan kesadaran antar aktor karena sejauh ini tingkat kesadaran kita dalam dunia pariwisata masih sangat rendah, masih saling bekerja sendiri (swadaya) karna menurut pengakuan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sendiri untuk meningkatkan saling ketergantungan terhadap aktor lain itu masih belum ada karena memang belum adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait namun pihak POKDARWIS juga tidak ingin dengan adanya ketergantungan terhadap pihak lain; inovasi dan kreativitas mereka tidak berkembang.

#### **Penyatuan Pemikiran Secara Konstruktif Untuk Mencapai Solusi**

Komponen yang kedua Menurut (Gray, 1989) untuk terciptanya sebuah kolaborasi yaitu melalui penyatuan pemikiran secara konstruktif untuk menyamakan visi & misi dan mendapatkan solusi dalam pengembangan. Desa Wisata Harapan Jaya sejauh ini masih sangat perlu di perhatikan dan memerlukan banyak ide serta inovasi dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Harapan Jaya, maka dari itu peran kolaborasi berbagai komponen sangat penting dalam upaya pengembangan desa wisata yang berbasis budaya untuk memberi masukan dan gagasan pola pikir yang kreatif dalam membangun sebuah kawasan desa wisata.

Namun sejauh ini dari hasil observasi penelitian, peneliti menjabarkankan problem yang sering di temukan dalam membangun kolaborasi pariwisata dalam desa wisata Harapan Jaya, kurangnya kesadaran dalam bekerjasama dalam bidang pariwisata dengan aktor lain sehingga belum optimalnya kerjasama dalam menyatukan pola pikir dalam pengembangan desa wisata itu sendiri karena belum ada visi dan misi yang sama, maka dari itu partisipasi dari pihak lain tentu membawa dampak positif bagi pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya karena banyaknya partisipasi tentu akan menambah tingkat kepedulian terhadap pariwisata. Namun demikian tidak melupakan adanya dampak negatif juga, karna dalam menjalin kolaborasi tidak hanya modal tanda tangan di atas kertas saja, tetapi juga ada beban moral dan tanggung jawab serta tantangan yang di hadapi kedepannya, salah satunya adalah konsistennya aktor lain yang siap bekerjasama dan tantangan menyatukan pola pikir berbagai aktor karna tentunya dengan partisipasi yang banyak mempunyai pola pikir yang berbeda- beda, maka dari itu solusi untuk mengatasi berbagai konflik agar sejalan dengan apa yang di harapkan harus mengadakan pertemuan rutin minimal 1 kali dalam 2 minggu yang di adakan oleh pihak pariwisata, dengan adanya tatap muka akan menjalin silaturahmi berbagai komponen untuk saling sharing dan ngobrol santai untuk berbicara tentang perencanaan, pengeloan serta bagaimana kelanjutan program pariwisata untuk kedepannya untuk menyatukan pola pikir yang konstruktif berbagai komponen.

### **Keputusan Bersama Semua Aktor (*Joint Ownership of Decisions*)**

Konsep yang ketiga menurut (Gray, 1989) kolaborasi tercipta berdasarkan keputusan bersama antar aktor dalam penentuan kebijakan. Sejauh ini dari hasil observasi penelitian yang di lakukan di Desa Wisata Harapan Jaya sudah mulai terlihat dengan adanya Musrenbang dalam pembangunan pariwisata dengan mengundang tokoh-tokoh, pihak kelurahan, dinas pariwisata, akademisi, media, dan swasta serta kalangan lain yang terlibat dalam Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran ini. Namun demikian, sejauh ini memang masih belum optimal dari segi pertemuan sehingga untuk pengambilan keputusan masih belum berdasarkan kesepakatan bersama, karena memang sejauh ini berjalan nya pariwisata

hanya swadaya dan hanya beberapa komponen saja yang terlibat, makadari itu pentingnya meningkatkan silaturahmi visi dan misi dalam dunia pariwisata sebagai pengoptimalan pengembangan dari Kolaborasi Desa Wisata Harapan Jaya.

Sejauh ini komunikasi yang kurang lancar menjadi penyebab kurang optimalnya pengambilan keputusan bersama semua aktor, karena kepedulian teradap dunia pariwisata masih perlu di tingkatkan maka dari itu pentingnya pertemuan tatap muka, selain untuk mempermudah komunikasi, salah satu upaya untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik antar komponen. Selanjutnya untuk Desa Wisata Harapan Jaya adalah lebih fokus terhadap musyawarah antar kompenen dan aktor lain membuka rapat informal ataupun acara rapat formal sebagai wadah menampung masukan dan evaluasi untuk membangun kolaborasi yang optimal. Selain itu juga harus adanya keterbukaan informasi maupun menyampaikan masukan-masukan yang dapat di terima maupun yang tidak dapat di terima, untuk saling menghargai/menghormati antar pendapat aktor lain sehingga komunikasinya berjalan lancar dan kolaborasinya dapat terjalin dengan baik

### **Tanggung jawab bersama**

Keempat menurut (Gray, 1989) Konsep Kolaborasi merupakan bahwa pariwisata bukan lagi hanya tanggung jawab dari satu pihak melainkan membangun tanggung jawab bersama antar berbagai pihak. Dari hasil penelitian observasi konsep tersebut sudah berjalan sesuai dengan kondisi lapangan. Namun demikian, untuk konsep tanggung jawab sejauh ini masih belum ada hukum yang mengikat artinya berdasarkan (MOU) kerjasama. Sejauh ini kerjasama dalam desa wisata hanya beberapa pihak saja yang terjalin kolaborasi karna memang pentingnya sosialisasi sebagai salah satu untuk meningkatnya orang-orang yang berpartisipasi dalam desa wisata sei gohong. Menurut beberapa stakeholder yang bergerak dalam bidang pariwisata sejauh ini memang belum ada kerjasama yang secara resmi akan tetapi secara pribadi itu selalu mensupport pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya demi kemajuan Desa Wisata kita. Dan sejauh ini profesionalitas dan tanggung jawab dari berbagai kalangan itu terlihat dan dibuktikan dengan sejauh ini masih satu visi untuk mengenalkan Desa Wisata dan masih bisa di arahkan sebagai patner kerja desa wisata, namun memang perlu proses yang sangat panjang karena Desa Wisata Harapan jaya masih punya pekerjaan rumah, untuk bisa mengenalkan Desa Wisata Harapan Jaya dan menjual produk-produk yang unik yang menjadi perhatian publik, walaupun dengan masalah anggaran yang masih minim akan tetapi sejauh ini pengembangan komitmen dan profesionalisme dari kawasan ramah kunjungan terus di angkat dan di optimalkan.

### **BAB III**

#### **ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN**

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Naskah Akademik ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
4. Pasal 4 (ayat 1) Undang -Undang Dasar Negara Tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
6. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5262
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepariwisata
10. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 20)
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran
12. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2019 Tentang Desa Wisata : One Village One Destination

13. Bappeda Kabupaten Pesawaran. 2019. Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kepariwisataaan
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung
16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Bahari dan Warisan Budaya di Kabupaten Pesawaran
17. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Pantai, Kuliner dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pesawaran

## **BAB IV**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI PERATURAN DAERAH**

Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten tentang Kepariwisataaan ditujukan untuk memberikan landasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sekaligus pengembangan kepariwisataan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

A. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dengan tujuan rekreasi
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang dilakukan oleh pengusaha, masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
7. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan pariwisata
8. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi tujuan wisata adalah kawasan geografi yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dalam kegiatan pariwisata
9. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai Undang-Undang

10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah daerah, dan pengusaha
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggaraan pariwisata
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/jasa guna pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
14. Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
15. Sapta pesona adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan
16. *Innovative Government* adalah Pemerintah Daerah yang memiliki inovasi menonjol di bidang tatakelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah
17. *Good Governance* (pemerintahan yang baik) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat
18. Kerjasama antar daerah diartikan suatu bentuk kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota, atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
19. Model Pentahelix adalah model yang berfokus pada 5 unsur yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata

diantaranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut.

20. Sinergitas adalah sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Jadi sinergi dapat dipahami pula sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Covey dalam Kurniawan & Suryawati (2017:40) mendefinisikan sinergitas sebagai sebuah kombinasi antar unsur maupun antar bagian yang akan memperoleh keluaran yang lebih baik dari sebelumnya.

B. Materi yang akan diatur dalam Naskah Akademik ini adalah penorma-an tentang :

1. Pelaksanaan model kebijakan pengembangan industri pariwisata yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
2. Tahapan penilaian meliputi bidang:
  - a. Penilaian aspek – aspek kebijakan tentang pengembangan kawasan wisata Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung, Rumusan payung hukum tentang kebijakan pengembangan industri Pariwisata di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus
  - b.** Penilaian perumusan *draft* Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesawaran.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Demi meningkatkan Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya yang optimal perlu mendapatkan perhatian khusus, karena melihat dari rendahnya kesadaran kolektif berbagai aktor terhadap sikap abai, selalu menunggu arahan, dan kurangnya komunikasi antar aktor mengenai Desa Wisata Harapan Jaya . Rendahnya kemampuan pendanaan dan manajemen serta kreativitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam mengupayakan pembuatan produk- produk industri lokal kepariwisataan terutama menyangkut industri kerajinan tangan dan cendera mata juga mempengaruhi tingkat kurang optimalnya kolaborasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata Harapan Jaya

Namun demikian sejauh ini hadirnya desa wisata juga membawa dampak yang positif, pembukaan lapangan kerja baru, pelestarian lingkungan dengan kawasan yang berbudaya tradisional yang masih asri, walaupun sejauh ini dalam pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya masih belum sepenuhnya menjual keasrian lokalnya yang ada di kawasan Desa Wisata tersebut. Oleh karena itu, pentingnya Kolaborasi Model *Pentahelix*, dengan adanya keterlibatan Akademisi, Swasta, Komunitas, Pemerintah dan Media sangat lah penting untuk penunjangan wisata kedepannya. namun sejauh ini ini untuk kerjasama itu masih belum optimal di ukur dari saling ketergantungan antar aktor, penyatuan pemikiran secara konstruktif, keputusan bersama, dan tanggung jawab bersama, hanya pihak-pihak tertentu saja yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, sehingga nantinya ada perjanjian ataupun regulasi secara khusus untuk mengatur komponen-komponen tersebut bisa bekerjasama secara resmi dalam mengupayakan Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran ini

### **SARAN**

1. Adanya regulasi khusus sebagai faktor pendukung terjalannya kolaborasi *Pentahelix*
2. Program pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan, sangat penting untuk dilakukan, terutama berkaitan dengan pembinaan terhadap pengolahan dan pemasaran produk unggulan destinasi wisata setempat, termasuk bantuan anggaran

4. Koordinasi secara berkelanjutan bersama aktor-aktor pentahelix dalam pelaksanaan berbagai event pariwisata

**LAMPIRAN MATERI NASKAH AKADEMIK**

**MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA  
BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH  
DI PROPINSI LAMPUNG**

*“Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan  
Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran”*

**LEGAL DRAFT**

**TENTANG**

**MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  
PARIWISATA BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA  
ANTAR DAERAH DI PROPINSI LAMPUNG**

*“Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan  
Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran”*

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KONSIDERAN**

Menimbang : (1) bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan  
(2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI PROPINSI LAMPUNG

**KONSIDERAN**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
4. Pasal 4 (ayat 1) Undang –Undang Dasar Negara Tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
6. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5262
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepariwisata
10. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 20
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
4. Pasal 4 (ayat 1) Undang -Undang Dasar Negara Tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

6. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5262

7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan

9.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepariwisataan

10.Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 20





Dokumen pendukung luaran Tambahan #1

Luaran dijanjikan: Prosiding dalam pertemuan ilmiah Nasional

Target: sudah terbit/sudah dilaksanakan

Dicapai: Accepted

Dokumen wajib diunggah:

1. Naskah artikel
2. Surat keterangan accepted dari editor

Dokumen sudah diunggah:

1. Naskah artikel
2. Surat keterangan accepted dari editor

Dokumen belum diunggah:

-

Peran penulis: co-author

Nama Konferensi/Seminar: INTERNATIONAL INDONESIA CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY STUDIES (IICIS)

Lembaga penyelenggara: UNIVERSITAS LAMPUNG

Tempat penyelenggara: BANDAR LAMPUNG

Tgl penyelenggaraan mulai: 26 Oktober 2021 | Tgl selesai: 27 Oktober 2021

Lembaga pengindeks: Fisip Universitas Lampung

URL website: <https://iicis.fisip.unila.ac.id/call-for-papers/>

Judul artikel: Pentahelix Model Collaboration in Tourism Industry Development Policy in Pesawaran District

# Pentahelix Model Collaboration in Tourism Industry Development Policy in Pesawaran Regency

Dian Kagungan<sup>1</sup>, Noverman Duadji<sup>2</sup>, Intan Fitri Meutia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Lecturer majoring in State Administration FISIP Lampung University

Email : [dian.kagungan@fisip.unila.ac.id](mailto:dian.kagungan@fisip.unila.ac.id)

## ABSTRACT

The long-term goal of this research is to produce a model pentahelix collaboration in tourism development in the tourist village of Harapan Jaya, Way Ratay District, Pesawaran Regency. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, primary data collected through interviews and FGDs on key informants relevant to this research study. The collaboration of the pentahelix model in the tourism development of the Harapan Jaya tourism village is seen from the parameters of the involvement of various actors to work together in optimizing the development of the Harapan Jaya tourism village and creating added value for tourism products that illustrate characteristics of the unique products of the agro-tourism-based tourism village. The characteristics of the tourism product in question are those related to the potential of the tourism village, including coffee plantations, agriculture and local culinary products (home industry).

The important results and recommendations of this study are the collaboration of the Pentahelix model in the development of the Harapan Jaya Tourism Village needs special attention, and the lack of communication between actors regarding the Harapan Jaya tourism village. The low capacity of funding and management as well as the creativity of skilled human resources in seeking to manufacture local tourism industrial products, especially regarding the handicraft and souvenir industry, also affects the level of pentahelix collaboration in the development of the Harapan Jaya tourism village is less than optimal.

However, so far the presence of the tourist village has also brought a positive impact, opening new jobs, preserving the environment with a beautiful area, so far the development of the Harapan Jaya Tourism Village has fully sold its local natural beauty, including waterfalls, and camping grounds as a source of energy. withdraw from the area. Therefore, the importance of the Pentahelix Model collaboration, with the involvement of Academics, Private, Community, Government and Media is very important to support tourism in the future, but so far this collaboration is still not optimal, measured from the interdependence between actors, the unification of ideas as a whole. constructive, shared decisions, and shared responsibility, only certain parties are involved in the collaboration,

**Key words:** *collaboration, pentahelix model, tourism, Pesawaran*

## 1. PRELIMINARY

Tourism development in Lampung Province is not complete if it goes alone. The government, tourism business actors, universities, the community and the media must work together, so that tourism potential can be exploited to the maximum. The Lampung Province Tourism and Creative Economy Office invites all parties to jointly develop Lampung tourism, and the Lampung Provincial Government has formed a cross-sector Coordination Team as an effort to develop Lampung tourism, in other words, collaboration between pentahelix actors in tourism industry development policies in Lampung Province is very important.

The important role of the Government and local governments in the field of tourism is based on the

idea that the bureaucracy has the power to decide all matters relating to the survival of the people of a country. The bureaucracy also plays an important role in taking various anticipatory actions to minimize negative impacts, given the many potential problems that arise from tourism.

The role of stakeholders in tourism development also cannot be ignored in tourism development policies in Indonesia through empowerment activities carried out, including collaborative process of tourism governance in Pesawaran Regency, Lampung Province. The tourism governance process is a process *adaptive system, and consensus oriented*. Based on 2 experts, namely: Anshell and Gash (2008) mapped out a collaborative process starting with face-to-face dialogue, building trust, building commitment to the process, sharing

understanding (shared understanding), then the formation of an intermediate outcome (intermediate outcome)

The collaboration of the pentahelix model in the development of tourism village tourism is seen from the parameters of the involvement of various actors to work together in optimizing the development of tourist villages. The collaborative process of tourism and tourism management is assumed to occur if several conditions are met, (i). There is stakeholder participation. Participation is actually citizen power, (according to Arnstein) (ii). There is a condition where there is equality of power, meaning that there is no certain domination, every actor in dialogue is not hindered by hierarchical boundaries and there is mutual respect (iii). There are competent actors

The problem formulation of this research is: how is the collaboration between pentahelix actors in the tourism industry development policy in Pesawaran Regency?

The long-term goal of this research is to produce a pentahelix collaboration model in tourism development in the tourist village of Harapan Jaya, Way Ratay District, Pesawaran Regency which is the location of this research.

The benefits of this research are: improving the welfare of local communities in the policy of developing the tourism industry in Pesawaran Regency, precisely in Harapan Jaya village, Way Ratay District.

## LITERATURE REVIEW

### *1.1. Concept of Tourism Development Policy*

In today's modern life, development activities, including tourism development, will not run well without a good policy. A good policy can be illustrated as a conductor who arranges the game of an orchestra consisting of many musicians with different types of musical instruments, sounds, and time to play them, so as to produce a very beautiful song. Thus, every tourism person, and even more so bureaucrats, both within the Government and regional governments, must have a deep understanding of the importance of formulating and implementing good policies in tourism.

Judging from the aspect of practical needs, discussions about theories related to development policies are often not given much attention. People who hear the term "tourism development policy" in general will automatically focus their attention on activities carried out by the Government and local governments in classifying tourism. However, several theories related to the concept in question need to be disclosed in this paper because they help provide a deeper understanding of the activities that should be carried out by the Government and local governments in tourism management. When we talk about the problem of tourism development policy, it is necessary to first discuss the meaning of the terms "policy" and "development".

“(1) cleverness; proficiency; wisdom; (2) a series of concepts and principles that become the outline and basis of plans in the implementation of a job, leadership, and ways of acting (regarding government, organization, etc.); a statement of ideals, goals, principles, or intentions as guidelines for management in an effort to achieve goals; direction.”

Meanwhile in the Merriam-Webster Dictionary, the term "policy" which is translated into Indonesian as "policy", is defined as a rule or idea officially recognized as a guideline for determining the implementation of activities: "an officially accepted set of rules or ideas about what should be done". Thus, the term "policy" or "policy" (especially the definition number 2) in principle is a parameter that is used as the basis or guideline for carrying out an activity. The difference between the two terms is that it is not explicitly explained whether "policy" is also includes statutory regulations. This is different from the term "policy" which has a clearer meaning.

Another simple definition of the term is that the direction of action or method of action is chosen from various alternatives by considering the factual conditions, which determine current and future decision making: "A definite course or method of action selected from among alternatives and in the light on given conditions to guide." and determine present and future decisions". In relation to government duties, according to Edgell and Swanson (2013), understanding of policy in the field of tourism will be easier if it starts from Thomas Dye's definition of "public policy", namely any action to do or not to do that is chosen by the government: "whatever government". choose to do or not to do".

Meanwhile, the term "development" is defined as a process of change based on the wishes of a nation's society (Sasmojo, 2004: 1), of course for the better. If it is then associated with these two terms and the term "public policy", then "development policy" will have the meaning as an officially recognized parameter that is used as a basis or guideline by the Government to do or not do something for the realization of a change process based on the wishes of the government. a nation for the better.

In the field of tourism, the term in English is also known, namely "tourism policy". According to Goeldner and Ritchie (2009:414), the term is defined as follows: "Tourism policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strategies that provide a framework within which the collective and individual decisions directly affect long-term tourism development and the daily activities within a destination are taken".

Another opinion regarding this term is also expressed by Paul S. Biederman (2008) in a book entitled *Travel and Tourism: An Industry Primer*, which adds a social aspect to tourism policy: "A tourism policy defines the direction or course of action that is a particular country, region, locality, or an individual

*destination plans to take when developing or promoting tourism. The ker principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of tourism policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and the lives of its citizens."*

The two definitions above illustrate that what is meant by tourism policy or what the author translates as "policy in the field of tourism" are various kinds of rules, strategies and targets for tourism development or promotion that become guidelines for decision making in the short and long term. This policy must ensure that the main goal is to make the people concerned who live in tourism destinations obtain optimal benefits from the contribution of tourism in the social and economic fields in the form of progress and quality of life. If it is associated with the concept of development, it means that the rules, strategies and objectives of the development or promotion of tourism must lead to changes based on the wishes of a nation's people.

Edgell and Swanson (2013) argue that in essence policy in the field of tourism is every government action in the legislative, administrative, and judicial fields that affect tourism. This includes marketing, planning and sustainability activities. According to them, the policy forms are various guidelines (rules), principles and procedures, which are structured ethically and are focused on an issue and represent the expectations of a society (or nation) in relation to aspects of planning, development, products, services, marketing and other aspects of development. sustainability.

## **1.2 Synergy Concept**

Najiyati and Rahmat in Rahmawati et al (2014:643) define synergy as a combination or combination of elements or parts that can produce better and greater output than before. So synergy can also be understood as a joint operation or a combination of elements to produce a better output. Covey in Kurniawan & Suryawati (2017:40) defines synergy as a combination between elements and between parts that will get a better output than before. Indicators in analyzing synergy according to doctoroff's opinion include indicators of effective communication, fast feedback, trust, and creativity between related parties which are the main requirements for an ideal synergy system.

Sofyandi & Garniwa in Rahmawati et al (2014: 643) suggest that synergy can be built properly in two ways including

1. Source-oriented communication which views communication as an activity with a person (source) actually moving stimuli to get a response, and receiver-oriented communication which views communication

as all activities in which a person (receiver) responds to a stimulus or stimulus.

2. Coordination

Communication cannot stand alone without coordination. In this case, Silalahi in Rahmawati et al (2014:643) defines coordination as a form of integration of individual activities and units into a joint effort, namely working towards a common goal.

Moekijat in Rahmawati et al (2014:643) states that there are 9 (nine) main requirements in realizing effective coordination, namely

1. Direct relationships that will facilitate achievement through direct personal relationships
2. Early opportunities in the early stages of planning and policy making.
3. Continuity of coordination that must take place at all times starting from the planning stage
4. Dynamism, coordination must be continuous
5. Clear goals to achieve effective coordination.
6. Simple organization to facilitate effective coordination.
7. Clear formulation of authority and responsibility that will reduce conflict between different employees and help in working with unity of purpose.
8. Effective communication
9. Effective supervisory leadership that will ensure the coordination of activities both at the planning level and at the evaluation level.

Synergy in achieving goals can be achieved through good communication and coordination. The concept of synergy is an effort that must be made in implementing government and non-government systems both at the central and regional levels.

## **1.3 Pentahelix Model Concept**

The pentahelix model was first launched by the Minister of Tourism and Creative Economy, Arief Yahya, which was then incorporated into the Regulation of the Minister of Tourism of the Republic of Indonesia Number 14 of 2016 concerning Guidelines for Sustainable Tourism Destinations that to create, ensure the quality of activities, facilities, services, and to create experiences and the value of tourism benefits in order to provide benefits and benefits to the community and the environment, it is necessary to encourage the tourism system through optimizing the role of entrepreneurs, government, society/community, academics and the media.

Kotler et al in Saputri (2020: 24) state that tourist destinations will gain a competitive advantage if each of the organizations involved can share knowledge, skills, expertise, and other resources that can support the tourism development process. In this case the pentahelix model focuses on 5 elements that support the

implementation of tourism development including the government as a policy maker, academics as a transfer of knowledge and related research, the community or community as a social force, entrepreneurs as a force in market mechanisms and the media as a means of promoting tourism objects. the.

#### **1.4 Pentahelix Actor Role**

The management of the tourism sector cannot be separated from the role of stakeholders in the development process. There are 5 (five) actors who actively contribute in the process of developing the tourism sector, including:

a. Government

In the process of developing the tourism sector, the government plays a role in the process of providing adequate facilities and infrastructure to support tourism development, preparing policies and regulations relating to the tourism sector, providing adequate facilities and carrying out promotional and marketing activities for these tourist destinations. The role of the government in making policy and regulations in the field of tourism will affect the tourism development process. The government also plays a direct role in the development of regulations in the field of tourism, controls the tourism development process, and plays a direct role in strengthening institutions in an effort to increase capacity and capability in formulating policies or regulations.

b. Academics

Academics in the tourism development process play a role by conducting scientific studies as well as various research and community services related to the development of the tourism sector in an area. The results of scientific studies and community service conducted by academics can be used to support the success of the tourism sector by collaborating and communicating with academics in the process of developing agro-tourism.

c. Business world

In the process of tourism development, the business or private sector plays an important role in conducting business in the tourism sector that prioritizes business ethics, is professional, responsible and sustainable. The business world acts as a profit oriented that will be responsible for environmental sustainability as a very important thing in the tourism sector.

d. Community

The community in the tourism development process consists of the community and NGOs or NGOs whose role is to support *Sapta Pesona* by providing tourism services or the creative

economy. The community is both an object and a subject in the tourism development process.

e. Media

The media plays a role in the field of information and tourism promotion. Promotion and marketing in the tourism sector that is inclusive by utilizing social media.

#### **METHOD**

The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, primary data collected through interviews and FGDs on key informants relevant to this research study. The data were analyzed through the stages of data reduction to drawing conclusions. The collaboration of the pentahelix model in the tourism development of the Harapan Jaya tourism village is seen from the parameters of the involvement of various actors to work together in optimizing the development of the Harapan Jaya tourism village and creating added value for tourism products that illustrate characteristics of the unique products of the agro-tourism-based tourism village. The characteristics of the tourism product in question are those related to the potential of the tourism village, including coffee plantations, agriculture and local culinary products (home industry).

#### **RESULTS AND DISCUSSION**

Tourism development in Lampung Province is not complete if it goes alone. The government, tourism business actors, universities, the community and the media must work together, so that tourism potential can be exploited to the maximum. The Lampung Province Tourism and Creative Economy Office invites all parties to jointly develop Lampung tourism, and the Lampung Provincial Government has formed a cross-sector Coordination Team as an effort to develop Lampung tourism, in other words, collaboration between pentahelix actors in tourism industry development policies in Lampung Province is very important.

The important role of the Government and local governments in the tourism sector is based on the idea that the bureaucracy has the power to decide all matters relating to the survival of the people of a country. The bureaucracy also plays an important role in taking various anticipatory actions to minimize negative impacts, given the many potential problems that arise from tourism. This third year research took place in Pesawaran Regency, precisely in Harapan Jaya Village, Way Ratay District.

#### **Overview Of Way Ratay District, Pesawaran Regency**

Way Ratai District is one of the sub-districts located in the west of Pesawaran Regency and has an average distance of 40.32 km from the capital of Pesawaran Regency. Geographically, it is located in the

south of Lampung Province with some areas in the form of hills, sloping plains, and the coast. Since its inauguration on November 2, 2007 based on Law no. 33 of 2007 in Pesawaran Regency has 11 sub-districts and 114 villages.

Pesawaran is the eleventh district in Lampung Province which was formed in 2007 based on Law no. 33 of 2007. Pesawaran Regency has its capital in Gedong Tataan, 27 km from Bandar Lampung. Pesawaran has 11 sub-districts and 144 villages. Way Ratai District is one part of the Pesawaran Regency area. To the north, Way Ratai District is bordered by Kedondong District, Pesawaran Regency. To the south, it is bordered by the Gedong sub-district of Pesawaran regency. In the east it is bordered by Padang Cermin District. In the west, it is bordered by Kelumbayan District, Tanggamus Regency. Part of Way Ratai District is a lowland area, part of it is a hill area and with a total sub-district area of 127.21 Km<sup>2</sup>. Way Ratai District has its capital in Wates Way Ratai Village, which is 41 km from the capital of Pesawaran Regency. Wates Way Ratai Village has the smallest area of 21.56 km<sup>2</sup>.

Way Ratai District is one of the developing areas that is in the spotlight of the government because there are many potential areas that can be developed and become regional advantages. including being a tourist area, an area for agricultural commodities, plantations and freshwater fisheries. Being a new development area has caused RT and hamlets in Way Ratai Sub-district to change so that in 2019 until now there are 206 RT and 72 hamlets (BPS: Way Ratai Regional Statistics 2020).

Way Ratai sub-district is one of the developing areas that is in the spotlight of the government. As a new development area, the RT and hamlets in Way Ratai Sub-district underwent changes so that in 2014 until now there were 206 RTs and 72 Hamlets (BPS: Way Ratai Regional Statistics 2016). Based on its location, Way Ratai District is bordered to the north by Kedondong District, to the south by Gedong Tataan District, to the west by Kelumbayan District, and in the east by Padang Cermin District (BPS: Administrative Map of Way Ratai District).

Based on its location, Way Ratai District is bordered to the north by Kedondong District, to the south by Gedong Tataan District, to the west by Kelumbayan District, to the east by Padang Cermin District (BPS: Administrative Map of Way Ratai District). With the characteristics of the area whose morphology is mostly in the form of hills and forest areas, there are still many forest areas and protected forests. The unspoiled forest land cover area borders the Way Ratai District, namely the Wan Abdurahman Forest Park area.

Way Ratai Subdistrict, there is a self-help village, Harapan Jaya Village, which is located close to

a protected forest area with an annual rainfall of  $\pm$  2500-3000 mm, located at an altitude of more than 500 meters above sea level with a hilly topography of slopes dominated by steep slopes so that the development of population settlements has a spread pattern and has a With an area of  $\pm$  15 km<sup>2</sup> consisting of 8 hamlets and 17 RTs, Harapan Jaya Village is located quite far from the capital city of Pesawaran Regency ( $\pm$  70km) with road access mostly in the form of rocky soil, making this village a little difficult to develop both in terms of social and economic aspects. The number of people living in Harapan Jaya village is classified as moderate, namely 1,520 male residents and 1,325 female residents (BPS Kab. Pesawaran 2020). When viewed by gender,

Many people who live in Harapan Jaya Village work in the plantation sector by cultivating land on the hillsides to plant food crops such as corn, sweet potatoes, soybeans, and rice. The planting and tillage system of the people of Harapan Jaya Village is still traditional because the education of the community is still at the basic education level, limited infrastructure and lack of knowledge about technology. From 2015-2020 there was an increase in the number of children attending elementary school (4.22%) but the number of children attending junior and senior high school actually decreased by 6.36% and 2.29%, respectively (Cabdin Pendidikan Kec. Way Ratai).

Administratively, the spatial distribution of Harapan Jaya Village with other areas is:

1. To the north it is bordered by: Register 19 Wan Abdul Rahman Forest
2. In the east, it is bordered by Padang Cermin Village, Padang Cemin District
3. To the south, it is bordered by Way Urang Village, Hanau Berak Village, Padang Cermin District.
4. In the west it is bordered by Paya Village, Padang Cermin District and Pesawaran Indah Village, Way Ratai District.

### ***Pentahelix Model Collaboration and Harapan Jaya Tourism Village Development***

At the collaboration stage of the Pentahelix Model in the Development of the Harapan Jaya Tourism Village, Way Ratay District, the parameters seen are how the involvement of various actors is to work together in optimizing development in village tour Jaya and create added value producttourist which describe the characteristics of the uniqueness of the product from the tourist village of Harapan Jaya that distinguishes it from other tourism. The characteristics of the tourism product in question are those related to the potential of the tourist village such as the management of local handicraft businesses that are characteristic of regional culture, waterfall tourist destinations, regional culinary business management, lodging business management, and also business

management in the form of stalls and restaurants. shops for necessities for everyday life.

### **Interdependence**

In the development of the Harapan Jaya Tourism Village, Way Ratay District, mutual dependence is one of the benchmarks for seeing the optimal development of the Harapan Jaya Tourism Village, according to (Grey, 1989) in seeing the creation of collaboration, one of which is through the component of interdependence in the world of tourism. Therefore, in this study, the researcher wrote that according to the observations of the Pentahelix Model Collaboration research in the development of the Harapan Jaya Tourism Village, it is still not fully optimal in accordance with the theory of interdependence, which according to tourism stakeholders is to foster a sense of dependence between actors, the need for empowerment, especially human resources. the same culture and mainset in order to understand the Proportionality and Weaknesses of each actor to take part in accordance with their respective functions in developing the Harapan Jaya Tourism Village. So far, the community, government, academics, communities and media have not really existed in the Pentahelix Model Collaboration in the Development of the Harapan Jaya Tourism Village, therefore it is necessary to raise awareness among actors because so far our awareness level in the world of tourism is still very low, still working with each other. own (self-help) because according to the recognition of the tourism awareness group (POKDARWIS) to increase interdependence on other actors it still does not exist because there is no collaboration with related parties but POKDARWIS also does not want dependence on other parties.

### **Constructive Unification of Thoughts To Reach Solutions**

The second component according to (Gray, 1989) for the creation of a collaboration is through the unification of thoughts constructively to equate the vision & mission and find solutions in development. Harapan Jaya Tourism Village so far still needs to be considered and requires a lot of ideas and innovations in an effort to develop the Harapan Jaya Tourism Village, therefore the role of collaboration of various components is very important in efforts to develop a culture-based tourism village to provide input and ideas for a good mindset. creative in building a tourist village area.

But so far from the results of research observations, researchers describe the problems that are often found in building tourism collaborations in the Harapan Jaya tourist village, the lack of awareness in collaborating in tourism with other actors so that cooperation in unifying the mindset in the development of the tourist village itself is not optimal because there is no shared vision and mission, therefore participation from other parties will certainly

have a positive impact on the development of the Harapan Jaya Tourism Village because the large number of participations will certainly increase the level of concern for tourism. However, do not forget that there are negative impacts as well, because in collaborating, there is not only a signature on paper, but also a moral burden and responsibility as well as the challenges that will be faced in the future.

### **Join Ownership of Decisions**

The third concept according to (Gray, 1989) is that collaboration is created based on joint decisions between actors in policy making. So far, from the results of research observations carried out in the Harapan Jaya Tourism Village, it has begun to be seen with the Musrenbang in tourism development by inviting leaders, village officials, tourism offices, academics, media, and the private sector as well as other groups involved in the Pentahelix Model Collaboration. In the development of the Harapan Jaya Tourism Village, Way Ratay District, Pesawaran Regency. However, so far it is still not optimal in terms of meetings so that decision making is still not based on mutual agreement, because so far tourism has only been self-supporting and only a few components are involved.

So far, the lack of smooth communication is the cause of less than optimal decision making with all actors, because concern for the world of tourism still needs to be improved, therefore the importance of face-to-face meetings, in addition to facilitating communication, is one of the efforts to establish good relations between components. . Furthermore, Harapan Jaya Tourism Village is more focused on deliberation between components and other actors to open informal meetings or formal meeting events as a forum to accommodate input and evaluation to build optimal collaboration. In addition, there must also be disclosure of information as well as submitting acceptable and unacceptable inputs.

### **Shared responsibility**

Fourth, according to (Gray, 1989) the concept of collaboration is that tourism is no longer just the responsibility of one party but rather builds a shared responsibility between various parties. From the results of observational research, the concept has been running in accordance with field conditions. However, for the concept of responsibility so far there is still no binding law on the meaning based on a cooperation (MOU). So far, only a few parties have collaborated in tourism villages because of the importance of socialization as one of the ways to increase the number of people participating in the Sei Gohong tourist village. According to several stakeholders engaged in tourism so far, there has been no official collaboration, but personally it has always supported the development of the Harapan Jaya Tourism Village for the progress of our Tourism Village. And so far the professionalism and responsibility of various groups can be seen and

proven by so far there is still one vision to introduce Tourism Villages and can still be directed as tourism village work partners, but it does need a very long process because Harapan Jaya Tourism Village still has work home, to be able to introduce Harapan Jaya Tourism Village and sell unique products that are of public concern.

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

In order to improve the collaboration of the Pentahelix Model in the development of an optimal Harapan Jaya Tourism Village, special attention needs to be paid, due to the low collective awareness of various actors towards neglect, always waiting for directions, and the lack of communication between actors regarding the Harapan Jaya Tourism Village. The low ability of funding and management as well as the creativity of skilled human resources (HR) in seeking to manufacture local tourism industrial products, especially regarding the handicraft and souvenir industry, also affects the level of pentahelix collaboration in the development of the tourism village of Harapan Jaya is less than optimal.

However, so far the presence of a tourist village has also brought a positive impact, opening new jobs, preserving the environment with a traditional cultured area that is still beautiful, although so far the development of the Harapan Jaya Tourism Village has not fully sold its local beauty in the Tourism Village area. Therefore, the importance of the Pentahelix Model Collaboration, with the involvement of Academics, Private, Community, Government and Media is very important for supporting tourism in the future. but so far, the cooperation is still not optimal, measured from the interdependence between actors, constructive unification of thoughts, joint decisions, and shared responsibilities, only certain parties are involved in the collaboration,

## SUGGESTION

1. The existence of special regulations as a supporting factor for collaboration *pentahelix*.
2. Continuous development programs through trainings, are very important to do, especially with regard to fostering the processing and marketing of superior products of local tourist destinations, including budget assistance.
3. Continuous coordination with pentahelix actors in the implementation of various tourism events.

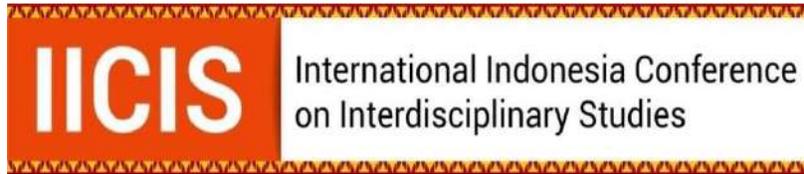
## REFERENCES

1. Agranoff, Robert & Michael McGuire. 2003. Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Washington DC: Georgetown University Press.
2. Ansell, Chris, & Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, Hlm. 543-571.
3. Friedman, Andrew L. and Samantha Miles. 2006. Stakeholders: Theory and Practice. New York: Oxford University Press.
4. Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Community Based Rural Tourism Planning A Conceptual Approach. Yogyakarta: Graha Ilmu.
5. Lindmark, A., Sturesson, E., and Ross. 2009. Difficulties of Collaboration for Innovation. Land University
6. Liu, Juanita C. 1994. Pacific Islands Ecotourism: A Public Policy and Planning Guide. Hawaii: The Pacific Business Center Program. College of Business Administration University of Hawai'i at Manoa, Honolulu USA.
7. Moleong, Lexy J. Qualitative Research Methods. Bandung: PT. Rema Rosadakarya.
8. Pitana, I Gde and I Ketut Surya Dinata. 2009. Introduction to Tourism Science. Yogyakarta: Publisher Andi.
9. Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2013. Community Based Tourism Destinations. Jakarta: Salemba Humaniaka.

10. Richardson, John I and Martin Fluker. 2004. Understanding and Managing Tourism Australia. NSW: Pearson Education.
11. Sugiono. 2018. Qualitative Research Methods. Bandung: Alfabeta Publishers, CV.
12. Yoeti, H. Oka A. 2016. Tourism Planning and Development. Jakarta: Publisher PT Balai Pustaka (Persero).
13. Wood & Gray, 1991. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus. Available Pages:<https://www.merriam-webster.com/dictionary/collaboration>.

Journal:

14. Muhyi, HA, Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T. (2017). The Pentahelix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. Review of Integrative Business and Economics Research, 6(1),412. 417. Available page[https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riberth16-131\\_412-417.pdf](https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riberth16-131_412-417.pdf). [ 9 August 2021)
15. Subiantoro, Jhevenda Rafael. 2019. Collaboration between Stakeholders in the One Village One Product Kendang Jimbe Program in Blitar City. (Journal), 5 (15), 15 pages. Available<http://repository.unair.ac.id/en/eprint/83427>. [August 20, 2021].
16. Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government.
17. Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning Tourism



Bandar Lampung, 17 July 2021

Dear Authors,

We are pleased to inform you that your abstract has been accepted as an oral presentation for the 2<sup>nd</sup> Indonesia International Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS) 2021, which will be held as an Online Webinar on 26-27 October 2021.

Abstract Title:

**Pentahelix Model Collaboration in Tourism Industry Development Policy in Pesawaran District**

For the full paper, we have uploaded the guideline in the IICIS 2021 website. Authors are required to strictly follow the guidelines.

<https://iicis.fisip.unila.ac.id/call-for-papers/>

We would like to thank you for your contribution to the conference, and look forward to seeing you in October.

Warmest regards,

IICIS's Secretariat Team  
The 2<sup>nd</sup> Indonesia International Conference on Interdisciplinary Studies  
[iicis@fisip.unila.ac.id](mailto:iicis@fisip.unila.ac.id)